PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 6 Februari 2026

Yth. Asisten Administrasi Umum
Cq. Kepala Bagian Organisasi
Kabupaten Nganjuk

di
Nganjuk

SURAT PENGANTAR
Nomor: 000.8.6.3/50/411.311/2026

No	Naskah Dinas/Barang yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025	1 Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan penanganan lebih lanjut

Pengirim
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk

6/2/26
Pengirim
SUWONO

Itsna Shofiani, S.T, M.T
Pembina TK.I
NIP. 19790404 200312 2 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2025| DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

Jl. Dermojoyo Nomor 45 Nganjuk

Telp / Fax : 0358-325200

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya hingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025. Setiap Pimpinan dan/atau Pejabat Struktural di Lingkungan Kabupaten Nganjuk bertanggungjawab dan memerintahkan kepada pejabat dan/atau pejabat fungsional umum untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan.

Pelaporan Kineja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksana tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setia pengguna anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagai mana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Demikian Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Nganjuk, 6 Februari 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk

ITSNA SHOFIANI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790404 200312 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Permenpan Nomo 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 08);

7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja digambarkan sebagai berikut :

Kepala Dinas membawahi :

1. Sekretariat terdiri dari :
   a) Subbagian Umum dan Kepegawaian
   b) Perencana Ahli Muda
   c) Analis Keuangan Pusat dan Daerah
2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi terdiri dari :
   a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   b) Pengantar Kerja Ahli Muda
3. Bidang Hubungan Industral dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari :
   a) Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda

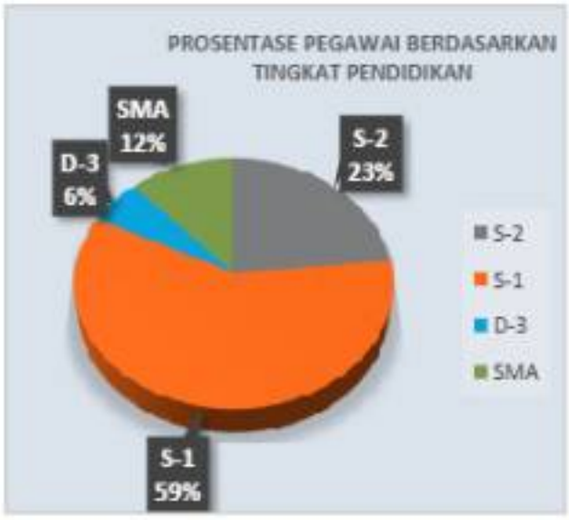
Susunan organisasi sebagaimana tersebut diatas digambarkan dalam bagan sebagaimana berikut:

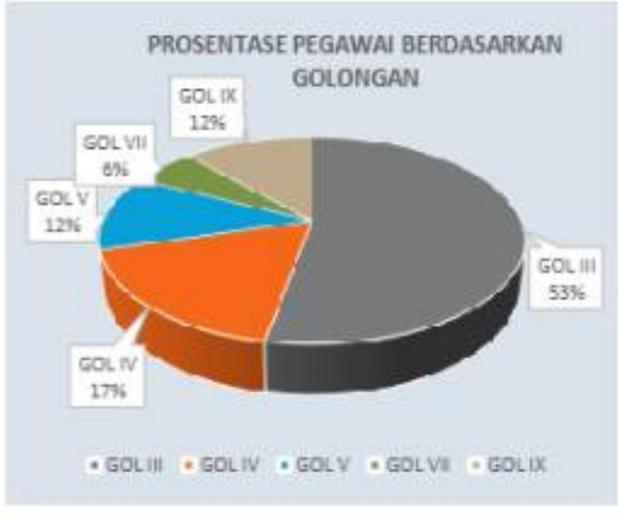


1.1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 5 orang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan persentase dan rincian sebagai berikut :

1. Prosentase Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan Dan Golongan





Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa persentase tingkat pendidikan pegawai terbesar ada pada jenjang S-1 sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar

59%, sedangkan persentase pegawai berdasar golongan terbesar ada pada Golongan III sebanyak 9 orang dengan persentase sebesar 53% di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

2. Rincian Pegawai Berdasar Jabatan Struktural/Fungsional dan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.1

Pegawai Berdasar Jabatan Struktural/Fungsional dan Jenjang Pendidikan

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	Itsna Shofiani, S.T., M.T. NIP. 19790404 200312 2 006	Kepala Dinas	IV/b	S-2
	Sekretariat			
2	Singgih Wiratno, S.AP NIP. 19680819 199202 1 001	Sekretaris	III/d	S-1
3	Wahyuni Sulistyo, S.KM NIP. 19820314 200501 2 010	Subbagian Umum dan Kepegawaian	III/d	S-1
4	Sri Utami, S.Sos NIP. 19730424 199503 2 003	Perencana Ahli Muda	III/d	S-1
5	Ujiana Wahyuni, SS NIP. 19860709 201101 2 007	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	III/d	S-1
6	Alfan Dwi Putranto, S.Sos NIP. 19800507 201001 1 005	Penelaah Teknis Kebijakan	III/b	S-1
7	Fitria Asmarani, A.Md NIP. 19780513 202421 2 001	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	VII	D-3
8	Agus Witarso NIP. 19780827 202521 1 005	Pengadministrasi Perkantoran	V	SMA
9	Godha Priyo Cahyoko NIP. 19800404 202521 1 014	Pengadministrasi Perkantoran	V	SMA
	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi			
10	Zainal Guzali, S.T., M.AP NIP. 19751208 200604 1 004	Kepala Bidang Penempatan Tenaga	IV/a	S-2

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN
		Kerja. Pelatihan dan Transmigrasi		
11	Titik Purwani, S.Sos NIP. 19740215 199803 2 004	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	III/c	S-1
12	Sean Fitria Rohmawati L, S.AP NIP. 19911109 202012 2 007	Penelaah Teknis Kebijakan	III/b	S-1
13	Siti Aminah, AMK., SKM NIP. 19710827 199503 2 005	Pengelola Data dan Informasi	III/d	S-1
14	Indarti, SE NIP. 19800113 202421 2 002	Pengantar Kerja Ahli Pertama	IX	S-1
15	Agus Salim, S.Sos NIP. 19700201 202421 1 001	Pengantar Kerja Ahli Pertama	IX	S-1
	Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja			
16	Suwanto, SH, MH NIP. 19810106 200604 1 010	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	IV/a	S-2
17	Deky Nurmansyah, SH, MH NIP. 19831007 200903 1 004	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	III/d	S-2

1.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pembangunan Daerah tidak dapat terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana yang bersifat fisik sebagai pendukung kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tercukupinya penyediaan sarana dan prasarana pendukung akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi.

Gedung Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk terletak di Jalan Dermojoyo No. 45 Nganjuk dengan luasan 4.157 m2. Selain Ruang Gedung Utama untuk kantor di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk terdapat pula Ruang Aula Pertemuan yang mampu

menampung 100 (orang) peserta rapat, sehingga keberadaan sarana fisik berupa gedung perkantoran dirasa cukup memadai untuk pelaksanaan tugas sehari – hari.

Prasarana lain berupa penerangan listrik telah memiliki instalasi tersendiri sehingga penggunaan listrik sudah memadai, juga dengan prasarana komunikasi berupa telepon/faximili sudah terpasang dan berfungsi dengan baik. Sedangkan untuk prasarana jaringan internet yang sudah terjangkau oleh internet dari Diskominfo sehingga memudahkan pelayanan bidang penempatan tenaga kerja.

Prasarana mesin ketik komputer/printer yang ada kurang memadai dengan kebutuhan yang diperlukan baik jumlah maupun keadaan komputer tersebut, sehingga diperlukan adanya tambahan dana pemeliharaan dan pengadaan baru secara bertahap. Penambahan layar interaktif pada sarana dan prasarana rapat dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan rapat koordinasi serta kegiatan internal perangkat daerah. Penambahan layar interaktif memungkinkan penyajian materi secara lebih jelas, dinamis, dan real time, sehingga memudahkan peserta rapat dalam memahami substansi pembahasan dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Hal serupa juga terjadi pada sarana meubelair yang memerlukan penambahan rak serta perbaikan.

Prasarana tanah yang ada sebanyak 1 bidang, alat angkutan sebanyak 22 unit, alat kantor dan rumah tangga sebanyak 311 unit, alat studio komunikasi dan pemancar sebanyak 8 unit, alat komputer sebanyak 86 unit, bangunan gedung sebanyak 12 unit, tugu titik kontrol/pasti sebanyak 3 buah serta instalasi jaringan listrik sebanyak 3 titik dengan nilai total aset sebesar Rp. 3.029.116.155.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk merupakan institusi pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menangani urusan tenaga kerja. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja meliputi:

TUGAS POKOK :

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk yaitu:

"Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja."

FUNGSI :

Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

- **KEPALA DINAS**

  Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.

  a. Sekretariat

     Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

     Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

     1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
     2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
     3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
     4. Pembinaan aparatur;
     5. Pengelolaan urusan kepegawaian;
     6. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
     7. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
     8. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
     9. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
     10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian **mempunyai tugas**:

1. Merencanakan kegiatan di subbag umum berdasarkan rencana operasional yang telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbag umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib danlancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian arsip dan ekspedisi sesuai dengan perosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan pengolahan surat menyurat dan tata usaha, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan, melakukan inventarisasi dan pengolahan terhadap barag peralatan dan perlengkapan kantor serta administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan, melakukan inventarisasi dan pengolahan terhadap barang peralatan dan perlengkapan kantor serta administrasi kepegawaian;
7. Melakukan inventarisasi danpengolahan terhadap barang peralatan dan perlengkapan kantor serta administrasi kepegawaian;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subbag umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yangada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang, dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

❖ Perencana (Ahli Muda)

Perencana (Ahli Muda) mempunyai tugas :

1. Menformulasikan sajian untuk analisis;
2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. Menyusun alternatif model hubungan kausal / fungsional;
5. Menguji alternatif kriteria dan model;
6. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek.
7. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral.
8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional.
9. Menyususn perencanaan program dan kegiatan sektoral.
10. Menyususn rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan.
11. Melakukan telaahan lingkup sektoral regional proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif.
12. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

❖ Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas:

1. Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah terutama yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;
2. Melakukan pengolahan dan analisis data mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, dan geografis;

3. Malakukan kajian teknis mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasaran, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;
4. Melakukan persuasi kebijakan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;
5. Melakukan analisis dan penyajian informasi keuangan dan nonkeuangan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;
6. Menyusun makalah mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pendapatan belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;

b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi

Bidang penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis menyelenggrakan pengurusan pemerintahan dan

pelayanan umum, membina dan melaksankan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja dan tranmsigrasi kepada masyarakat;
2. pengoordinasian penyuluhan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi kepada masyarakat;
3. pelaksanaan verifikasi penerbitan ijin kepada lembaga swasta dan transmigrasi kepada masyarakat;
4. pelaksanaan promosi dan penyebar luasan informasi dan syarat-syarat mekanisme bekerja ke luar negeri dan transmigrasi kepada masyarakat;
5. pengoordinasian pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan;
6. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi pencari kerja dan transmigrasi;
7. pengoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan ke luar negeri;
8. pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja bagi PMI;
9. pengoordinasian penyelesaian permasalahan PMI pra, selama dan purna penempatan;
10. pengoordinasian pelaksanaan pemulangan dan kepulangan PMI;
11. pelaksanaan penerbitan rekomendasi perpanjangan IMTA bagi TKA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah;
12. pelaksanaan penerbitan perpanjangan IMTA bagi TKA yang berlokasi kerja di daerah;
13. pengoordinasian kegiatan penempatan kerja dengan pengawas ketenagakerjaan;
14. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
15. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;

16. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

❖ Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas antara lain :

1. Seksi Penempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas: merumuskan kebijakan teknis di Seksi Penempatan dan Transmigrasi;
2. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. membina dan melaksanakan tugas di bidang penempatan tenaga kerja;
4. memberikan tanda daftar pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) kepada sekolah, perguruan tinggi maupun lembaga penempatan kerja swasta;
5. menyelenggarakan unit pendaftaran penerimaan dan penempatan calon PMI yang rekruter;
6. memberikan rekomendasi paspor PMI;
7. menyelenggarakan pemberdayaan PMI purna penempatan;
8. melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan program transmigrasi kepada penduduk yang berpotensi menjadi transmigran;
9. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
10. menyusun rencana pengerahan dan fasilitasi, perpindahan transmigrasi, penjajakan dan melakukan kerjasama dengan daerah penerima berkaitan dengan penempatan lokasi;
11. melaksanakan fasilitas dokumen–dokumen kependudukan bagi para transmigran dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
12. monitoring dan evaluasi tranmsigran paska penempatan; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Pengantar Kerja (Ahli muda)

Pengantar Kerja (Ahli Muda) mempunyai tugas :

1. Mengidentifikasi sumber daya pelayanan antar kerja;
2. Melakukan layanan analisis jabatan lanjutan;
3. Menganalisis informasi pasar kerja;
4. Melakukan penyuluhan jabatan kepada tenaga kerja ter-PHK / disabilitas / lansia/ orang tua siswa / kelompok masyarakat;
5. Menyusun struktur biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia;
6. Mengevaluasi substansi perjanjian kerjasama / kemitraan pelayanan antar kerja;
7. Mensosialisasikan program / kegiatan pelayanan antar kerja pemberi kerja atau lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
8. Melakukan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja;
9. Melakukan bimbingan jabatan kepada tenaga kerja pernah bekerja atau ter-PHK atau disabilitas atau lansia atau alih profesi atau karyawan perusahaan;
10. Melakukan rekruitmen calon tenaga kerja untuk penempatan;
11. Melakukan seleksi administratif pencari kerja untuk penempatan;
12. Menganalisa dokumen perjanjian penempatan atau perjanjian kerja;
13. Menganalisis dokumen perjanjian penempatan atau perjanjian kerja;
14. Menganalisis penyediaan dokumen pemberangkatan tenaga kerja;
15. Melakukan pendampingan pemberangkatan tenaga kerja;
16. Melakukan pemantauan penempatan tenaga kerja;
17. Mendampingi peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja;
18. Melakukan penyelesaian masalah selama penempatan tenaga kerja dalam / luar negeri;
19. Melakukan pendampingan pemulangan tenaga kerja;
20. Melakukan penilaian kelayakan permohonan pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 10 orang TKA secara daring;
21. Melakukan validasi dan analisis permohonan pengesahan / pencabutan / perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
22. Menganalisis hasil pemantauan penggunaan TKA;

23. Menganalisis pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja pendamping;
24. Menganalisis kelayakan permohonan perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga kerja melalui uji kesahihan (ekspose);
25. Memverifikasi berkas kelayakan permohonan perizinan atau pencabutan izin lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
26. Menyusun rekomendasi sertifikat standart atas permohonan perizinan berusaha atau pencabutan izin lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
27. Menyusun konsep penolakan permintaan kelengkapan perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
28. Melakukan pemantauan operasional lembaga penempatan / bursa kerja layak;
29. Memantau pelayanan antar kerja;
30. Mengevaluasi kerja sama / kemitraan pelayanan antar kerja.

c. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja menyelenggarakan tugas:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
2. penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

❖ Mediator Hubungan Industrial (Ahli Muda)

Mediator Hubungan Industrial (Ahli Muda) mempunyai tugas :

1. Melakukan penilaian hubungan industrial di perusahaan;
2. Menyusun peta hubungan industrial Kabupaten/Kota;
3. Menyusun rencana pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring sarana hubungan industrial di perusahaan;
4. Merumuskan strategi pencegahan dan penanganan diskriminasi di tempat kerja;
5. Mengidentifikasi kepesertaan program jaminan sosial;
6. Menyusun profil tenaga penyelesaian hubungan industrial di luar pengadilan;
7. Menganalisis sistem pengupahan;
8. Menyusun kompilasi putusan pengadilan hubungan industrial;
9. Melakukan pembimbingan pembentukan dan pengelolaan sarana hubungan industrial di perusahaan;
10. Melakukan pembimbingan penyusunan materi perjanjian kerja;
11. Melakukan pembimbingan penyusunan materi peraturan perusahaan;
12. Melakukan pembimbingan penerapan kebijakan pengupahan di perusahaan;
13. Melakukan pembimbingan pembentukan dan pengelolaan fasilitasi kesejahtraan pekerja atau koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif;
14. Melakukan pembimbingan penerapan dan perluasan kepesertaan jaminan sosial dan / atau penahapan kepesertaan;
15. Melakukan pembimbingan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
16. Melakukan pembimbingan mekanisme penanganan mogok kerja atau penutupan perusahaan;
17. Melakukan verifikasi keanggotaan organisasi pekerja di perusahaan;
18. Melakukan deteksi dini di perusahaan;
19. Melakukan layanan konseling teknis hubungan industrial tingkat lanjut;
20. Menyusun rumusan teknis masukan masyarakat atau instansi terkait tentang hubungan industrial tingkat menengah;
21. Melakukan pendampingan kinerja lembaga tripartit;

22. Melakukan validasi data calon anggota lembaga hubungan industrial;
23. Melakukan pengendalian unjuk rasa tingkat menengah;
24. Menyusun naskah penyebarluasan informasi hubungan industrial bagi kepentingan satuan kerja atau instansi;
25. Mereviu penyelenggaraan sarana hubungan industrial di perusahaan;
26. Mereviu penyelenggaraan program jaminan sosial;
27. Mengevaluasi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme perlindungan bipartit;
28. Mengevaluasi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial;
29. Mengevaluasi penerapan anti-deskriminasi;
30. Mengevaluasi penyelesaian mogok kerja, penutupan perusahaan, atau unjuk rasa terkait ketenagakerjaan;
31. Menyusun naskah petunjuk pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
32. Menyusun naskah petunjuk teknis pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
33. Menyusun naskah petunjuk teknis pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
34. Menyusun telaahan bidang hubungan industrial tingkat I (satu);
35. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan hak tingkat sedang;
36. Melakukan mediasi perselisihan kepentingan tingkat sedang;
37. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tingkat sedang
38. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tingkat sedang;
39. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan tingkat sedang;
40. Merumuskan kesepakatan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat sedang dalam bentuk perjanjian bersama;
41. Melakukan mediasi pencegahan mogok kerja atau penutupan perusahaan tingkat menengah;
42. Melakukan supervisi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan melalui perundingan bipartit dan tindak lanjutnya;

43. Melakukan supervisi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan melalui mediasi atau konsolidasi dan tindak lanutnya;
44. Melakukan supervisi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan melalui arbitrase dan tindak lanjutnya;
45. Melakukan supervisi hasil mediasi pencegahan mogok kerja penutupan perusahaan atau unjuk rasa dan tindak lanjutnya;
46. Melakukan supervisi dan layanan penyelesaian hak pasca kesepakatan penyelesaian mogok/unjuk rasa dan putusan arbiter / pengadilan hubungan industrial.

D. ISU-ISU STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUED*) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bias mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Pada Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 sama-sama merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja, antara lain:

1. Belum sesuainya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
2. Masih tingginya tingkat *turn over* di Perusahaan karena rendahnya etos kerja
3. Masih adanya Perusahaan yang belum menerapkan norma dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Maka isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, yakni sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja
2. Peningkatan etos kerja melalui pembentukan karakter tenaga kerja yang produktif
3. Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

a. Gambaran umum/Latar belakang
b. Landasan Hukum
c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
d. Isu-isu Strategis (*strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi
e. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

a. Ikhtisar/ringkasan Renstra/Renja
b. Perjanjian Kinerja pada Tahun yang Bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian kinerja Organisasi
   1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
   2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
   3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
   4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standart Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang berbatasan)
   5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
   6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (Berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
3) Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)
4) Keadaan Ketenagakerjaan dari BPS Kabupaten Nganjuk
5) Laporan Triwulan 1, 2, 3 dan 4
6) Bukti Dukung

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. IKHTISAR / RINGKASAN RENSTRA/RENJA

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sesuai Surat Edaran Nomor 000.8.6.3/67/411.000/2026 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 dengan uraian pada tahun 2026 ada dua dokumen perencanaan daerah yang berlaku dan dilaksanakan yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang keduanya telah ditindaklanjuti oleh seluruh Perangkat Daerah dengan menyusun rencana strategis dan rencana kerja. Pada kedua dokumen perencanaan tersebut terjadi perubahan pada tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

Pada RPD Tahun 2024-2026 terdapat tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Nganjuk Tumbuh
2. Nganjuk Sehat dan Cerdas
3. Nganjuk Akuntabel
4. Nganjuk Harmonis

Dari tujuan RPD tersebut Dinas Tenaga Kerja mengampu Tujuan yang ke-1 yaitu **"Nganjuk Tumbuh"** dengan tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dengan 5 indikator tujuan antara lain :

1) Pertumbuhan Ekonomi Daerah
2) Indeks Gini
3) Tingkat Kemiskinan Daerah
4) Tingkat Pengangguran Terbuka
5) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pada indikator tujuan tersebut Dinas Tenaga Kerja mengampu indikator tujuan yang nomor 4 yaitu ***"Tingkat Pengangguran Terbuka"***. Sedangkan sasarannya termasuk yang ke-5 yaitu "***Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja***" dengan indikator ***"Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)"***. Pada sasaran ke-5 ini menjadi rumusan tujuan dan sasaran Renstra 2024-2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk. Dari indikator sasaran tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :

- Tujuan : ***"Meningkatnya penyerapan angkatan kerja"*** dengan indikator kinerjanya "***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)"***.
- Sasaran ada 2 yaitu :
    1) Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan indikator kinerja Persentase pencari kerja terdafatar yang ditempatkan
    2) Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator kinerja Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan.

Selain perumusan tujuan dan sasaran pada RPD 2024-2026 terdapat 14 program prioritas antara lain sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
2) Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan kesejahteraan sosial
3) Peningkatan kesempatan kerja
4) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat
5) Peningkatan kualitas Pendidikan
6) Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup
7) Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah
8) Peningkatan dan Penguatan Perekonomian Daerah
9) Pengembangan Agropolitan dan food estate
10) Pelestarian Seni Budaya Lokal
11) Pemberdayaan Ekonomi Kreatif
12) Peningkatan Profesionalisme Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik

13) Menjaga stabilitas sosial politik dan kesiapsiagaan terhadap bencana

14) Percepatan Transformasi Digital

Pada 14 point program prioritas tersebut Dinas Tenaga Kerja mengampu yang nomer 3 yaitu Peningkatan Kesempatan Kerja. Pada program ini menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi, baik yang bekerja maupun yang aktif mencari pekerjaan. Peningkatan TPAK menunjukkan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam pasar kerja, yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Adapun perumusan tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (Berdasarkan Renstra 2024-2026)

	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula Perhitungan	Target
1.	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\sum \text{angkatan kerja}}{\sum \text{penduduk usia kerja}} \times 100\%$	67,50%
2	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\sum \text{pencari kerja terdaftar yang ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja terdaftar}} \times 100\%$	75%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	$\frac{\sum \text{perselisihan hubungan industrial yang selesai diluar pengadilan}}{\sum \text{perselisihan hubungan industrial tercatat}} \times 100\%$	90%

Sedangkan pada RPJMD tahun 2025-2029 mempunyai visi **"Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat"** dengan dengan 7 poin misi antara lain :

1) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban

2) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

3) Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

4) Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas

5) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal

6) Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna

7) Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal

Pada misi tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja mengampu misi ke-5 yaitu **"Meningkatkan keberpihakan Pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal."** Dengan tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, sedangkan sasaran Menurunnya pengangguran terbuka dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Dari indikator sasaran tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :

- Tujuan : ***"Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja"*** dengan indikator kinerjanya "***Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja"***.
- Sasaran ada 2 yaitu :

  1) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan indikator kinerja Persentase Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

  2) Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator kinerja Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan

Untuk perumusan tujuan pada Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain perumusan tujuan dan sasaran terdapat juga program unggulan Bupati sebanyak 15 antara lain sebagai berikut :

1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran
2) Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
3) Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
4) Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan
5) Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren
6) Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan
7) Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata
8) Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional
9) Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan
10) Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
11) Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup
12) Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk
13) Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM
14) Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta warga Nganjuk di perantauan
15) Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)

Dalam 15 program unggulan Bupati tersebut Dinas Tenaga Kerja mengampu program unggulan yang ke-3 yaitu **Pengentasan kemiskinan dan pengangguran**. Adapun program yang dilaksanakan yaitu terdapat 5 program antara lain:

- Program Perencanaan Tenaga Kerja
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Hubungan Industrial
- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Berikut penjabaran rumus tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (Berdasarkan Renstra 2025-2029)

Tujuan		Indikator Tujuan	Formula Perhitungan	Target
1.	Tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (ADHK)}}{\sum \text{tenaga kerja}}$	35,86
2	Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	$\frac{\sum \text{pencari kerja terdaftar yang ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja terdaftar}} \times 100\%$	70,11
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan (%)	$\frac{\sum \text{perselisihan hubungan industrial yang selesai diluar pengadilan}}{\sum \text{perselisihan hubungan industrial tercatat}} \times 100\%$	100

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari tujuan dan sasaran tersebut kemudian dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan diperjanjikan dalam suatu bentuk Perjanjian Kinerja pada tiap jabatan.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk telah dijabarkan dalam lampiran perjanjian kinerja tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BERDASARKAN RENSTRA 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja	Prosentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,90%
2	Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Bekerja	Persentase Pencari kerja Terdaftar yang Ditempatkan	75%
3	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Diluar Pengadilan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.611.395.697,00	DAU
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 530.472.950,00	DAU
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 1.001.100.800,00	DAU
4	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.326.033.000,00	DAU
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 31.500.000,00	DAU

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	35,86
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,11%
3	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Diluar Pengadilan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.523.555.988,00	DAU
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 2.152.216.950,00	DAU
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 658.385.800,00	DAU
4	Program Hubungan Industrial	Rp. 2.706.621.400,00	DAU
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 18.000.000,00	DAU

Dari tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Dari anggaran APBD dengan sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp. 7.500.502.447,- tersebut diatas untuk kegiatan seperti berikut ini :
  1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.611.395.697,00 untuk kegiatan rutin
  2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp. 530.472.950,00 untuk kegiatan pelatihan-pelatihan seperti berikut ini:
     a) Pelatihan Servis Sepeda Motor
     b) Pelatihan Menjahit
     c) Pelatihan Kompetensi
     d) Pelatihan Las
     e) Pelatihan Aneka Streetfood
     f) Pelatihan Memasak (TMMD)
     g) Rapat koordinasi LPKS
     h) Bimbingan teknis bagi perusahaan
  3) Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp. 1.001.100.800,00 digunakan untuk kegiatan antara lain :
     a) Bimbingan Teknis untuk Pengantar kerja
     b) Pelatihan Kompetensi
     c) Pelatihan Menjahit Untuk Disabilitas
     d) Job Fair/Bursa Kerja
     e) Pelatihan Membatik Untuk PMI Purna Penempatan

4) Program Hubungan Industrial sebesar Rp. 1.326.033.000,00 digunakan untuk kegiatan antara lain :
   a) Pembinaan norma kerja
   b) Mayday (Istighosah, sarasehan, jalan sehat)
   c) Rapat kerja anggota Dewan Pengupahan
   d) Rapat Kerja anggota LKS Tripartit
   e) Bimtek Penyelesaian perselisihan HI
   f) Pembinaan kepesertaan BPJS
   g) Sosialisasi dan pemberian bantuan iuran JKK dan JKM bagi pekerja sosial keagamaan dan pekerja rentan
   h) Pendataan hubungan industrial ke perusahaan
5) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp. 31.500.000,00 digunakan untuk kegiatan antara lain :
   a) Penjajakan ke calon lokasi penempatan transmigrasi
   b) Pemindahan dan penempatan tranmigrasi ke Taramanu Tua, kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat
   c) Pemberian bantuan yang diserahkan kepada transmigran sebesar Rp. 10.000.000,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada dasarnya akuntabilitas kinerja adalah perwujudan suatu kewajiban penyelenggaraan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dan dalam mencapai tujuan serta sasaran periode yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non keuangan (*performance indicators*) atau tingkat capaian program sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran standar pencapaian sebagai berikut:

Nilai %	Pencapaian
≥ 91	Tercapai
80 ≤ 90	Tercapai dengan catatan
< 80	Tidak tercapai

A.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pencapaian kinerja terkait dengan tujuan dan sasaran OPD pada tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1.1

REALISASI KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian (%)
1	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	RENSTRA 2024-2026	69,90%	73,19%	104,71

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian (%)
2	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	RENSTRA 2024-2026	75%	77,45%	103,27%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	RENSTRA 2024-2026	100%	100%	100%

Pada tahun 2025 terdapat tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di angka 73,19% dari target yang ditentukan sebesar 69,90% dengan capaian kinerja sebesar 104,71%. Hal ini diperoleh dari jumlah angkatan kerja sebesar 663.438 orang dibagi jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sebesar 906.468 orang. Capaian kinerja TPAK mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Nganjuk yaitu sebesar 3,4%. Sedangkan tujuan pada RPJMD 2025-2029 yaitu Tingkat produktivitas tenaga kerja yaitu sampai triwulan III tahun 2025 sebesar 46,59 juta rupiah/tenaga kerja dari target yang ditentukan sebesar 35,86 juta rupiah/tenaga kerja. Pada kedua dokumen perencanaan tersebut terdapat ketidak samaan tujuan hal ini dikarenakan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sudah ditentukan tujuan masing-masing per-urusan. Dari hasil survey angkatan kerja nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Nganjuk dapat disajikan tabel seperti berikut ini :

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja, Agustus 2023–Agustus 2025

Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025	Perubahan Ags 2024 - Ags 2025	
	orang	orang	orang	orang	persen
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	891.125	898.946	906.468	7.522	0,84
Angkatan Kerja	596.111	627.397	663.438	36.041	5,74
Bekerja	568.201	603.100	637.949	34.849	5,78
- Pengangguran	27.910	24.297	25.489	1.192	4,91
Bukan Angkatan Kerja	295.014	271.549	243.030	-28.519	-10,50
	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,68	3,87	3,84	0,03	
Laki-laki	4,59	3,80	3,62	0,19	
Perempuan	4,84	3,97	4,16	0,18	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,89	69,79	73,19	3,40	
- Laki-laki	81,91	84,35	85,95	1,59	
- Perempuan	48,86	55,22	60,43	5,21	

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan indikator persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan di angka 77,45% dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja sebesar 75% dengan capain kinerja sebesar 103,27%. Angka ini didapat dari perbandingan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 6.383 orang dengan pencari kerja terdaftar sebesar 8.241 orang. Faktor penyebab dari capain tersebut karena adanya penambahan jumlah pencari kerja terdaftar dan tidak diiringi dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Sedangkan pada RPJMD 2025-2029 dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ini merupakan kelanjutan dari tujuan RENSTRA 2024-2026.

JUMLAH PENCAKER (PENCARI KERJA) YANG DITEMPATKAN
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

No.	Bulan	Penempatan Luar Negeri		Penempatan Dalam Negeri		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Januari	4	27	34	125	190
2	Februari	9	20	3	25	57
3	Maret	6	25	118	418	567
4	April	7	23	364	386	780
5	Mei	9	22	210	405	646
6	Juni	5	49	100	157	311
7	Juli	5	24	199	632	860
8	Agustus	8	23	22	8	61
9	September	7	35	96	105	243
10	Oktober	6	26	644	1071	1747
11	Nopember	8	25	233	583	849
12	Desember	7	25	7	33	72
JUMLAH		**81**	**324**	**2030**	**3948**	**6383**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja

JUMLAH PENCAKER (PENCARI KERJA) YANG TERDAFTAR
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

No.	BULAN	PENDIDIKAN														JUMLAH	
		SD/Sederajat		SMP/Sederajat		SMA/Sederajat		SMK		DIPLOMA		Sarjana		Profesi			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Januari	1	13	2	22	50	457	42	86	3	9	7	11		1	125	619
2	Februari	1	7	10	8	7	8	13	28	0	0	1	5			33	56
3	Maret		1	2	13	69	273	43	209	1	3	2	2			135	453
4	April		1	1	6	184	242	224	212	1	1	2	3			417	467
5	Mei		4	6	13	193	217	111	212	6	14	11	95		1	407	606
6	Juni	2	6	17	17	170	189	430	306	15	29	80	158			794	700
7	Juli		6	4	13	73	188	110	231	0	1	1	5		2	188	446
8	Agustus	1	5	1	8	1	12	21	6	0	1	1	1			30	33
9	September		1	1	13	26	93	55	125	0	1	2	12			86	245
10	Oktober	8	28	12	114	80	195	183	251	4	10	9	23			296	660
11	November	1	5	3	13	29	118	83	128	7	8	11	17	1	3	134	342
12	Desember	2	2	10	27	47	208	141	267	3	9	19	34		1	312	571
	JUMLAH	17	81	77	279	931	2347	1800	2312	40	88	179	401	1	8	3035	5206

Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator kinerja persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan pada tahun 2025 sebesar 100% dari target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Pada indikator tersebut terdapat 2 Perselisihan Hubungan Industrial yang selesai diluar Pengadilan dibandingkan dengan perselisihan hubungan industrial tercatat sebanyak 2 perselisihan. Sedangkan pada RPJMD 2025-2029 pada sasaran dengan indikator ini sama atau berkelanjutan dari RENSTRA 2024-2026.

Tabel 3.1.1.2

REALISASI KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian (%)
1	Tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	RENSTRA 2025-2029	35,86 juta Rp/tenaga kerja	35,68 juta Rp/tenaga kerja	99,50%
2	Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	RENSTRA 2025-2029	70,11%	73,19%	104,28%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	RENSTRA 2025-2029	100%	100%	100%

Pada tahun 2025 terdapat tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan indikator Tingkat produktivitas tenaga kerja tahun 2025 sebesar 35,68 juta rupiah/tenaga kerja dari target yang ditentukan sebesar 35,86 juta rupiah/tenaga kerja. indikator ini diperoleh dari perbandingan PDRB tahun berjalan sebesar 22.759.590.000 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 637.949 orang. Indikator ini baru dipublikasikan pada Triwulan I tahun 2026 oleh BPS dalam dokumen Nganjuk Dalam Angka. Dari kedua indikator tujuan tersebut selaras dikarenakan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sudah ditentukan tujuan masing-masing per-urusan. Berdasarkan sumber data BPS Kabupaten Nganjuk Dalam Angka tahun 2025 sebgai berikut :



Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di angka 73,19% dari target yang ditentukan sebesar 70,11% dengan capaian kinerja sebesar 104,28%. Hal ini diperoleh dari jumlah angkatan kerja sebesar 663.438 orang dibagi jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sebesar 906.468 orang. Capaian kinerja TPAK mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Nganjuk yaitu sebesar 3,4%. Pada indikator ini merupakan kelanjutan dari tujuan dari Renstra 2024-2026 yang mempunyai target berbeda yang sedikit meningkat dari Renstra 2024-2026.

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja, Agustus 2023-Agustus 2025

Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025	Perubahan Agt 2024 - Agt 2025	
	orang	orang	orang	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	891.125	898.916	906.468	7.552	0,84
Angkatan Kerja	586.111	627.397	663.438	36.041	5,74
Bekerja	568.301	603.100	637.949	34.849	5,78
- Pengangguran	17.810	24.297	25.489	1.192	4,91
Bukan Angkatan Kerja	295.014	271.519	242.030	-29.489	-10,86
	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,68	3,87	3,84	-0,03	
Laki-laki	4,59	3,80	3,62	-0,18	
Perempuan	4,84	3,97	4,16	0,18	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,07	69,79	73,19	3,40	
Laki-laki	84,91	84,35	86,95	1,59	
Perempuan	46,86	55,27	60,43	5,21	

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator kinerja persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan pada tahun 2025 sebesar 100% dari target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Pada indikator tersebut terdapat 2 Perselisihan Hubungan Industrial yang selesai diluar Pengadilan dibandingkan dengan perselisihan hubungan industrial tercatat sebanyak 2 perselisihan. Pada Renstra 2025-2029 pada sasaran dengan indikator ini sama atau berkelanjutan dari Renstra 2024-2026.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS TENAGA KERJA

Jl. Dermojoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418

Email : dis_naker@nganjukkab.go.id, Website : Disnaker.nganjukkab.go.id

PERSENTASE PERSELISIHAN YANG TERTANGANI DI PB

Rumus :

$$\frac{2\ (Perselisihan\ yang\ terselesaikan)}{2\ (Perselisihan\ yang\ tercatat)} x100\% = 100\ \%$$

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PEKERJA	PERSELISIHAN	KETERANGAN
1.	PT PUTRA MASA DEPAN	Dwi Sumiati	Perselisihan PHK	Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama
2.	PT SUKSES ABADI INDONESIA	Budi Santoso	Perselisihan PHK	Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Nganjuk

A.2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Tabel. 3.1.2.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Dokumen Perencanaan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tujuan : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Renstra 2018-2023	4,44%	4,24%	-	-	4,74%	4,68%	-	-
2	Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Renstra 2018-2023	71,00 %	72,00 %	-	-	61,04 %	66,89 %	-	-

	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	Renstra 2018-2023	85%	80%	-	-	60%	100%	-	-
3	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Renstra 2024-2026	-	-	68,30 %	68,95 %	-	-	69,79 %	73,19 %
4	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Renstra 2024-2026	-	-	73%	75%	-	-	73,21 %	77,45 %
5	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	Renstra 2024-2026	-	-	90%	90%	-	-	100%	100%

Analisis capaian target dengan tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada Renstra 2024-2026 pada indikator ini merupakan lanjutan dari sasaran Renstra 2018-2023 sehingga

pada tahun 2022 dan tahun 2023 menggunakan Renstra 2018-2023. Target Renstra 2018-2023 pada tahun 2022 sebesar 71% sudah terealisasi sebesar 61,04%, dan tahun 2023 dengan target 72% dengan realisasi sebesar 66,89%. Sedangkan pada Renstra 2024-2026 pada indikator ini pada tahun 2024 dengan target 68,30% sudah terealisasi sebesar 69,79%, dan pada tahun 2025 dengan target 68,95% sudah terealisasi sebesar 73,19%. Untuk target dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengalami naik turun hal ini dikarenakan realisasi kinerja selama tiga tahun terakhir capaiannya naik dari tidak signifikan dari tahun ke tahun yang dirilis oleh BPS Kabupaten Nganjuk.

Analisis capaian sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan yaitu tahun 2022 dan tahun 2023 tidak ada targetnya, sedangkan pada tahun 2024 dan tahun 2025 targetnya sebesar 73% dan 75%. Hal ini dikarenakan pada Renstra 2024-2026 merupakan indikator baru dengan realisasi sebesar 73,21% pada tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar 77,45%. pada indikator ini target dan realisasi sama-sama mengalami kenaikan meski tidak signifikan. hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk terus mengupayakan penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yaitu dengan *Job canvasing* ke perusahaan, menyediakan lowongan kerja terupdate setiap hari rabu pada *channel live Tik Tok* dan media massa lainnya seperti IG dan FB.

Sedangkan analisis capaian target Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan. Pada indikator ini untuk tahun 2022 dan tahun 2023 menggunakan Renstra 2018-2023 sedangkan pada tahun 2024 dan tahun 2025 menggunakan Renstra 2024-2026. Indikator ini merupakan lanjutan dari sasaran ke-2 Renstra 2018-2023. Pada tahun 2022 dengan target 85% sudah terealisasi sebesar 60%, tahun 2023 dengan target 80% sudah terealisasi sebesar 100%. Renstra 2024-2025 pada tahun 2024 dengan terget 90% sudah terealisasi sebesar 100% dan tahun 2025 dengan target 90% sudah terealisasi sebesar 100%. Pada indikator ini jika dilihat perbandingannya mengalami turun naik. Hal ini target kinerja mengalami perubahan dikarenakan adanya capaian kinerja pada tahun sebelumnya kurang dari target yang ditetapkan, sehingga untuk meminimalisir tidak tercapainya target kinerja maka di tahun berikutnya dilakukan perubahan. Hal ini berarti Dinas Tenaga Kerja sudah semaksimal mungkin menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Tabel. 3.1.2.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Dokumen Perencanaan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Renstra 2025-2029	-	-	-	35,86 juta Rp/tk	-	-	35,84 juta Rp/tk	35,68 juta Rp/tk
2	Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Renstra 2025-2029	-	-	-	70,11 %	-	-	-	73,19 %
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	Renstra 2025-2029	-	-	-	100%	-	-	-	100%

Pada Renstra 2025-2029 terdapat tujuan dan sasaran yang berbeda dari Renstra 2024-2026. Hal ini dikarenakan untuk perumusan tujuan pada Renstra Tahun 2025-2029 berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapun tujuan tersebut adalah Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan indikator Tingkat produktivitas tenaga kerja dengan target pada tahun 2025 sebesar 35,86 juta

rupiah / tenaga kerja. sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 35,84 juta rupiah / tenaga kerja. realisasi ini sebagai baseline penentuan target pada tahun 2025. Pada tahun 2025 sudah terealisasi sebesar 35,68 juta rupiah / tenaga kerja.

Analisis capaian target pada Renstra 2025-2029 dengan sasaran 1 yaitu Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada indikator ini merupakan kelanjutan dari tujuan Renstra 2024-2026. Dimana target pada tahun 2025 sebesar 70,11% dan sudah terealisasi sebesar 73,19%.

Analisis sasaran 2 yaitu Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan pada Renstra 2025-2029 dengan target 100% sudah terealisasi sebesar 100%. Hal ini berarti Dinas Tenaga Kerja mampu menjaga keharmonisan hubungan industrial antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

A.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGI ORGANISASI

Kesesuaian antara perencanaan kinerja dengan target yang akan dicapai merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Oleh sebab itu perencanaan yang baik akan berdampak pada upaya untuk mencapai sebuah realisasi yang baik. Maka, pencapaian tersebut akan menjadi tolok ukur keberhasilan atas implementasi program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Berikut kami gambarkan Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024-2026 dengan Target yang ada dalam Renstra :

Tabel 3.1.3.1

Target Kinerja Berdasarkan Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Renstra (Tahun)						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Renstra 2024-2026	68,30%	68,95%	69,56%	-	-	-	-
2	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Renstra 2024-2026	73%	75%	77%	-	-	-	-
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	Renstra 2024-2026	90%	90%	90%	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Renstra (Tahun)						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Renstra 2025-2029	-	35,86 juta rupiah / tenaga kerja	35,88 juta rupiah / tenaga kerja	36 juta rupiah / tenaga kerja	36,12 juta rupiah / tenaga kerja	36,24 juta rupiah / tenaga kerja	36,36 juta rupiah / tenaga kerja
2	Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Renstra 2025-2029	-	70,11%	70,59%	71%	71,41%	71,82%	72,23%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	Renstra 2025-2029	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	RENSTRA 2024-2026	69,56%	73,19%	105,22%
2	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	RENSTRA 2024-2026	77%	77,45%	100,58%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	RENSTRA 2024-2026	90%	100%	111,11%

Analisis tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu Tingkat kemajuan Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target akhir Renstra. Dengan target akhir Renstra sebesar 69,56%, realisasi TPAK mencapai 73,19% maka tingkat kemajuannya sebesar 105,22% yang berarti capaian kinerja telah melewati target yang ditetapkan. Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan indikator TPAK berada pada kategori sangat maju, serta menjadi dasar yang kuat untuk menjaga keberlanjutan program dan memperkuat strategi peningkatan kualitas serta daya saing angkatan kerja pada periode perencanaan selanjutnya.

Analisis sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan yaitu ingkat kemajuan Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan menunjukkan capaian yang baik dan telah memenuhi target akhir Renstra. Dengan target akhir Renstra sebesar 77%, realisasi indikator mencapai 77,45% maka tingkat kemajuannya sebesar 100,58% yang berarti kinerja telah sedikit melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan penempatan tenaga kerja telah berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga mampu mengoptimalkan layanan kepada pencari kerja terdaftar. Realisasi yang melampaui target Renstra juga menunjukkan meningkatnya keberhasilan fasilitasi penempatan tenaga kerja serta membaiknya keterkaitan antara pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.

Analisis sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan yaitu tingkat kemajuan Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target akhir Renstra. Dengan target akhir Renstra sebesar 90%, realisasi indikator mencapai 100% maka tingkat tingkat kemajuannya 111,11%, yang berarti seluruh kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani berhasil diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan indikator ini berada pada kategori sangat maju, serta menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di wilayah kerja.

Tabel 3.1.3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	Tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Renstra 2025-2029	36,24 juta rupiah / tenaga kerja	35,68 juta rupiah / tenaga kerja	99,50%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan (%)
2	Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Renstra 2025-2029	72,23%	73,19%	101,33%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	Renstra 2025-2029	100%	100%	100%

Analisis tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan indikator Tingkat produktivitas tenaga kerja yaitu tingkat kemajuan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target akhir Renstra. Dengan target akhir Renstra sebesar 36,24 juta rupiah per tenaga kerja, realisasi produktivitas tenaga kerja mencapai 35,68 juta rupiah per tenaga kerja, yang berarti capaian kinerja hampir melebihi target yang ditetapkan yaitu tingkat kemajuannya sebesar 99,50%. Dengan capaian yang signifikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja berada pada kategori maju, serta menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan dan mengembangkan strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja secara berkelanjutan

Analisis sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu Tingkat kemajuan Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target akhir Renstra. Dengan target akhir Renstra sebesar 72,23%, realisasi TPAK mencapai 73,19% maka tingkat kemajuannya sebesar 101,33%, yang berarti capaian kinerja telah melewati target yang ditetapkan. Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan indikator TPAK berada pada kategori sangat maju, serta menjadi dasar yang kuat untuk menjaga keberlanjutan program dan memperkuat strategi peningkatan kualitas serta daya saing angkatan kerja.

Analisis sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan yaitu menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target akhir Renstra. Dengan target akhir Renstra sebesar 100%, realisasi indikator mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara nonlitigasi, serta menunjukkan meningkatnya peran mediator hubungan industrial dan koordinasi yang baik antara para pihak terkait.

A.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL (MINIMAL DENGAN REGIONAL / PROVINSI / KABUPATEN YANG BERBATASAN)

Tabel 3.1.4.1

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

DENGAN STANDAR NASIONAL (berdasarkan RENSTRA 2024-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional / Provinsi	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Posisi Kinerja
1	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,59%	73,19%	Diatas
2	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	89,52%	77,45%	Dibawah
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	100%	100%	Setara

Analisis perbandingan realisasi kinerja tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Data TPAK yang diambil dari data BPS RI menunjukkan angka TPAK sebesar 70,59%. Sedangkan data TPAK BPS Kabupaten Nganjuk sebesar 73,19%. Data BPS RI ini diperoleh dari perbandingan angkatan kerja sebesar 154,00 juta orang dengan penduduk usia kerja

sebesar 218,17 juta orang. Sedangkan data dari BPS Kabupaten Nganjuk sebesar 663.438 orang angkatan kerja dan penduduk usia kerja sebanyak 906.468 orang. Ini berarti bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Nganjuk lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Kabupaten Nganjuk memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih baik, menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja di Kabupaten Nganjuk yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Upaya yang akan dilakukan pemerintah yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki infrastruktur dan aksesibilitas untuk memudahkan masyarakat mengakses lapangan kerja dan kesempatan ekonomi.

Analisis perbandingan sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Data dengan indikator ini diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang dengan angka pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 4.236 orang dan pencari kerja terdaftar sebanyak 4.732 orang maka besaran persentasenya 89,52%. Di Kabupaten Nganjuk angka persentasenya sebesar 77,45%. Jika persentasenya dibandingkan dengan Kabupaten Nganjuk yaitu masih dibawah Kabupaten Jombang. Hal ini menjadi catatan Dinas Tenaga Kerja untuk tahun depan supaya lebih meningkatkan kegiatan penempatan tenaga kerja.

Analisis perbandingan sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan antara data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun sebesar 100% dengan data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sebesar 100%. Data Dari Kabupaten Madiun ini diperoleh dari perbandingan antara perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan Perjanjian Bersama 14 perkara dengan perselisihan yang tercatat sebesar 14 perkara. Sedangkan di Kabupaten Nganjuk perselisihan yang tercata sebanyak 2 perkara dan selesai dengan Perjanjian Bersama sebanyak 2 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kabupaten telah berhasil menyelesaikan semua perselisihan HI dengan efektif dan efisien melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase.

Tabel 3.1.4.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standart Nasional

(Berdasarkan Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional / Provinsi	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Posisi Kinerja
1	Tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	85,67 juta rupiah/tenaga kerja	35,68 juta rupiah/tenaga kerja	Dibawah
2	Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,59%	73,19%	Diatas
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	100%	100%	Setara

Analisis perbandingan realisasi kinerja tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan indikator tingkat produktivitas tenaga kerja. Data tingkat produktivitas Provinsi Jawa Timur tahun 2025 menunjukkan angka 85,67 juta rupiah/tenaga kerja. angka ini diperoleh dari nilai PDRB harga konstan sebesar 2.038.961.630.000.000 dibagi jumlah tenaga kerja sebesar 23.800.000 orang. Sedangkan tingkat produktivitas tenaga kerja kabupaten Nganjuk sebesar 35,68 juta rupiah/tenaga kerja. Hal ini berarti posisi kinerjanya masih dibawah produktivitas provinsi.

Analisis perbandingan realisasi sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Data TPAK yang diambil dari data BPS RI menunjukkan angka TPAK sebesar 70,59%. Sedangkan data TPAK BPS Kabupaten Nganjuk sebesar 73,19%. Data BPS RI ini diperoleh dari perbandingan angkatan kerja sebesar 154,00 juta orang dengan penduduk usia kerja

sebesar 218,17 juta orang. Sedangkan data dari BPS Kabupaten Nganjuk sebesar 663.438 orang angkatan kerja dan penduduk usia kerja sebanyak 906.468 orang. Ini berarti bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Nganjuk lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Kabupaten Nganjuk memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih baik, menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja di Kabupaten Nganjuk yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Upaya yang akan dilakukan pemerintah yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki infrastruktur dan aksesibilitas untuk memudahkan masyarakat mengakses lapangan kerja dan kesempatan ekonomi.

Analisis perbandingan sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan antara data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun sebesar 100% dengan data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sebesar 100%. Data Dari Kabupaten Madiun ini diperoleh dari perbandingan antara perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan Perjanjian Bersama 14 perkara dengan perselisihan yang tercatat sebesar 14 perkara. Sedangkan di Kabupaten Nganjuk perselisihan yang tercata sebanyak 2 perkara dan selesai dengan Perjanjian Bersama sebanyak 2 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kabupaten telah berhasil menyelesaikan semua perselisihan HI dengan efektif dan efisien melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase.

A.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1.5.1

ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung / Penghambat	Alternatif Solusi
1	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Renstra 2024-2026	69,90%	73,19%	104,71%	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program-program pelatihan dan peningkatan keterampilan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan angkatan kerja	-
2	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Renstra 2024-2026	75%	77,45%	103,27%	Layanan penempatan kerja semakin efektif dalam membantu pencari kerja menemukan pekerjaan yaitu dengan aktif melakukan publikasi informasi lowongan kerja via Tiktok setiap hari Rabu, IG dan FB disnaker	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung / Penghambat	Alternatif Solusi
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	Renstra 2024-2026	100%	100%	100%	Memaksimalkan peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan, sehingga permasalahan yang muncul bisa terselesaikan dengan baik di tahapan Bipartit. Pun juga hal tersebut tidak terlepas dari peranan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Nganjuk bersama stakeholder ketenagakerjaan yang lain dari unsur Pengusaha maupun Pekerja dalam menciptakan situasi hubungan kerja yang minim kerawanan hubungan industrial.	-

Analisis ketercapaian Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2025 dari hasil survey angkatan kerja nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Nganjuk dengan capaian kinerja sebesar 104,71% dari target 69,90% dan sudah terealisasi sebesar 73,19%. Hal ini bisa dikatakan tercapai sangat tinggi. Faktor keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas atau angkatan kerja di Nganjuk pada Agustus 2025 sebesar 906,47 ribu orang. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Nganjuk. Sebanyak 663,44 ribu orang atau sekitar 73,19%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2025 sebesar 73,19%. Pada Agustus 2025, TPAK laki-laki sebesar 85,95%, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 60,43%. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan TPAK, seperti program pelatihan kerja, peningkatan akses ke pendidikan, dan pengembangan infrastruktur. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian.

Analisis ketercapaian Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Pada tahun 2025 ditargetkan 75% dan terealisasi 77,45%. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,27%. Hasil tersebut di dapat dari perbandingan antara Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2025 sebanyak 6.383 orang dengan pencari kerja terdaftar sebanyak 8.241 orang. Dari data tersebut bisa dikatakan tercapai tinggi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa layanan penempatan kerja semakin efektif dalam membantu pencari kerja menemukan pekerjaan.

Analisis ketercapaian Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator kinerja Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan. Dari Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja pada tahun 2025 telah menetapkan targetnya sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tercapai sangat tinggi. Dinas Tenaga Kerja telah mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan memaksimalkan peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan, sehingga permasalahan yang muncul bisa terselesaikan dengan baik di tahapan Bipartit. Pun

juga hal tersebut tidak terlepas dari peranan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Nganjuk bersama stakeholder ketenagakerjaan yang lain dari unsur Pengusaha maupun Pekerja dalam menciptakan situasi hubungan kerja yang minim kerawanan hubungan industrial.

Tabel 3.1.5.2

ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung / Penghambat	Alternatif Solusi
1	Tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Renstra 2025-2029	35,86 juta rupiah/tenaga kerja	35,68 juta rupiah/tenaga kerja	99,50%	Kualitas sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan memiliki etos kerja yang baik. Tenaga kerja yang didukung oleh tingkat pendidikan memadai, pelatihan berkelanjutan, serta sertifikasi kompetensi mampu bekerja secara lebih efektif dan efisien	-
2	Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Renstra 2025-2029	70,11%	73,19%	104,39%	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program-program pelatihan dan peningkatan keterampilan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan angkatan kerja	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung / Penghambat	Alternatif Solusi
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	Renstra 2025-2029	100%	100%	100%	Memaksimalkan peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan, sehingga permasalahan yang muncul bisa terselesaikan dengan baik di tahapan Bipartit. Pun juga hal tersebut tidak terlepas dari peranan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Nganjuk bersama stakeholder ketenagakerjaan yang lain dari unsur Pengusaha maupun Pekerja dalam menciptakan situasi hubungan kerja yang minim keributan hubungan industrial.	-

Analisis ketercapaian Tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan indikator Tingkat produktivitas tenaga kerja. pada Tahun 2025 dengan target 35,86 juta rupiah/tenaga kerja dan sudah terealisasi sebesar 35,68 juta rupiah/tenaga kerja, sedangkan untuk nilai akhir tahun 2025 pada indikator ini belum dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Nganjuk. Hal ini dikarenakan nilai PDRB tahun berjalan akan dipublikasikan pada tahun 2026. Nilai ini diperoleh dari formula perbandingan PDRB tahun berjalan sebesar 22.759.590.000 rupiah dengan jumlah tenaga kerja sebesar 637.949 orang. Adapun tingkat capaiannya sebesar 99,50%. Hal ini bisa dikatakan tercapai. Faktor pendukungnya yaitu kualitas sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan memiliki etos kerja yang baik. Tenaga kerja yang didukung oleh tingkat pendidikan memadai, pelatihan berkelanjutan, serta sertifikasi kompetensi mampu bekerja secara lebih efektif dan efisien. Solusi yang akan dilakukan yaitu optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses kerja perlu terus didorong guna meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil kerja. Pemerintah juga berperan strategis melalui kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kompetensi, perlindungan ketenagakerjaan, serta perluasan kesempatan kerja.

Analisis ketercapaian Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2025 dari hasil survey angkatan kerja nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Nganjuk dengan capaian kinerja sebesar 104,39% dengan terget 70,11% dan sudah terealisasi sebesar 73,19%. Hal ini bisa dikatakan tercapai sangat tinggi. Faktor keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas atau angkatan kerja di Nganjuk pada Agustus 2025 sebesar 906,47 ribu orang. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Nganjuk. Sebanyak 663,44 ribu orang atau sekitar 73,19%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2025 sebesar 73,19%. Pada Agustus 2025, TPAK laki-laki sebesar 85,95%, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 60,43%. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan TPAK, seperti program pelatihan kerja, peningkatan akses ke pendidikan, dan pengembangan infrastruktur. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian.

Analisis ketercapaian Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator kinerja Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan. Dari Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja pada tahun 2025 telah menetapkan targetnya sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tercapai sangat tinggi. Dinas Tenaga Kerja telah mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan memaksimalkan peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan, sehingga permasalahan yang muncul bisa terselesaikan dengan baik di tahapan Bipartit. Pun juga hal tersebut tidak terlepas dari peranan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Nganjuk bersama stakeholder ketenagakerjaan yang lain dari unsur Pengusaha maupun Pekerja dalam menciptakan situasi hubungan kerja yang minim kerawanan hubungan industrial.

A.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.1.6.1

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Renstra 2024-2026	104,71	91,94	12,77
2	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Renstra 2024-2026	103,27	98,90	4,37
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	Renstra 2024-2026	100	97,26	2,74

Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber dana tahun 2025 sebagaimana tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Analisis tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat efisiensi pencapaian Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat dinilai sangat baik dan efisien, karena realisasi kinerja mencapai 103,71% sementara realisasi anggaran hanya sebesar 91,94%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja tidak hanya tercapai, tetapi melampaui target yang ditetapkan, dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang direncanakan. maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi kinerja Persentase TPAK berada pada kategori sangat efisien, serta menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan anggaran untuk menghasilkan dampak kinerja yang maksimal.

Pada sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dengan indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Tingkat efisiensi pencapaian Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dapat dinilai efisien, karena realisasi kinerja mencapai 103,27%, sementara realisasi anggaran sebesar 98,90%. apaian ini menunjukkan bahwa target kinerja berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan penggunaan anggaran yang hampir sesuai namun tetap berada di bawah pagu anggaran. Dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan berada pada kategori efisien.

Pada sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan. Tingkat efisiensi pencapaian Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan dapat dinilai sangat efisien, karena realisasi kinerja mencapai 100%, sementara realisasi anggaran sebesar 97,26%. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial tidak hanya memenuhi target, tetapi melampaui target secara signifikan, dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan. Dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi indikator Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan berada pada kategori sangat efisien, serta mencerminkan pengelolaan anggaran dan kinerja yang optimal dalam mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Tabel 3.1.6.2

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Renstra 2025-2029	99,50	91,94	7,56
2	Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Renstra 2025-2029	104,39	98,90	5,49
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	Renstra 2025-2029	100	97,26	2,72

Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber dana tahun 2025 sebagaimana tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Analisis tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan indikator Tingkat produktivitas tenaga kerja. Tingkat efisiensi pencapaian Tingkat produktivitas tenaga kerja dapat dinilai sangat baik dan efisien, karena realisasi kinerja mencapai 99,50% sementara realisasi anggaran hanya sebesar 91,94%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja tidak hanya tercapai, tetapi melampaui target yang ditetapkan, dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang direncanakan. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi kinerja Tingkat produktivitas tenaga kerja berada pada kategori efisien, serta menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan anggaran untuk menghasilkan dampak kinerja yang maksimal.

Pada sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat efisiensi pencapaian Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat dinilai sangat baik dan efisien, karena realisasi kinerja mencapai 103,39% sementara realisasi anggaran hanya sebesar 91,94%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja tidak hanya tercapai, tetapi melampaui target yang ditetapkan, dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang direncanakan. maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi kinerja Persentase TPAK berada pada kategori sangat efisien, serta menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan anggaran untuk menghasilkan dampak kinerja yang maksimal.

Pada sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan. Tingkat efisiensi pencapaian Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan dapat dinilai sangat efisien, karena realisasi kinerja mencapai 100%, sementara realisasi anggaran sebesar 97,26%. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak hanya memenuhi target, tetapi melampaui target secara signifikan, dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan. Dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi indikator Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan berada pada kategori efisien, serta mencerminkan pengelolaan anggaran dan kinerja yang optimal dalam mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

A.7. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1.7

PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Renstra 2024-2026			69,90 %	73,19%	104,71%
2	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Renstra 2024-2026			75%	77,45%	103,27%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	Renstra 2024-2026			100%	100%	100%
4	Tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Renstra 2025-2029			35,86 juta Rp/tenaga kerja	35,68 juta Rp/tenaga kerja	99,50%
5	Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Renstra 2025-2029			70,11%	73,19%	104,39%
6	Sasaran 2 : Meningkatnya	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang	Renstra 2025-2029			100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	hubungan industrial yang harmonis	Diselesaikan di Luar Pengadilan						
7			Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	76 nilai	75,20 nilai	98,95%
8			Renstra 2024-2026	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	26 dokumen	26 dokumen	100%
9			Renstra 2024-2026	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7 laporan	100%
10			Renstra 2024-2026	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	6 dokumen	100%
11			Renstra 2024-2026	Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun	48 dokumen	48 dokumen	100%
12			Renstra 2024-2026	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	14 orang	77,77%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
13			Renstra 2024-2026	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	100%
14			Renstra 2024-2026	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
15			Renstra 2024-2026	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
16			Renstra 2024-2026	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
17			Renstra 2024-2026	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
18			Renstra 2024-2026	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	100%
19			Renstra 2024-2026	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
20			Renstra 2024-2026	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
21			Renstra 2024-2026	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	97 unit	97 unit	100%
22			Renstra 2024-2026	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	150 unit	150 unit	100%
23			Renstra 2024-2026	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 unit	35 unit	100%
24			Renstra 2024-2026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 unit	12 unit	100%
25			Renstra 2024-2026	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	14 laporan	14 laporan	100%
26			Renstra 2024-2026	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dokumen	1 dokumen	100%
27			Renstra 2024-2026	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
28			Renstra 2024-2026	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
29			Renstra 2024-2026	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara	28 unit	28 unit	100%
30			Renstra 2024-2026	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	100%
31			Renstra 2024-2026	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100%
32			Renstra 2024-2026	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	100%
33			Renstra 2024-2026	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	3 unit	100%
34			Renstra 2024-2026	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	100%
35			Renstra 2024-2026	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan	15%	6,67%	44,49%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
36			Renstra 2024-2026		Jumlah pencari kerja terdaftar yang bertransformasi menjadi tenaga kerja mandiri	200 orang	489 orang	244,5%
37			Renstra 2025-2029		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	52,80%	46,47%	88,02%
38			Renstra 2024-2026	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja terdaftar yang terlatih	440 orang	550 orang	125%
39			Renstra 2024-2026		Jumlah tenaga kerja mandiri yang kompeten	275 orang	489 orang	124,74%
40			Renstra 2024-2026		Jumlah tenaga kerja mandiri yang mendapat NIB	2 orang	13 orang	650%
41			Renstra 2024-2026		Jumlah tenaga kerja mandiri terakses permodalan	5 orang	0 orang	0%
42			Renstra 2024-2026	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	140 orang	550 orang	392,86%
43			Renstra 2024-2026	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi	3 lembaga	7 Lembaga	233,33%
44			Renstra 2024-2026	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	45 lembaga	45 Lembaga	100%
45			Renstra 2024-2026	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas	11%	16,46%	149,64%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
46			Renstra 2024-2026	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas	15 perusahaan	13 Perusahaan	86,67%
47			Renstra 2024-2026	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	96,41%	96,16%	99,74%
48			Renstra 2025-2029		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	75%	77,45%	103,27%
49			Renstra 2024-2026	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan penempatan kerja	87%	0,49%	0,56%
50			Renstra 2024-2026	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	50 orang	50 orang	100%
51			Renstra 2024-2026	Pelayanan antar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	60 orang	40 orang	66,67%
52			Renstra 2024-2026	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	40 orang	20 orang	50%
53			Renstra 2024-2026	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase cakupan penyebarluasan informasi pasar kerja	85%	13,09%	15,40%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
54			Renstra 2024-2026	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1.000 orang	675 orang	67,50%
55			Renstra 2024-2026	Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan yang terfasilitasi) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (pra dan purna penempatan yang terfasilitasi) yang terfasilitasi	85%	100%	117,65%
56			Renstra 2024-2026	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna penempatan	Jumlah PM/purna yang diberdayakan	20 orang	20 orang	100%
57			Renstra 2024-2026	Program Hubungan Industrial	Persentase angka sengketa perusahaan pertahun	2,3%	0,8%	111,11%
58			Renstra 2024-2026		Persentase PP/PKB yang memuat syarat kerja	100%	100%	100%
59			Renstra 2025-2029		Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan Perjanjian Bersama (PB)	90,1%	100%	110,99%
60			Renstra 2025-2029		Cakupan Kepertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaaan	27,46%	28,30%	103,06%
61			Renstra 2025-2029		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	55%	60,34%	109,71%
62			Renstra 2024-2026	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	Jumlah Perusahaan yang memiliki LKS Bipartit Aktif	100 Perusahaan	26 Perusahaan	26%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
				beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
63			Renstra 2024-2026		Jumlah Perusahaan yang memiliki PP / PKB	9 Perusahaan	17 Perusahaan	188,89%
64			Renstra 2024-2026		Persentase Tenaga Kerja yang memiliki jaminan perlindungan	85%	81,19%	95,52%
65			Renstra 2024-2026	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	45 Perusahaan	15 Perusahaan	33,33%
66			Renstra 2024-2026	Perjanjian kerja bersama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun PKB	45 Perusahaan	0	0
67			Renstra 2024-2026	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1 Laporan	25 Laporan	2500%
68			Renstra 2024-2026	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan yang tertangani di PB	90%	100%	111,11%
69			Renstra 2024-2026	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	10 Perkara	200%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
				Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
70			Renstra 2024-2026	Penyelesaian Perselisiajn Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan	4 perkara	2 Perkara	500
71			Renstra 2024-2026	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Pemberdayaan LKS Tripartit))	1 Lembaga	1 Lembaga	100
72			Renstra 2024-2026	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	15.700 orang	20.420 orang	130,06%
73			Renstra 2024-2026	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	7%	9,09%	129,86%
74			Renstra 2025-2029		Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	9%	9,09%	101%
75			Renstra 2024-2026	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	7%	9,09%	129,86%
76			Renstra 2024-2026	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	2 KK	1 KK	50%

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja pada Renstra 2024-2026 ada 4 (empat) program kegiatan yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdapat 2 indikator kinerja antara lain :
   a) Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan dengan target 15% sudah terealisasi sebesar 6,67%. Adapun faktor penyebabnya yaitu belum optimalnya komposisi anggaran pelatihan dibandinngkan dengan jumlah pencari kerja, sehingga tindak lanjutnya yaitu meningkatkan besaran anggaran pelatihan.
   b) Jumlah pencari kerja terdaftar yang bertransformasi menjadi tenaga kerja mandiri dengan target 200 orang sudah terealisasi sebesar 489 orang. Adapun faktor penyebabnya yaitu meningkatnya motivasi peserta pasca pelatihan untuk menjadi tenaga kerja mandiri secara ekonomi, sehingga dibutuhkan tindak lanjut yaitu optimalisasi pendampingan peserta pelatihan selama maupun pasca pelatihan.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator persentase Tingkat kesempatan kerja dengan target 96,41% sudah terealisasi sebesar 96,16%. Adapun faktor penyebabnya yaitu terbatasnya kesempatan kerja dengan tindak lanjutnya yaitu optimalisasi kesempatan kerja melalui *job canvassing* maupun job fair
3. Program hubungan industrial dengan 2 indikatornya yaitu :
   a) Persentase Angka Sengketa perusahaan pertahun dengan target 2,3% sudah terealisasi 0,86% sehingga capaiannya sebesar 37,39%. Adapun faktor penyebabnya yaitu Para Pihak mempunyai persepsi yang sama untuk mencapai kesepakatan, dan tindak lanjutnya yaitu mengoptimalkan peranan mediator hubungan industrial dalam menyelesaikan perselisihan.
   b) Persentase PP /PKB yang memuat syarat kerja dengan target 100% sudah terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Adapun faktor penyebabnya yaitu PP / PKB memuat syarat kerja, dan tindak lanjutnya yaitu memverifikasi klausula syarat kerja di PP / PKB

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja pada Renstra 2025-2029 ada 4 (empat) program kegiatan yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dengan target 52,8% dan terealisasi sebesar 46,47% dan capaian kinerja 88,01%. Meskipun capaian kinerja sudah mencapai 88,01% tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ada faktor penyebab dan tindak lanjut. Adapun faktor penyebab yaitu sebagian besar Perusahaan khususnya di sektor industri padat karya tidak membutuhkan sertifikat kompetensi terutama bagi tenaga kerja operator produksi, Perusahaan lebih menitikberatkan pada capaian target

produksi sehingga tenaga kerja yang mampu mencapai target dianggap telah kompeten terlepas tenaga kerja mempunyai atau tidak mempunyai sertifikasi. Sedangkan tindak lanjutnya yaitu Mendorong perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya dengan mengikutsertakan pada pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten dengan target 75% sudah terealisasi sebesar 77,45% dan capaian kinerjanya sebesar 103,27%. Adapun faktor penyebab yaitu meningkatnya kesempatan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. Tindak lanjutnya yaitu optimalisasi kesempatan kerja dengan mempersiapkan calon tenaga kerja yang kompeten
3. Program hubungan industrial dengan 3 indikatornya yaitu :
   a) Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan Perjanjian Bersama (PB) dengan target 90,1% dan sudah terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 110,99%. Adapun faktor penyebab para pihak mempunyai persepsi yang sama untuk mencapai kesepakatan, sedangkan tindak lanjutnya yaitu mengoptimalkan peranan mediator hubungan industrial dalam menyelesaikan perselisihan.
   b) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan target 27,46% sudah realisasi sebesar 28,30% sehingga capaiannya sebesar 103,06%. Adapun faktor penyebabnya meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, sedangkan tindak lanjutnya optimalisasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan baik untuk pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah.
   c) Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dengan target 55% sudah terealisasi sebesar 60,34% sehingga capaian kinerjanya sebesar 109,71%. Faktor penyebab meningkatnya pemahaman perusahaan terkait pemenuhan norma dan syarat kerja, dan tindak lanjutnya yaitu optimalisasi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap norma dan syarat kerja.
      - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan dengan target 9% sudah terealisasi sebesar 9,09%. sehingga capaian kinerjanya sebesar 101%. Adapun calon transmigran terdaftar sebanyak 11 orang sedangkan yang diberangkatkan hanya 1 KK dengan tujuan di Taramanu Tua, kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat transmigrasi di UPT. Saluandean Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.2
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
2	07	01	2.01		PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.523.555.988	3.819.605.663,77	703.950.324,23	84,43	- Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog - Terdapat jabatan administrasi yang kosong yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris	- Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar - Menunggu pengisian jabatan yang kosong dari BKPSDM
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.732.000	13.704.000	2.028.000	87,10	Jumlah hari dalam laporan lembur pegawai yang dibutuhkan lebih sedikit dari yang direncanakan	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan lembur pegawai supaya lebih teliti lagi
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.224.000	8.214.000	10.000	99,87	Jumlah hari dalam laporan lembur pegawai yang dibutuhkan lebih	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan lembur supaya lebih teliti

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
										sedikit dari yang direncanakan	
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.508.000	5.490.000	2.018.000	73,12		
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja	2.840.001.000	2.167.619.301	672.381.699	76,32	Terdapat jabatan administrasi yang kosong yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris	Menunggu pengisian jabatan dari BKPSDM
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.840.001.000	2.167.619.301	672.381.699	76,32	Terdapat jabatan administrasi yang kosong yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris	Menunggu pengisian jabatan dari BKPSDM
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja	305.277.788	295.205.369	10.072.419	96,70	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.108.650	4.953.000	155.650	96,95	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.750.978	63.440.035	310.943	99,51	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
											dengan harga pasar
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	9.219.160	9.167.400	51.760	99,43	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	3.000.000	0	100	Tidak ada kendaran	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.000.000	13.966.900	33.100	99,76	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Disesuaikan dengan kegiatan fasilitasi rapat SKPD sebagaimana permenkeu No 49 tahun 2023 tentang satuan biaya masukan tahun 2024 bahwa makanan dan minuman rapat dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya kementeri an/lembaga

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
											lainnya/ instansi pemerintah /pihak lain.
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.199.000	186.778.034	9.420.966	95,19	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.000.000	13.900.000	100.000	99,28	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	496.566.800	484.113.010	12.453.790	97,49	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	38.382.300	37.462.500	919.800.000	97,60	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	444.878.850	434.502.510	10.376.340	97,66	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.305.650	12.148.000	1.157.650	91,29	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.854.000	486.952.618	1.901.381,81	99,61	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	2.390.000	2.390.000	0	100	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	65.000.000	64.841.000	158.700	99,75	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanaan

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
										barang dan jasa melalui e-katalog	harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.464.000	419.721.318,19	1.742.681,81	99,58	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	377.124.400	372.011.365,56	5.113.034,42	98,64	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	48.650.000	48.610.578	39.422	99,91	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.624.000	93.836.068	4.788.332	95,14	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	0	100		
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	10.150.000	10.123.100	26.900	99,73	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	209.700.000	209.493.619,58	206.380,42	99,90	Adanya mekenisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	7.000.000	6.948.000	52.000	99,25	Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog	Untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar
2	07				Urusan Bidang Tenaga Kerja						
2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.152.216.950	2.137.258.166	14.958.784	99,30	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan tidak hadirnya narasumber eksternal di beberapa kegiatan	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	2.047.219.950	2.036.032.916	11.187.034	99,45	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan tidak hadirnya narasumber eksternal di beberapa kegiatan	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	2.047.219.950	2.036.032.916	11.187.034	99,45	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan tidak hadirnya narasumber eksternal di beberapa kegiatan	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	75.050.000	71.827.250	3.222.750	95,70	Efisiensi kegiatan rapat koordinasi sehingga anggaran tidak terserap	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	75.050.000	71.827.250	3.222.750	95,70	Efisiensi kegiatan rapat koordinasi sehingga anggaran tidak terserap	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	29.947.000	29.398.000	549.000	98,16	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan tidak semua narasumber hadir	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	29.947.000	29.398.000	549.000	98,16	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan tidak semua narasumber hadir	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	658.385.800	641.254.745	17.131.055	97,39	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan efisiensi narasumber	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten Kota	397.852.800	382.675.800	15.177.000	96,18	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan efisiensi narasumber	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	45.975.000	42.982.000	2.993.000	93,48	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan efisiensi narasumber	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	286.916.000	283.586.000	3.330.000	98,83		
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	64.961.800	56.107.800	8.854.000	86,37	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
											anggaran selanjutnya
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	179.125.000	177.439.945	1.685.055	99,05	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan tidak semua narasumber hadir	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	179.125.000	177.439.945	1.685.055	99,05	Adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan tidak semua narasumber hadir	Dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)di Daerah Kabupaten/Kota	81.408.000	81.139.000	269.000	99,66		
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	81.408.000	81.139.000	269.000	99,66		
2	07	05			Program Hubungan Industrial	2.706.621.400	2.623.491.235	74.130.165	96,92	Dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan dan terdapat kegiatan yang narasumbernya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk	Rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.130.000	16.617.000	2.513.000	86,86	Dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan	Rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	19.130.000	16.617.000	2.513.000	86,86	Dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan	Rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.687.491.400	2.615.874.235	71.617.165	97,33	Dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan dan terdapat kegiatan yang narasumbernya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk	Rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	205.571.600	195.318.600	10.253.000	95,01	Dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan dan terdapat kegiatan yang narasumbernya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk	Rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
					Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.723.000	26.323.000	4.400.000	85,67	Dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan dan terdapat kegiatan yang narasumbernya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk	Rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian
2	07	05	2.02	0001	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	80.209.000	80.209.000	0	100	Dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan	Rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	2.370.987.800	2.314.023.635	56.964.165	97,59	Dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan dan realisasi jumlah penerima bantuan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan	Rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian
3					Urusan Pemerintahan Pilihan	18.000.000	18.000.000	0	100		
3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	18.000.000	18.000.000	0	100		

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor Penyebab	Upaya yang dilakukan
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	18.000.000	18.000.000	0	100	Kegiatan sudah terlaksana tetapi penyerapan anggaran sudah jadi satu dengan subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Untuk tahun yang akan datang supaya kegiatan disesuaikan dengan output
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000	18.000.000	0	100	Kegiatan sudah terlaksana tetapi penyerapan anggaran sudah jadi satu dengan subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Untuk tahun yang akan datang supaya kegiatan disesuaikan dengan output
3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000	18.000.000	0	100	Kegiatan penjajakan sudah terlaksana tetapi penyerapan anggaran sudah jadi satu dengan subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Untuk tahun yang akan datang supaya kegiatan disesuaikan dengan output
TOTAL						**10.058.780.138**	**9.248.609.809,77**	**810.170.328,23**	**91,94**		

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dana yang telah dialokasikan serta target pendapatan yang telah dibebankan pada masing-masing satuan kerja.

Pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025 sebesar Rp. 8.733.472.457,- seiring berjalannya waktu terjadi perubahan APBD sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 10.058.780.138,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.248.609.809,77,- dengan kata lain besaran penyerapan anggaran sebesar 91,94%. Adapun faktor penyebab tidak tercapai 100% tersebut dikarenakan kekosongan jabatan Administrator yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas. Sehingga upaya yang dilakukan adalah menunggu pengisian jabatan dari BKPSDM Kabupaten Nganjuk. Yang mana anggaran tersebut dipergunakan sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota besaran pagu atau yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebesar Rp. 4.408.911.957,- dan terjadi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp. 114.644.031,- sehingga anggarannya menjadi Rp.4.523.555.988,- sudah terealisasi sebesar Rp.3.819.605.663,77,- dan persentase penyerapan anggaran sebesar 84,43%. Kegiatan program tersebut untuk mendukung nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dengan nilai 75,65. Adapun faktor penyebab tidak tercapai 100% dikarenakan adanya jabatan administrator yang masih kosong dan Adanya mekanisme penawaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Untuk itu upaya yang akan dilakukan adalah menunggu pengisian jabatan yang kosong dari BKPSDM dan untuk tahun yang akan datang dalam merencanakan harga barang dan jasa disesuaikan dengan harga pasar.

b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja besaran pagu atau yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebesar Rp. 1.977.642.900,-. Kemudian seiring perjalanan waktu terjadi perubahan APBD I sebesar dari sumber dana DBHCHT sebesar 1.954.574.050,- sehingga anggarannya menjadi Rp. 2.152.216.950,- sudah terealisasi sebesar Rp. 2.137.258.166,- dan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,30%. Faktor penyebab tidak terserap 100% dikarenakan Adanya efisiensi harga pada e katalog dan tidak hadirnya narasumber eksternal di beberapa kegiatan. Sedangkan upaya yang akan dilakukan adalah dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pelatihan antara lain :

- Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan unit Kompetensi yaitu :
  1) Pelatihan Barbershop
  2) Pelatihan Menjahit
  3) Pelatihan Aneka Steetfood

4) Pelatihan Las
5) Pelatihan Servis Sepeda Motor
6) Pelatihan Memasak (TMMD)
7) Pelatihan Berbasis Kompetensi di 3 Perusahaan

- Pelaksanaan bimbingan teknis dan rapat koordinasi bagi LPK Swasta
- Pelaksanaan bimbingan teknis bagi Perusahaan kecil

c) Program Penempatan Tenaga Kerja besaran pagu atau yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebesar Rp. 658.385.800,-. Sudah terealisasi sebesar Rp. 641.254.745,- dengan persentase serapan anggaran sebesar 98,40%. Faktor penyebab tidak terserapnya anggaran 97,39% yaitu adanya proses negosiasi dalam pengadaan dan efisiensi narasumber. Upaya yang akan dilakukan yaitu dilakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk tahun anggaran selanjutnya. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Pelayanan antar kerja Pelaksanaan bimbingan teknis Petugas Antar Kerja
- Pelatihan Kompetensi
- Pelatihan menjahit bagi penyandang disabilitas
- Pelaksanaan kegiatan Job Fair/Bursa Kerja Khusus

e. Program Hubungan Industrial besaran pagu atau yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebesar Rp. 1.660.531.800,-. Seiring waktu telah terjadi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dari sumber dana DAU sebesar Rp. 559.925.200,- sehingga anggarannya menjadi Rp. 1.046.089.600,- sudah terealisasi sebesar Rp. 2.632.491.235,- dan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,26%. Faktor penyebab tidak terserap anggaran 100% dikarenakan adanya negosiasi dari pihak pengadaan dan terdapat kegiatan yang narasumbernya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk. Sedangkan upaya yang akan dilakukan adalah rencana anggaran pada tahun n+1 dilakukan penyesuaian. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan pembinaan norma dan syarat kerja
- Pelaksanaan peringatan May Day antara lain :
  1) Istighosah
  2) Sarasehan peringatan May Day
- Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dengan Dewan Pengupahan
- Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- Pelaksanaan kegiatan rapat kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi petani tembakau

- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan

f. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi besaran pagu atau yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebesar Rp. 28.000.000,-. Seiring waktu telah terjadi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dari sumber dana DAU Sehingga anggarannya menjadi Rp. 18.000.000,-. Sudah terealisasi sebesar Rp. 18.000.000,- dan persentase penyerapan anggaran sebesar 100%. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target.. Adapun anggaran tersebut tersebut digunakan untuk kegiatan antara lain :

- Pelaksanaan keberangkatkan calon transmigran sebanyak 1 KK Transmigran berasal dari Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan mendapatkan lahan di Taramanu Tua, kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat transmigrasi di UPT. Saluandean Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai hasil dari pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas umum pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya sebagai laporan / *progress report* perjalanan pembangunan selama tahun anggaran 2025, sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan. Adapun pencapaian indikator tujuan dan sasaran sesuai Renstra 2024-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan target 69.90% terealisasi 73,19% sehingga dapat dikatakan tercapai sangat tinggi yaitu 104,71%
2) Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dengan target 75% terealisasi 77,45% sehingga dapat dikatakan tercapai sangat tinggi yaitu 103,27%
3) Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan dengan target 100% terealisasi 100% sehingga dapat dikatakan tercapai yaitu 100%

Sedangkan pencapaian indikator tujuan dan sasaran sesuai Renstra 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Tingkat produktivitas tenaga kerja dengan target 35,86 juta rupiah/tenaga kerja terealisasi sebesar 35,68 juta rupiah/tenaga kerja sehingga dapat dikatakan tercapai yaitu 99,50%
2) Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan target 70,11% terealisasi 73,19% sehingga dapat dikatakan tercapai sangat tinggi yaitu 104,39%
3) Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan dengan target 100% terealisasi 100% sehingga dapat dikatakan tercapai yaitu 100%

4.2. SARAN/REKOMENDASI

Beberapa saran/rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja Disnaker Kabupaten Nganjuk di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1) Perlunya kepedulian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data-data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja dari setiap indikator kinerja. Selama ini mekanisme penyediaan data masih lemah, kurang responsif.
2) Diperlukannya pemahaman dan penguasaan substansi yang lebih mendalam dari pejabat yang berwenang pada masing-masing bidang tugas terkait indikator kinerja bidang yang bersangkutan beserta target-target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis. Dengan adanya pemahaman dan penguasaan terhadap indikator kinerja yang harus dicapai, maka akan dapat diidentifikasi dan dipetakan berbagai *effort* yang bersifat prioritas dalam rangka mendukung pencapaian target-target kinerja sebagaimana telah menjadi kontrak kinerja antara pejabat pada bidang yang bersangkutan dengan atasan langsungnya.
3) Capaian kinerja yang telah diperoleh sudah tercapai sangat tinggi sehingga untuk tahun yang akan datang target perencanaan menggunakan base line capaian tahun 2025. Upaya-upaya perbaikan di berbagai bidang tugas masih tetap diperlukan untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk tahun 2025 ini kami susun. Diharapkan dengan disusunnya laporan ini menjadi referensi dan proses pembangunan di bidang ketenagakerjaan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, transparan serta mampu mencerminkan dan merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat yang telah memberikan mandat. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Nganjuk, 6 Februari 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk

ITSNA SHOFIANI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790404 200312 2 006

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2024-2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAMSUL HUDA, S.H, M.H

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP.,M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Nganjuk

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 2 Januari 2025

Pihak Kedua Pj. Bupati Nganjuk	Pihak Pertama Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP.,M.Si	SAMSUL HUDA, S.H, M.H Pembina Utama Muda NIP. 196608101992031011

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,90%
2	Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang Bekerja	Persentase Pencari kerja Terdaftar yang Ditempatkan	75%
3	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Diluar Pengadilan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.611.395.697,00	DAU
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 530.472.950,00	DAU
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 1.001.100.800,00	DAU
4	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.326.033.000,00	DAU
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 31.500.000,00	DAU

Nganjuk, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Pj. Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja

SAMSUL HUDA, S.H,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2025-2029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Itsna Shofiani, S.T., M.T

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A

Jabatan : Bupati Nganjuk

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 22 September 2025

Pihak Kedua Bupati Nganjuk	Pihak Pertama Kepala Dinas Tenaga Kerja
Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A	Itsna Shofiani, S.T., M.T Pembina Tk.I NIP. 19790404 200312 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	35,86
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,11%
3	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Diluar Pengadilan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.523.555.988,00	DAU
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 2.152.216.950,00	DAU
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 658.385.800,00	DAU
4	Program Hubungan Industrial	Rp. 2.706.621.400,00	DAU
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 18.000.000,00	DAU

Nganjuk, 22 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Nganjuk

Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A

Pihak Pertama
Kepala Dinas Tenaga Kerja

Itsna Shafiani, S.T., M.T
Pembina Tk.I
NIP. 19790404 200312 2 006

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RENSTRA 2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk 64418
Telp. (0358) 325200 ; 321785 Fax. 325200
Website : disnaker.nganjukkab.go.id, email : dis_naker@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor: 188/ 01 /KU411.311/2024

Tentang

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 - 2026

BUPATI NGANJUK

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, sasaran Pembangunan daerah dan ikhtisar hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu menyempurnakan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama sehingga memenuhi kriteria lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, dapat dipantau dan dikumpulkan serta berorientasi pada hasil;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026, perlu dilakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Caru Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 - 2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapain kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kapada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
PADA TANGGAL : 2 Januari 2024

a.n Bupati Nganjuk
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Daerah

SAMSUL HUDA, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026

Nomor : 188/ 01 /K/411.311/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

1. **Nama Organisasi** : Pemerintah Kabupaten Nganjuk
2. **Nama Unit Organisasi** : Dinas Tenaga Kerja
3. **Tugas** : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tenaga kerja
4. **Fungsi** :
   a) Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja
   b) Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja
   c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja
   d) Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja
   e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dipindai dengan CamScanner

5. **Indikator Kinerja Utama :**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator (Formula)	Sumber Data	Program Pembangunan	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja		Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\sum Angkatan\ Kerja}{\sum Penduduk\ Usia\ Kerja} \times 100\%$	BPS Kabupaten Nganjuk	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - ProgamPelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
2.		Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\sum Pencari\ kerja\ terdaftar\ yang\ ditempatkan}{\sum Pencari\ kerja\ terdaftar} \times 100\%$	- Karihub - AK-1 - Kegiatan Job Fair - PKWT CPMI	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan	$\frac{\sum Perselisihan\ HI\ yang\ selesai\ diluar\ pengadilan}{\sum Perselisihan\ HI\ tercatat} \times 100\%$	Register Perselisihan Hubungan Industrial	- Program Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RENSTRA 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk 64418
Telp. (0358) 325200 ; 321785 Fax. 325200
Website : disnaker.nganjukkab.go.id, email : dis_naker@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor: 000.7.2.2/92/411.311/2025

Tentang

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 - 2029

BUPATI NGANJUK

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, sasaran Pembangunan daerah dan ikhtisar hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu menyempurnakan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama sehingga memenuhi kriteria lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, dapat dipantau dan dikumpulkan serta berorientasi pada hasil;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu dilakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 121 Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 - 2029

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapain kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kapada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
PADA TANGGAL : 22 September 2025

a.n Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk

FISNA SHOFIANI, S.T., M.T
Pembina (IV/a)
NIP. 19790404 200312 2 006

Lampiran : Keputusan Bupati Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 -2029

Nomor : 000.5.2.2/92/411.311/2025

Tanggal : 22 September 2025

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta rupiah/tenaga kerja	➢ Definisi : Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah nilai tambah (output ekonomi) yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja dalam satu tahun, diukur dengan membandingkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor formal maupun informal di wilayah Kabupaten. ➢ Formulasi perhitungan: $\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	BPS Kabupaten Nganjuk	Dinas Tenaga Kerja
2	Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	➢ Definisi : TPAK adalah persentase jumlah Angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini menunjukkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja ➢ Formulasi perhitungan : $\frac{\text{angkatan kerja}}{\text{penduduk usia kerja}} \times 100\%$	BPS Kabupaten Nganjuk	Dinas Tenaga Kerja

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan	%	➢ Definisi : Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan adalah ukuran yang menunjukkan berapa besar proporsi (dalam persen) dari total kasus perselisihan hubungan industrial yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, seperti bipartit, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, tanpa melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). ➢ Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Jumlah perselisihan hubungan industrial yang selesai diluar pengadilan}}{\text{Jumlah perselisihan hubungan industrial tercatat}} \times 100\%$	Register Perselisihan hubungan industrial	Dinas Tenaga Kerja

a.n Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk

USNA SHOFIANI, S.T, M.T
Pembina TK.I
NIP. 19790404 200312 2 006

LAMPIRAN

DOKUMEN PENGANGGARAN (IKHTISAR DPA)

TAHUN 2025

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2026

Perubahan
DPA-SKPD

Nomor: DPPA/4.3/[illegible]/2026

Organisasi: [illegible] - Dinas Tenaga Kerja

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	1		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp285.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**	**(Rp112.000.000,00)**	**(99,47)**
4	1	03	Retribusi Daerah	Rp285.000.000,00	Rp100.000.000,00	(Rp112.000.000,00)	(99,47)
5	1		**BELANJA OPERASI**	**Rp7.806.843.287,00**	**Rp8.953.215.968,00**	**Rp1.058.371.681,00**	**35,75**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp2.766.188.818,00	Rp2.847.001.000,00	Rp74.834.381,00	2,54
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.216.775.676,00	Rp6.723.219.968,00	Rp1.503.443.510,00	37,24
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp20.000.000,00	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)	(100,00)
5	2		**BELANJA MODAL**	**Rp494.660.190,00**	**Rp459.660.190,00**	**Rp0,00**	**0,00**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp494.660.190,00	Rp459.660.190,00	Rp0,00	0,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	100,00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp36.000.000,00	Januari	Rp886.157.178,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp832.031.850,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp911.788.900,00
April	Rp36.000.000,00	April	Rp1.738.720.407,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp388.079.860,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp856.059.852,00
Juli	Rp64.000.000,00	Juli	Rp1.419.784.890,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp830.091.800,00
September	Rp0,00	September	Rp202.702.800,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp1.453.818.858,00
November	Rp0,00	November	Rp845.791.800,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp820.896.800,00
Jumlah	**Rp100.000.000,00**	**Jumlah**	**Rp15.092.795.196,00**

Nganjuk, Tanggal 20 Oktober 2025
KEPALA DINAS TENAGA KERJA

[illegible]
NIP. [illegible]

Mengesahkan:
PPKD

Dra. [illegible]
NIP. [illegible]

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKHAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Drs. ADAM MUHARTO, A.P., M.Si	197305111993111002	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	196805111993032001	Sekretaris	

LAMPIRAN

KEADAAN KETENAGAKERJAAN DARI

BPS KABUPATEN NGANJUK

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NGANJUK

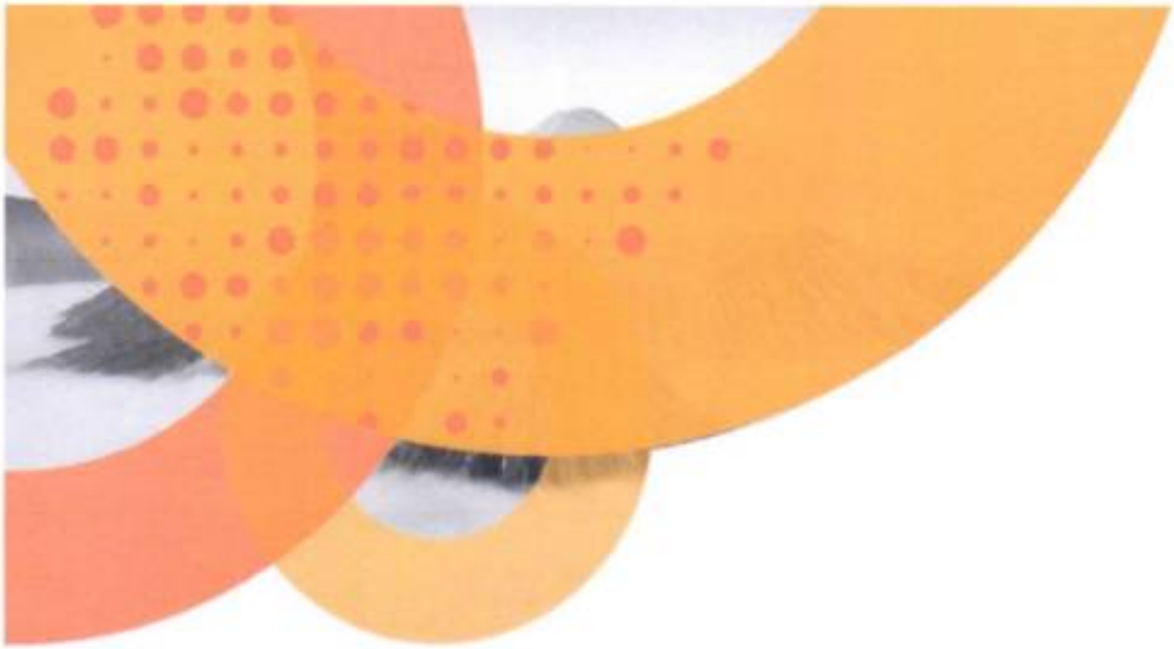
BERITA RESMI STATISTIK

No. 14/11/3518/Th. II, 25 November 2025



Keadaan Ketenagakerjaan Nganjuk Agustus 2025

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,84 persen.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 73,19 persen.



A. Keadaan Ketenagakerjaan

- Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 bertambah 36 ribu orang menjadi sebanyak 663,44 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 73,19 persen, naik 3 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2024.
- Penduduk yang bekerja sebanyak 637,95 ribu orang atau bertambah 35 ribu orang dibandingkan Agustus 2024.
- Sebanyak 192,64 ribu orang (30,20 persen) bekerja pada kegiatan formal atau berkurang 2,32 persen poin dibandingkan Agustus 2024.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 3,84 persen, turun 0,03 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2024.
- TPT tertinggi di Nganjuk pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu 8,13 persen disusul lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memiliki TPT sebesar 6,37 persen.

1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di Nganjuk pada Agustus 2025 sebesar 906,47 ribu orang atau mengalami kenaikan 7,52 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Nganjuk. Sebanyak 663,44 ribu orang atau sekitar 73,19 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di Nganjuk pada Agustus 2025 terdiri dari 637,95 ribu orang bekerja dan 25,49 ribu orang menganggur.

Terjadi peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 36,04 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Dalam hal ini, terjadi penambahan penduduk bekerja sekitar 34,85 ribu orang dan pengurangan penduduk dengan kategori pengangguran sebanyak 1,19 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2025 sebesar 73,19 persen atau mengalami kenaikan sebesar 3,40 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2024. Kenaikan TPAK ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk bekerja di Nganjuk. Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan mencolok diantara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada Agustus 2025, TPAK laki-laki sebesar 85,95 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 60,43 persen.

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja, Agustus 2023–Agustus 2025

Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025	Penambahan Ags 2024–Ags 2025	
	orang	orang	orang	orang	persen
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	891.125	898.946	906.468	7.522	0,84
Angkatan Kerja	596.111	627.397	663.438	36.041	5,74
- Bekerja	568.201	603.100	637.949	34.849	5,78
- Pengangguran	27.910	24.297	25.489	1.192	4,91
Bukan Angkatan Kerja	295.014	271.549	243.030	-28.519	-10,50
	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Penganguran Terbuka (TPT)	4,68	3,87	3,84	-0,03	
- Laki-laki	4,59	3,80	3,62	-0,19	
- Perempuan	4,84	3,97	4,16	0,18	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,89	69,79	73,19	3,40	
- Laki-laki	84,91	84,35	85,95	1,59	
- Perempuan	48,86	55,22	60,43	5,21	

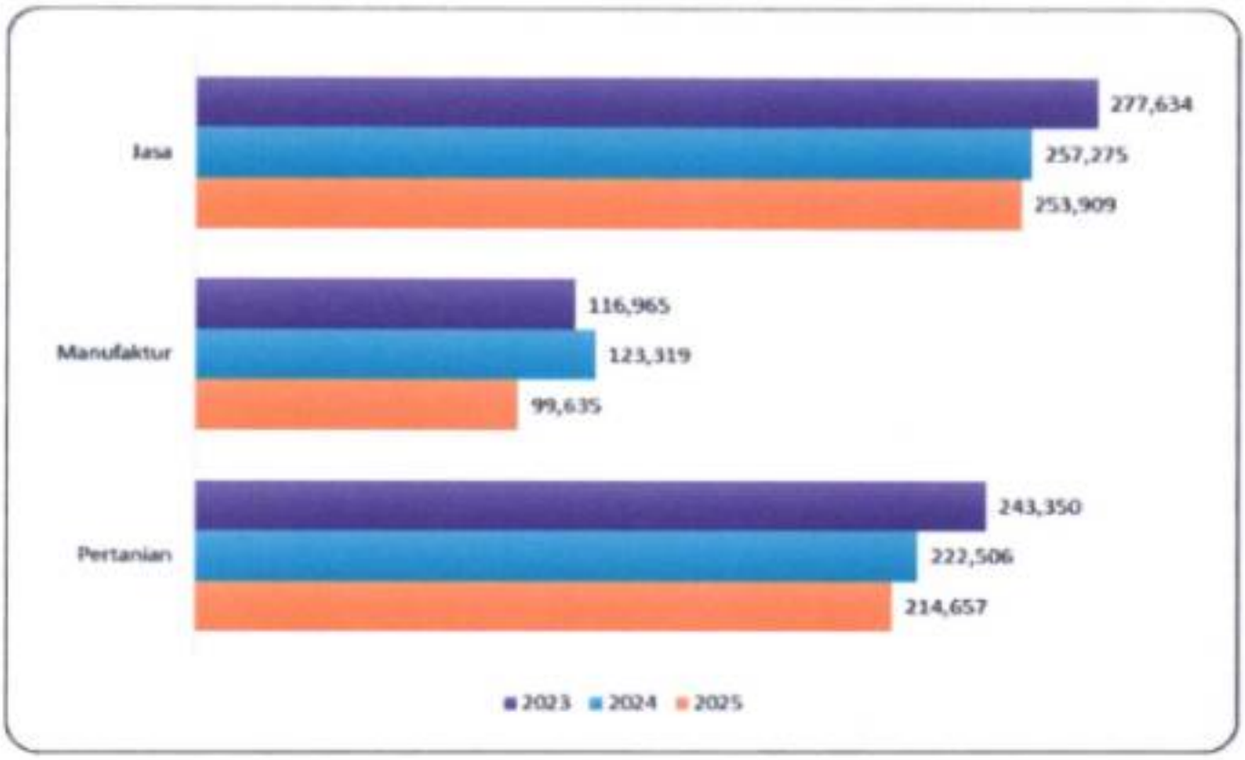
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

2. Karakteristik Penduduk Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Dari penduduk bekerja di Nganjuk pada Agustus 2025 yang sebesar 637.949 orang, selanjutnya akan dilihat karakteristik penduduk bekerja. Karakteristik ini dijelaskan antara lain berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

2.1 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dari Pekerjaan Utama

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025, lapangan pekerjaan di Nganjuk terbagi dalam 3 sektor utama, dimana yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Jasa yaitu sebesar 43,52 persen; Pertanian sebesar 38,15 persen; dan Manufaktur sebesar 18,33 persen. Persentase tiga sektor ini menunjukkan pergeseran pola yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kondisi Agustus 2023 dan Agustus 2024.



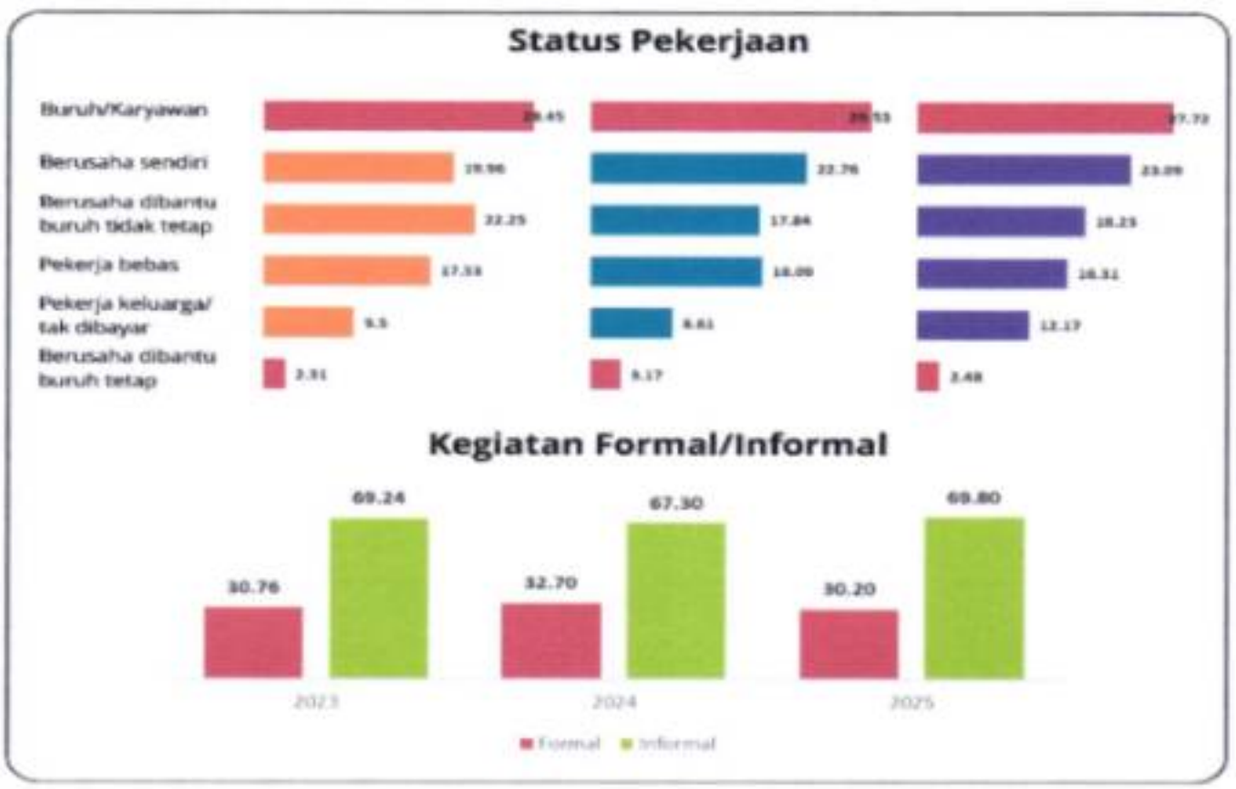
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Gambar 1 Distribusi Perubahan Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dari Pekerjaan Utama, Agustus 2023–Agustus 2025

Sektor Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) mengalami peningkatan jumlah pekerja terbanyak sebesar 20,84 ribu orang, diikuti Jasa (Perdagangan, Akomodasi, Administrasi Pemerintahan dll) mengalami peningkatan sebesar 20,36 ribu orang, sedangkan sektor Manufaktur mengalami penurunan sebesar 6,35 ribu orang. Penambahan terbesar ada pada sektor Pertanian sebesar 20,84 ribu orang dikarenakan adanya peningkatan produksi bawang merah pada saat panen raya.

2.2 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaan utama, tidak terjadi perubahan komposisi persentase di Nganjuk. Pada Agustus 2025, penduduk bekerja di Nganjuk masih didominasi Buruh/Karyawan/Pegawai yaitu sebesar 27,72 persen diikuti mereka yang berstatus Berusaha Sendiri dan Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap. Sebaliknya, mereka yang bekerja dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tetap masih memiliki persentase paling kecil sebesar 2,48 persen. Status pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase adalah Pekerja Keluarga (naik 3,56 persen poin), Berusaha Sendiri (naik 0,34 persen poin), Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap (naik 0,39 persen poin). Jika dilihat dari jumlah penduduk bekerja, yang berstatus Buruh/Karyawan/Pegawai (turun 1,81 persen poin), Pekerja Bebas (turun 1,78 persen poin) dan Berusaha Dibantu Buruh Tetap (turun 0,69 persen poin).



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Gambar 2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/ Informal (persen), Agustus 2023–Agustus 2025

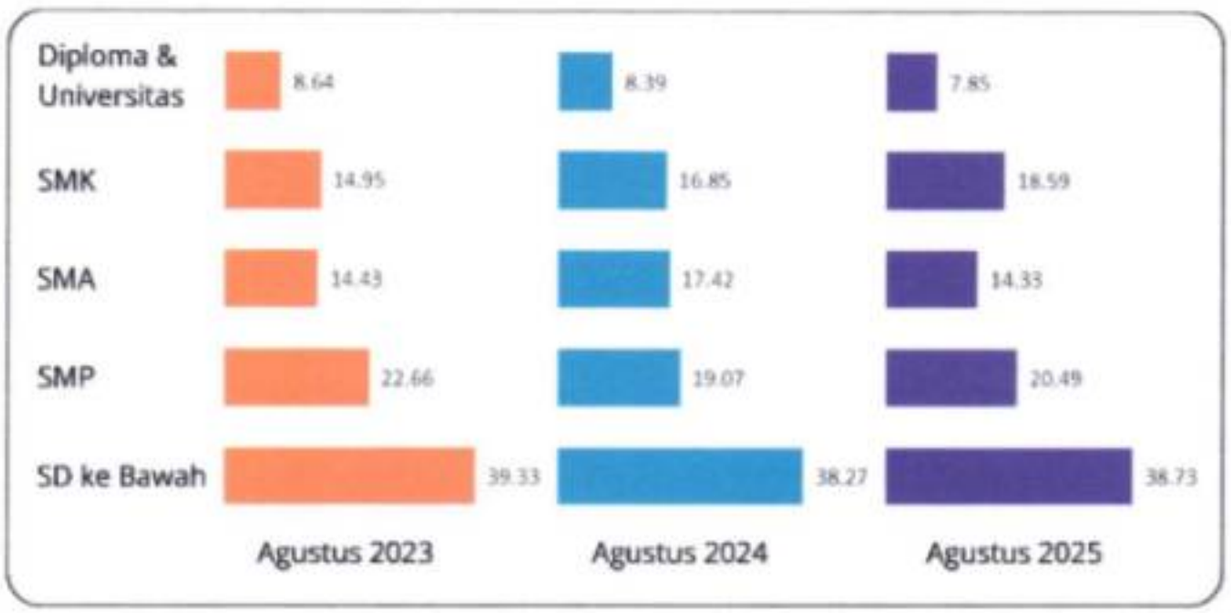
Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).

Pada Agustus 2025, penduduk Nganjuk yang bekerja di kegiatan formal sebesar 192,64 ribu orang (30,20 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 445,31 ribu orang (69,80 persen). Terjadi penambahan proporsi penduduk yang bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2025 sebesar 2,50 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

2.3 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas dan daya saing tenaga kerja. Komposisi penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan dapat mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta akses masyarakat terhadap pendidikan.

Pada Agustus 2025, sebagian besar penduduk bekerja di Nganjuk masih didominasi oleh penduduk berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/ tamat SD), yaitu sebesar 38,73 persen. Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan Perguruan Tinggi, yakni tamatan Diploma I/II/III dan Universitas mencapai 7,85 persen. Persentase ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan Agustus 2025. Secara umum, distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan pada Agustus 2025 masih memperlihatkan pola yang relatif sama dengan Agustus 2023 dan Agustus 2024.



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Gambar 3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2023–Agustus 2025

Jumlah dan proporsi penduduk bekerja berpendidikan SMA dan Perguruan Tinggi (Diploma & Universitas) menunjukkan penurunan, sedangkan jumlah penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Dasar kebawah (<=SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2024. Jumlah penduduk berpendidikan SMA yang bekerja berkurang 13,66 ribu orang sementara penduduk berpendidikan SMK yang bekerja mengalami penambahan terbesar yaitu 16,98 ribu orang (sekitar 1,74 persen poin).

3. Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah. Penduduk yang tergolong pengangguran adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; telah diterima bekerja atau siap berusaha tetapi belum mulai; serta mereka yang merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan (putus asa).

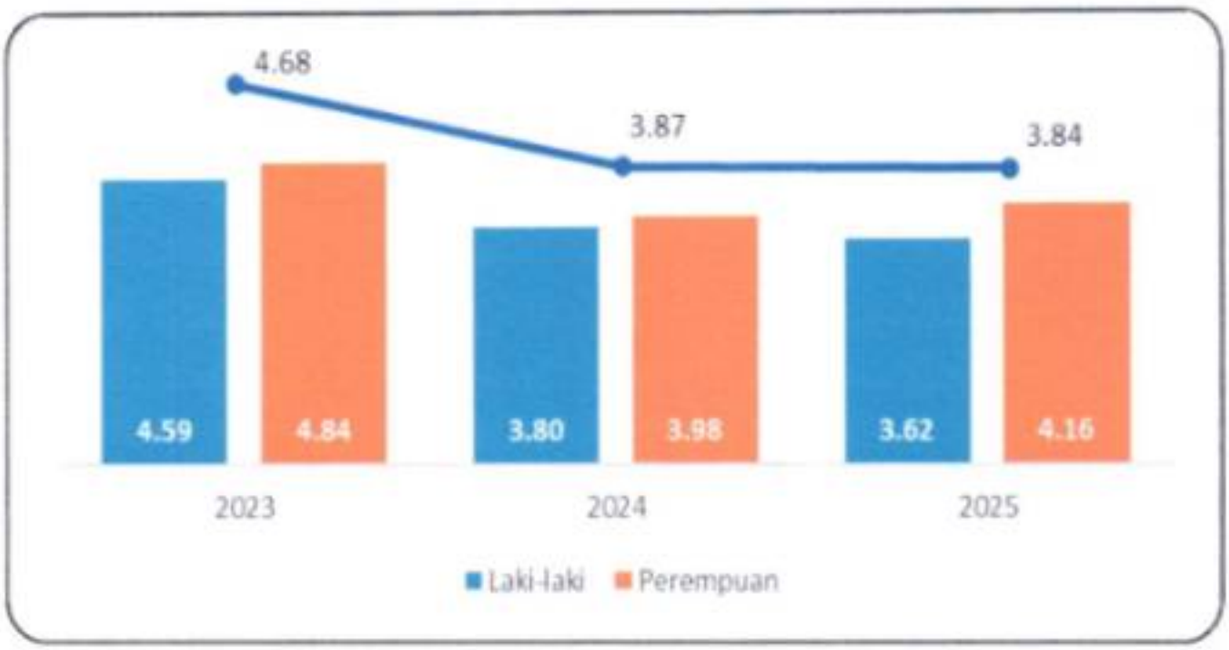
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan untuk mengukur proporsi angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Indikator ini mencerminkan sejauh mana ketersediaan lapangan kerja mampu menampung tenaga kerja yang siap dan bersedia bekerja. Selain itu, TPT juga berfungsi sebagai ukuran penting dalam menilai efektivitas pembangunan ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja serta menilai kualitas penyerapan tenaga kerja.

Lebih lanjut, TPT dapat dianalisis menurut berbagai karakteristik seperti jenis kelamin dan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Analisis menurut karakteristik tersebut memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kelompok penduduk yang lebih rentan terhadap pengangguran dan membantu dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2025 sebesar 3,84 persen. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 atau 4 orang penganggur. TPT pada Agustus 2025 mengalami penurunan sebesar 0,03 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

3.1 TPT Menurut Jenis Kelamin

Pola penganggur di Nganjuk menunjukkan kecenderungan TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki. Begitu pula dengan pola TPT pada Agustus 2025 yang menunjukkan bahwa TPT perempuan sebesar 4,16 persen dibanding TPT laki-laki yaitu 3,62 persen. TPT laki-laki pada Agustus 2025 menunjukkan penurunan 0,18 persen poin dan TPT perempuan mengalami penambahan 0,18 persen poin dibandingkan Agustus 2024. Perbedaan tingkat pengangguran antara laki-laki dan perempuan ini menunjukkan adanya variasi karakteristik angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan di pasar kerja, ataupun mengindikasikan kondisi yang lebih baik atau lebih buruk bagi salah satu kelompok.



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

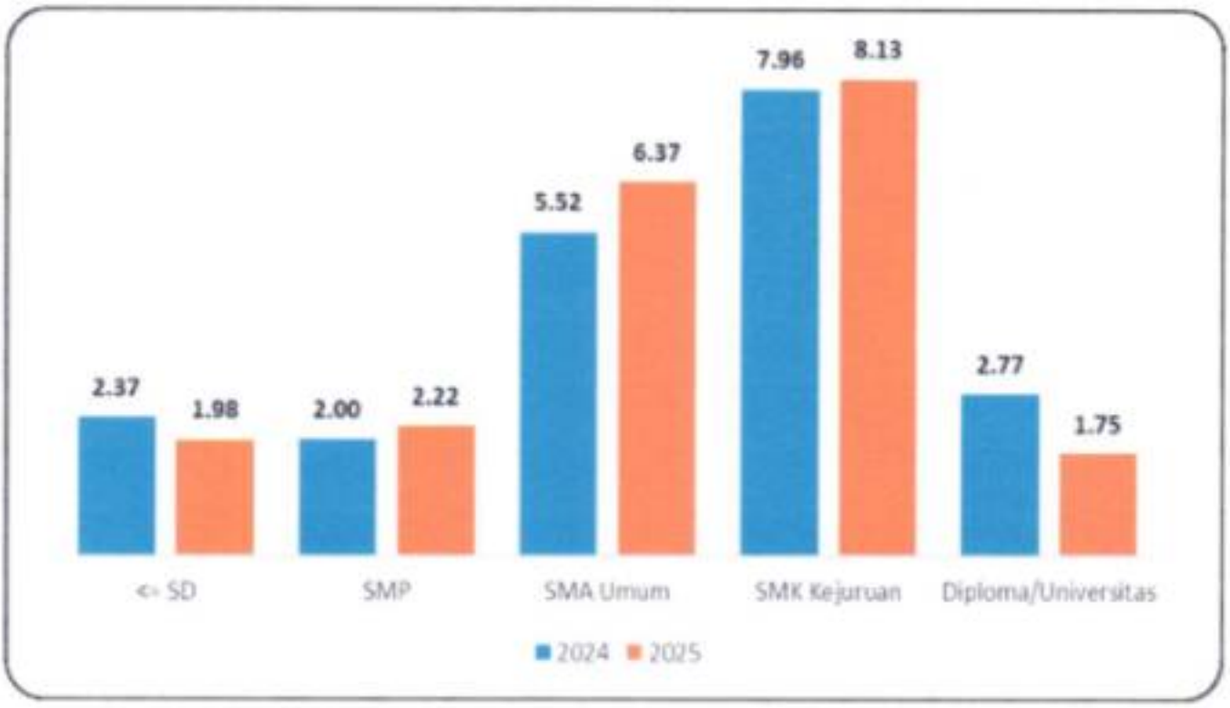
Gambar 4 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (Persen) Agustus 2023–Agustus 2025

3.2 TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agutus 2025, TPT lulusan SMK menunjukkan angka paling tinggi, yaitu 8,13 persen kemudian diikuti TPT lulusan SMA sebesar 6,37 persen. Selanjutnya TPT lulusan SMP sebesar 2,22 persen dan TPT pendidikan SD ke bawah sebesar 1,98 persen. TPT lulusan Perguruan Tinggi (Diploma & Universitas) berada pada urutan terendah sebesar 1,75 persen.

Dibandingkan dengan Agustus 2024, TPT penduduk dengan pendidikan SMP, SMA Umum dan SMK Kejuruan menunjukkan penambahan, masing-masing SMP sebesar 0,22 persen poin, SMA 0,85 persen poin dan SMK 0,17 persen poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa lulusan SMK masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Penambahan pengangguran terbesar adalah pada penduduk dengan tingkat pendidikan SMA Umum. TPT cenderung lebih tinggi pada jenjang pendidikan menengah dan atas, mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.

TPT penduduk dengan pendidikan SD kebawah dan Perguruan Tinggi mengalami penurunan. TPT pendidikan SD kebawah memiliki persentase kecil dikarenakan, penduduk pada pendidikan ini harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Fenomena positif terjadi pada TPT lulusan Perguruan Tinggi dimana terjadi penurunan sebesar 1,02 persen poin. Penduduk lulusan Perguruan Tinggi cenderung memiliki waktu tunggu yang lama untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan ekspektasi & kompetensinya.



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Gambar 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi (Persen) Agustus 2023–Agustus 2025

4. Isu Ketenagakerjaan di Nganjuk

Berdasarkan kondisi umum ketenagakerjaan Agustus 2025 yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa isu penting yang masih perlu mendapat perhatian di Nganjuk. Secara umum, penurunan tingkat pengangguran terbuka yang terjadi menunjukkan arah perbaikan pasar kerja, namun dinamika yang menyertainya mengungkap berbagai aspek yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait produktivitas, pemerataan, dan kesesuaian pekerjaan dengan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja.

Di Kabupaten Nganjuk, dari tahun ke tahun TPAK laki-laki cenderung lebih tinggi daripada TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak laki-laki yang terjun ke pasar kerja. TPT perempuan juga sedikit lebih tinggi dari TPT laki-laki, dimana pekerja perempuan masih mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Dari sisi pendidikan, pada lulusan menengah kejuruan, kelompok ini masih menjadi perhatian karena menghadapi tantangan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Isu kesesuaian antara kemampuan yang diperoleh dari pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja (link and match) masih menjadi hal penting untuk diperkuat. Sementara itu, dominasi tenaga kerja berpendidikan rendah serta tingginya angka penduduk bekerja di sektor informal juga menjadi tantangan tersendiri, karena meskipun sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja, karakteristik pekerjaan di dalamnya umumnya belum menjamin kestabilan dan perlindungan kerja yang memadai.

Selain isu *link and match* antara kemampuan/*skill* dengan ketersediaan lapangan pekerjaan juga kemungkinan besar karena karakteristik angkatan kerja pada jenjang pendidikan ini cenderung untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki terutama pada kelompok pendatang baru di pasar kerja sehingga waktu tunggu dari saat menyatakan terjun di pasar kerja atau berniat untuk mencari pekerjaan hingga memperoleh pekerjaan yang sesuai akan relatif lebih lama dibanding angkatan kerja pada jenjang lain.

Pelaksanaan *job fair* bisa menjadi salah satu sarana untuk memangkas waktu tunggu karena bisa mempercepat pertemuan antara pencari kerja berkemampuan khusus ini dengan penyedia lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan khusus tersebut. Perkembangan sektor pertanian masih sangat dipengaruhi musim, sebagaimana pada Agustus 2025 ini terpengaruh oleh musim panen bawang merah.

Dari sisi jenis kelamin, tingkat pengangguran terbuka laki-laki masih lebih rendah dibanding perempuan. Perbedaan ini tidak menunjukkan kesenjangan, namun menggambarkan variasi pola partisipasi di pasar kerja. Secara umum laki-laki cenderung bekerja karena tuntutan pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan perempuan lebih banyak bekerja pada kegiatan informal yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan di Nganjuk masih dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan dalam memilih atau mendapatkan pekerjaan.

Secara keseluruhan, capaian perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Nganjuk menunjukkan sinyal positif, dengan tren penurunan tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun. Namun, beragam isu seperti produktivitas kerja, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar, serta perbedaan karakteristik ketenagakerjaan antar jenis kelamin masih perlu mendapat perhatian.

Lampiran 1 Karakteristik Penduduk Bekerja, Agustus 2023–Agustus 2025

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2023		Agustus 2024		Agustus 2025	
	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
SD ke Bawah	222,45	39,33	230,80	38,27	247,11	38,73
Sekolah Menengah Pertama	128,73	22,66	114,99	19,07	130,75	20,49
Sekolah Menengah Atas	82,00	14,43	105,08	17,42	91,41	14,33
Sekolah Menengah Kejuruan	84,92	14,95	101,60	16,85	118,58	18,59
Diploma & Universitas	49,10	8,64	50,63	8,39	50,11	7,85
Jumlah	**568,20**	**100,00**	**603,10**	**100,00**	**637,95**	**100,00**
Lapangan Pekerjaan Utama						
A. Pertanian	214,66	37,78	222,51	36,89	243,35	38,15
B. Manufaktur	99,64	17,54	123,32	20,45	116,97	18,33
C. Jasa	253,91	44,69	257,28	42,66	277,63	43,52
Jumlah	**568,20**	**100,00**	**603,10**	**100,00**	**637,95**	**100,00**
Status Pekerjaan Utama						
Berusaha sendiri	113,39	19,96	137,25	22,76	147,33	23,09
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	126,42	22,25	107,59	17,84	116,31	18,23
Berusaha dibantu buruh tetap	13,15	2,31	19,11	3,17	15,82	2,48
Buruh/karyawan/pegawai	161,65	28,45	178,10	29,53	176,82	27,72
Pekerja bebas	99,59	17,53	109,11	18,09	104,04	16,31
Pekerja keluarga/tak dibayar	54,01	9,50	51,94	8,61	77,63	12,17
Jumlah	**568,20**	**100,00**	**603,10**	**100,00**	**637,95**	**100,00**
Status Pekerjaan Formal/Informal						
Formal	174,80	30,76	197,21	32,70	192,64	30,20
Informal	393,40	69,24	405,89	67,30	445,31	69,80
Jumlah	**568,20**	**100,00**	**603,10**	**100,00**	**637,95**	**100,00**

Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023, Agustus 2024, dan Agustus 2025

Catatan : Lapangan Pekerjaan
1. Sektor Pertanian : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Sektor Jasa : Perdagangan, Pengangkutan, Penyediaan Akomodasi, Informasi, Komunikasi, Keuangan, Aktifitas Profesional, Aktifitas Penyewaan, Administrasi Pemerintahan, Pendidikan, Aktifitas Kesehatan, Kesenian dan Jasa Lainnya)
3. Sektor Manufaktur : Pertambangan, Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik & Gas, Treatment Air & Limbah, Konstruksi)

Lampiran 2 TPT Menurut Kabupaten/Kota (persen), Agustus 2023–Agustus 2025

Kabupaten/Kota	Agustus 2023	Agsutus 2024	Agustus 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Pacitan	1,83	1,56	1,40
02 Ponorogo	4,66	4,19	3,85
03 Trenggalek	4,52	3,90	3,86
04 Tulungagung	5,65	4,12	4,03
05 Blitar	4,91	4,77	4,49
06 Kediri	5,79	5,10	4,71
07 Malang	5,70	5,13	5,00
08 Lumajang	3,67	3,28	3,08
09 Jember	4,01	3,23	3,07
10 Banyuwangi	4,75	4,03	3,94
11 Bondowoso	4,15	3,63	2,55
12 Situbondo	3,27	3,15	3,02
13 Probolinggo	3,24	3,00	2,92
14 Pasuruan	5,48	5,02	4,22
15 Sidoarjo	8,05	6,49	5,75
16 Mojokerto	4,67	3,87	3,49
17 Jombang	4,66	3,75	3,28
18 Nganjuk	4,68	3,87	3,84
19 Madiun	5,14	4,34	3,22
20 Magetan	4,16	3,28	3,26
21 Ngawi	2,41	2,40	2,26
22 Bojonegoro	4,63	4,42	3,90
23 Tuban	4,40	4,28	3,44
24 Lamongan	5,46	4,34	4,29
25 Gresik	6,82	6,45	5,47
26 Bangkalan	6,18	5,35	5,31
27 Sampang	2,72	2,50	2,44
28 Pamekasan	1,74	1,64	1,33
29 Sumenep	1,71	1,69	1,64
71 Kota Kediri	4,06	3,91	3,76
72 Kota Blitar	5,24	5,11	4,28
73 Kota Malang	6,80	6,10	5,69
74 Kota Probolinggo	4,53	4,44	4,93
75 Kota Pasuruan	5,64	4,63	4,59
76 Kota Mojokerto	4,73	3,76	4,66
77 Kota Madiun	5,85	4,30	4,29
78 Kota Surabaya	6,76	4,91	4,84
79 Kota Batu	4,52	3,63	3,53
Jawa Timur	4,88	4,19	3,88

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Lampiran 3 TPAK Menurut Kabupaten/Kota (persen), Agustus 2023–Agustus 2025

Kabupaten/Kota	Agustus 2023	Agsutus 2024	Agustus 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Pacitan	81,64	86,62	80,82
02 Ponorogo	75,88	78,75	79,91
03 Trenggalek	80,72	80,08	77,67
04 Tulungagung	74,70	75,57	74,72
05 Blitar	73,50	72,36	75,82
06 Kediri	68,74	71,31	69,65
07 Malang	70,66	72,90	73,86
08 Lumajang	68,49	70,86	69,64
09 Jember	72,30	73,76	75,78
10 Banyuwangi	79,04	75,36	73,74
11 Bondowoso	74,39	75,10	77,28
12 Situbondo	75,28	76,66	78,51
13 Probolinggo	69,48	73,18	76,72
14 Pasuruan	71,21	75,31	74,72
15 Sidoarjo	69,62	68,37	69,53
16 Mojokerto	72,51	73,94	74,24
17 Jombang	71,91	71,88	72,64
18 Nganjuk	66,89	69,79	73,19
19 Madiun	72,49	72,34	73,97
20 Magetan	78,48	77,04	74,70
21 Ngawi	69,43	75,73	74,58
22 Bojonegoro	74,29	73,86	78,61
23 Tuban	74,73	74,55	72,86
24 Lamongan	75,08	74,80	74,77
25 Gresik	70,12	71,61	67,99
26 Bangkalan	71,49	70,48	68,94
27 Sampang	73,54	73,62	77,46
28 Pamekasan	77,14	79,13	79,85
29 Sumenep	78,86	78,16	80,00
71 Kota Kediri	71,83	70,74	70,64
72 Kota Blitar	72,26	70,44	75,95
73 Kota Malang	67,58	67,52	69,85
74 Kota Probolinggo	70,61	67,55	68,44
75 Kota Pasuruan	75,65	72,72	75,63
76 Kota Mojokerto	72,50	72,68	70,02
77 Kota Madiun	69,29	70,60	71,23
78 Kota Surabaya	68,73	70,49	70,59
79 Kota Batu	78,99	73,53	80,53
Jawa Timur	72,56	73,45	73,98

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)



Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:



Wahyu Purnamahadi
Kepala BPS Kabupaten Nganjuk

081333411200
bps3518@bps.go.id

Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Untuk layanan perpustakaan, penjualan data mikro, publikasi elektronik, publikasi cetakan, dan peta digital wilayah kerja statistik sesuai peraturan yang berlaku maupun konsultasi statistik dapat menghubungi Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di pst.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NGANJUK
Jl. Dermojoyo 34A, Kabupaten Nganjuk, Telp. 081333411200
Homepage: http://nganjukkab.bps.go.id, Email: bps3518@bps.go.id

LAMPIRAN

LAPORAN TRIWULAN 1,2,3, DAN 4 TAHUN 2025

DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN EVALUASI RENJA
TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2025

JL. Dermojoyo Nomor 45 Nganjuk
Telp / Fax : 0358 -325200
Web : disnaker.nganjukkab.go.id
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sampai triwulan I melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023.

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/263/K/411.013/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

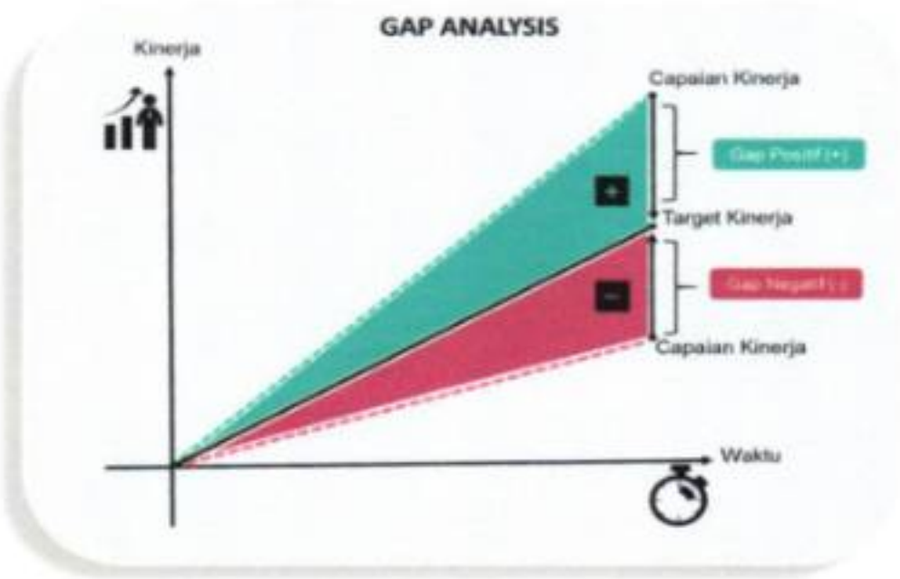
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Dinas Tenaga Kerja maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Tujuan :** Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Prosentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,95%	69,79%	101,21%
2	**Sasaran 1 :** Meningkatnya Jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	84%	57,28%	68,19%
	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90,10%	100%	110,99%

- Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Dalam pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja triwulan I Tahun 2025 realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,79% dari target yang telah ditentukan sebesar 68,95% realiasai kinerja 101,21% data sementara dari BPS Tahun 2024 dan Sasaran ke-1 yaitu Meningkatnya Jumlah penduduk yang bekerja dengan indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dengan target sebesar 84% dan sudah terealisasi sebesar 57,28%.

Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan telah terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan sebesar 90,10% sehingga capaian target realisasi kinerja sebesar 110.99%.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening					Program	Indikator		Realisasi Tribulan I Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Realisasi s/d TW 1	Capaian
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**76,00**	-	-	-
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**26 laporan**	4 laporan		15,38%
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**4 laporan**	1 laporan		25%
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	**7 laporan**	3 laporan		42,85%
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas**	**Jumlah Dokumen**	**4**	1	2	50%

Kode Rekening					Program	Indikator		Realisasi Tribulan I Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Realisasi s/d TW 1	Capaian
					Tenaga Kerja	**administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun**	**dokumen**	dokumen	dokumen	
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/bulan (350 orang)	42 orang	84 orang	56%
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/smesteran	4 laporan	-0	-	1%
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**28 dokumen**	7 dokumen		25%
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah paket komponen instalasi	4 paket	1 paket	2 paket	50%

Kode Rekening					Program	Indikator		Realisasi Tribulan I Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Realisasi s/d TW 1	Capaian
					Kantor	listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	2 paket	50%
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	1 paket	2 paket	50%
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	1 dokumen	2 paket	50%
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	1 laporan	2 paket	50%
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	1 laporan	2 paket	50%

Kode Rekening					Program	Indikator		Realisasi Tribulan I Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Realisasi s/d TW 1	Capaian
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen	1 dokumen	2 paket	50%
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**198 unit**			
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	150 unit	-		
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 unit	-		
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	-		
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang**	**12 laporan**	3 laporan		25%

Kode Rekening					Program	Indikator		Realisasi Tribulan I Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Realisasi s/d TW 1	Capaian
						tersedia				
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1 laporan	2 laporan	50%
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	1 laporan	2 laporan	50%
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	1 laporan	2 laporan	50%
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**28 unit**	-		
2	**07**	**01**	**2.09**	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	-		

Kode Rekening					Program	Indikator		Realisasi Tribulan I Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Realisasi s/d TW 1	Capaian
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	-		
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	-		
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	-		
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	-		
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	-		
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**					
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan**	**Prosentase pencari kerja**	**2%**	2,81%		140,5%

Kode Rekening					Program	Indikator		Realisasi Tribulan I Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Realisasi s/d TW 1	Capaian
					Produktivitas Tenaga Kerja	**terdaftar yang mendapatkan pelatihan**				
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah pencari kerja terdaftar yang terlatih**	**40 orang**	40 orang		100%
2	**07**	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	40 orang	40 orang		100%
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK Swasta yang dibina**	**3 lembaga**	**3 lembaga**		**100%**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	45 lembaga	45 lembaga		100%
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsuktansi peningkatan produktivitas**	-	-	-	-
2	**07**	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi	Jumlah perusahaan kecil yang	-	-	-	-

Kode Rekening					Program	Indikator		Realisasi Tribulan I Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Realisasi s/d TW 1	Capaian
					Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas				
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase Tingkat Kesempatan Kerja**	-	-	-	-
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencari kerja yang mendapatkan pemagangan kerja**	-	-	-	-
2	**07**	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	-	-	-	-
2	**07**	04	2.01	0002	Pelayanan Antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	-	-	-	-
2	**07**	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan	-	-	-	-

Kode Rekening					Program	Indikator		Realisasi Tribulan I Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Realisasi s/d TW 1	Capaian
						fasilitasi layanan ULD				
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase cakupan penyebarluasan informasi pasar kerja**	**10%**	**6,83%**		**68,3%**
2	**07**	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	-	-	-	-
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi**	**10%**	**100%**		**1000%**
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna yang diperdayakan	-	-	-	-
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Angka Sengketa Perusahaan Pertahun**	**0,25%**	**0,45%**		**180%**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama**	Jumlah Perusahaan yang memiliki LKS Bipartitaktif	**7 perusahaan**	29 Perusahaan		414%

Kode Rekening					Program	Indikator		Realisasi Tribulan I Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Realisasi s/d TW 1	Capaian
					untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP,PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan dalam HI)	0 laporan	0 Laporan		
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Perselisihan yang tertangani di PB	**20,05%**	100%		498%
2	***07***	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah perselisihan yang dicegah	1 perkara	0 Perkara		100%

Kode Rekening					Program	Indikator		Realisasi Tribulan I Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Realisasi s/d TW 1	Capaian
					Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
2	**07**	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisiajn Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara perselisihan yang dicegah	1 perkara	1 Perkara		100%
2	**07**	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	1 Lembaga		100%
2	**07**	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	3.925 orang	3.950 orang		100,6%

Kode Rekening					Program	Indikator		Realisasi Tribulan I Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Realisasi s/d TW 1	Capaian
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**					
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**					
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	-	-	-	-
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	-	-	-	-
3	32	03	**2.01**	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yangbersal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon Tranmigran yang dipindahkan/ditempatkan	-	-	-	-
3	32	03	**2.01**	0019	Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada Tranmigran	-	-	-	-

➢ Analisis capaian kinerja Program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Dalam pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) telah terealisasi sebagai berikut :

No.	OPD/UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI IKM	KATEGORI	JUMLAH RESPONDEN	METODE SKM	UNSUR PRIORITAS PERBAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS TENAGA KERJA	89,51	A (Sangat Baik)	115	Sukma e-Jatim (SKM Online)	1. Sarana dan Prasarana	Unsur Sarana dan Prasarana: • Penambahan perangkat keras personal computer untuk akses Aplikasi sehingga meminimalisir antrian pemohon
						2. Waktu Penyelesaian	Unsur Waktu Penyelesaian: • Memberikan pemahaman kepada Calon PMI maupun PPTKIS terkait kelengkapan berkas yang baik dan benar guna meminimalisir proses upload ulang.

No.	OPD/UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI IKM	KATEGORI	JUMLAH RESPONDEN	METODE SKM	UNSUR PRIORITAS PERBAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
						3. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	Unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan: • Tim teknis akan terus memantau kinerja layanan, mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul, dan melakukan pembaruan atau perbaikan sesuai kebutuhan.

- Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Realisasi di tahun 2025 pada triwulan I pada indikator Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dilaksanakan 2 kegiatan yaitu kegiatan pelatihan menjahit dan pelatihan servis sepeda motor dengan jumlah peserta masing masing 20 orang jadi untuk target di triwulan I tidak tercapai, karena masih ada efisiensi anggaran untuk pelaksanakan kegiatan tersebut.

Untuk indikator Jumlah perselisihan yang dicegah telah dilakukan kegiatan bimtek penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diikuti oleh 40 perusahaan tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk menekan angka perselisihan yang terjadi di antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini berarti jika jumlah perkara perselisihan yang diselesaikan maupun jumlah perselisihan yang dicegah terealisasi semakin kecil dari target maka dikatakan tercapai atau baik.

➢ Analisis realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**76,00**	0	0
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang diusun**	**15.732.000**	0	
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.224.000	0	
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7.508.000	0	
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**	**Jumlah Dokumen**	**2.769.294.619**	**213.100.366**	**7,70**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Dinas Tenaga Kerja	**administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun**			
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.765.166.619	213.100.366	7,70
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/smesteran	4.128.000	0	0
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan**	**273.180.038**	0	0
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	753.000	0	0
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	53.668.878	0	0

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9.219.160	0	0
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.000.000	0	0
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	0	0
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.539.000	0	0
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	14.000.000	0	0
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**496.566.800**	0	0

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	38.382.300	0	0
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	444.678.850	0	0
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	13.305.650	0	0
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**481.130.000**	0	0
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.390.000	0	0
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30.000.000	0	0
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan	448.740.000	33.188.005	7,39

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**373.008.500**	0	0
2	**07**	**01**	**2.09**	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	48.650.000	0	0
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	94.508.500	0	0
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	3.000.000	0	0
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.150.000	0	0
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah gedung kantor dan	209.700.000	0	0

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.000.000	0	0
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Prosentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dan produktivitas standard**	**1.977.642.900**	0	0
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**1.867.845.000**	0	0
2	**07**	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	1.867.845.000	0	0
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK Swasta yang dibina**	**79.850.000**	0	0

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	79.850.000	0	0
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsuktansi peningkatan produktivitas**	**29.947.000**	0	0
2	**07**	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas	29.947.000	0	0
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)**	**658.385.800**	0	0
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**397.852.800**	0	0
2	**07**	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	45.975.000	0	0

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	286.916.000	0	0
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	64.961.800	0	0
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online**	**179.125.000**	0	0
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	179.125.000	0	0
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang terfasilitasi**	**81.408.000**	0	0
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diperdayakan	81.408.000	0	0

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**1.660.531.800**	0	0
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%	19.130.000	0	0
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan dalam HI)	19,130.000	0	0
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,**	Presentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun	**1.641.401.800**	**0**	**0**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	***07***	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	205.571.600	0	0
2	***07***	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	30.723.000	0	0
2	***07***	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional	Jumlah LKS Tripartit yang	80.209.000	0	0

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	dibina			
2	**07**	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	1.324.898.200	0	0
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**		**28.000.000**	0	0
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**		**28.000.000**	0	0
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**28.000.000**	0	0
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**28.000.000**	0	0
3	32	03	**2.01**	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran	8.000.000	0	0

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	yang dilaksanakan Penjajakan			
3	32	03	**2.01**	0019	Bantuan Permodalan (dalam bentuk uang saku)	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota sampai ke lokasi	20.000.000	0	0
						JUMLAH	**8.733.472.457**	**246.288.371**	**2,82%**

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Melakukan fasilitasi pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kompetensi	Sumber data TPT dan TPAK ada pada BPS yang diterbitkan setahun sekali pada bulan Desember atau pada triwulan IV dan
2	Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Melakukan fasilitasi pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kompetensi	Sumber data TPT dan TPAK ada pada BPS yang diterbitkan setahun sekali pada bulan Desember atau pada triwulan IV
3	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Memberikan arahan kepada Perusahaan agar sistem kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.	Pemantauan sistem kerja maupun jalannya produksi Perusahaan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku atau belum.

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**		
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan	Kegiatan rutin dilaksanakan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						setiap bulan	setiap bulan
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	07	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Daerah		
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.09	05	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**		
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**		
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**		
2	**07**	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Melakukan pendampingan dan akan menghadirkan Bank Penyalur KUR untuk memberikan pemahaman kepada peserta	Permasalahan pada sub ini yaitu masih cukup banyaknya masyarakat yang belum menjadi tenaga kerja mandiri

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						pelatihan terkait dengan pemanfaatan KUR untuk usaha	karena terhambat di sisi permodalan dan alat produksi.
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**		
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
2	***07***	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Semakin mudahnya pekerja dalam mengakses pengetahuan terkait norma dan syarat kerja melalui media sosial	- Masih adanya Perusahaan yang tidak patuh dan taat terhadap norma dan syarat kerja dengan pertimbangan kondisi keuangan Perusahaan
2	***07***	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang	Semakin mudahnya pekerja dalam mengakses pengetahuan terkait norma	Masih adanya Serikat Pekerja yang menyelesaikan perselisihan Hubungan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dan syarat kerja melalui media sosial	Industrial dengan melakukan aksi mogok kerja dan penutupan Perusahaan

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 beserta *output* dan *outcome*nya, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja; dan
    c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan

3. Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, 20 Maret 2025
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Daerah



SAMSUL HUDA, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

IV.2. Tindak Lanjut

1. **Sasaran** : **Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**

   Indikator : **Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n**

Kegiatan : Pelatihan Barbershop, Pelatihan Memasak, Pelatihan Menjahit dan Pelatihan berbasis Kompetensi

Waktu Pelaksanaan : Januari – Maret 2025

Hambatan : belum ada hambatan jika dilihat dari capaian target yang terealisasi

Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan agar realisasi dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.





1. **Sasaran** : **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**
   Indikator : **Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina**

Kegiatan : Bimtek LPTKS

Waktu Pelaksanaan : Januari – Maret 2025

Hambatan : belum ada hambatan jika dilihat dari capaian target yang terealisasi

Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan agar realisasi dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



2. **Sasaran** : **Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis**
Indikator : **Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan duluar pengadilan**

Kegiatan : Bimtek Penyelesaian perselisihan hubungan idustrial

Waktu Pelaksanaan : Januari – Maret 2025

Hambatan : belum ada hambatan jika dilihat dari capaian target yang terealisasi

Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan agar realisasi dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN EVALUASI RENJA
TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2025

JL. Dermojoyo Nomor 45 Nganjuk
Telp / Fax : 0358 -325200
Web : disnaker.nganjukkab.go.id
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sampai triwulan II melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023.

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/263/K/411.013/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

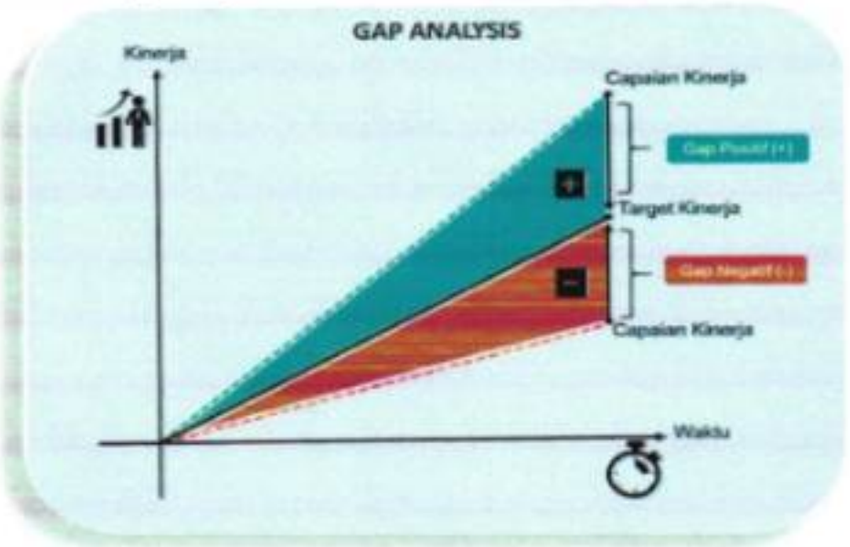
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai

selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.

4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Dinas Tenaga Kerja maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Tujuan :** Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Prosentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,95%	66,89%	97,01%
2	**Sasaran 1 :** Meningkatnya Jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	75%	66,89%	92,91%
	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90,10%	100%	110%

- Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Dalam pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja triwulan II Tahun 2025, realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 66,89% dari target yang telah ditentukan sebesar 68,95% realiasai kinerja 97,01% data sementara dari BPS Tahun 2024 dan Meningkatnya Jumlah penduduk yang

bekerja sebesar 75% dari targer yang telah ditentukan sebesar 75% realisasi kinerja 92,91%.

Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan telah terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan sebesar 90,10% dengan capaian kinerja 100%.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Capaian
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**76,00**	75,20	98,94%
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**26 laporan**	16 laporan	61,63%
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**4 laporan**	2 laporan	500%
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	**7 laporan**	5 laporan	71,52%
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun**	**4 dokumen**	2 dokumen	50%
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah orang yang menerima	25	90 orang	25,71%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Capaian
					ASN	gaji dan tunjangan ASN	orang/bula n (350 orang)		
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/smesteran	4 laporan	2 laporan	500%
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**28 dokumen**	14 dokumen	50%
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	2 paket	50%
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	2 paket	50%
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	2 paket	50%
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan	Jumlah Dokumen Bahan	4 dokumen	2	50%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Capaian
					Peraturan Perundang-Undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen	
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	2 laporan	50%
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	2 laporan	50%
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen	2 dokumen	50%
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**198 unit**	**64 unit**	**32,32%**
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	150 unit	33 unit	22%
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 unit	30 unit	85,71%
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit sarana dan	1 unit	1 unit	100%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Triwulan II Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Capaian
					Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**12 laporan**	6 laporan	50%
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2 laporan	50%
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	2 laporan	50%
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	2 laporan	50%
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**28 unit**	**27 unit**	**96,42%**
2	**07**	**01**	**2.09**	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	1 unit	1 unit	100%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Capaian
					kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	6 unit	60%
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	-	
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	2 unit	66,66%s
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	5 unit	100%
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	-	-
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**				
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan**	**5%**	**3,46%**	**69,20%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Capaian
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah pencari kerja terdaftar yang terlatih**	**320 orang**	**120 orang**	**37,5%**
2	**07**	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	100 orang	80 orang	80%
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi**	-	-	-
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	-	-	-
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas**	**11%**	**0**	**0%**
2	**07**	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas	15 Perusahaan	0	0%
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase Tingkat Kesempatan Kerja**	-	-	-
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah**	**Persentase Pencari kerja yang**	**87%**	**1,15%**	**1,32%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Capaian
					Kabupaten/Kota	**mendapatkan pemagangan kerja**			
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	50 orang	0	0%
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	60 orang	40 orang	66,67%
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	40 orang	0	0%
2	07	04	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase cakupan penyebarluasan informasi pasar kerja**	**25%**	**11,12%**	**44,48%**
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	-	277 orang	0%
2	07	04	2.04		**Perlindungan PMI (Pra dan**	**Persentase PMI (pra dan**	**20%**	**100%**	**500%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Capaian
					Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**purna penempatan) yang terfasilitasi**			
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna yang diperdayakan	20 orang	0	0%
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Angka Sengketa Perusahaan Pertahun**	**0,5%**	**0%**	**100%**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perusahaan yang memiliki LKS Bipartitaitif	7 perusahaan	27 Perusahaan	385,7%
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan daran HI)	1 laporan	1 Laporan	100%
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1**	Presentase Perselisihan yang tertangani di PB	20,05%	100%	498%

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Capaian
					(Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	**07**	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	1 perkara	0 Perkara	100%
2	**07**	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisiajn Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan	1 perkara	0 Perkara	100%
2	**07**	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	1 Lembaga	100%
2	**07**	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	3.925 orang	4.038 orang	102,8%
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**				

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Tribulan II Tahun 2025		
							Target	Realisasi	Capaian
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**				
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	-	-	-
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	-	-	-
3	32	03	**2.01**	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yangbersal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon Transmigran yang didipindahkan/ditempatkan	-	-	-
3	32	03	**2.01**	0019	Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada Tranmigran	-	-	-

- Analisis capaian kinerja Program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

  Dalam pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator inedeks kepuasan masyarakat (IKM) telah terealisasi sebagai berikut :

No.	OPD/UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI IKM	KATEGORI	JUMLAH RESPONDEN	METODE SKM	UNSUR PRIORITAS PERBAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS TENAGA KERJA	86	A (Sangat Baik)	269	Sukma e-Jatim (SKM Online)	1. Sarana dan Prasarana	Unsur Sarana dan Prasarana: • Penambahan perangkat keras personal computer untuk akses Aplikasi sehingga meminimalisir antrian pemohon
						2. Waktu Penyelesaian	Unsur Waktu Penyelesaian: • Memberikan pemahaman kepada Calon PMI maupun PPTKIS terkait kelengkapan berkas yang baik dan benar guna meminimalisir proses upload ulang.
						3. Produk Spesifikasi Jenis	Unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan: • Tim teknis akan terus

No.	OPD/UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI IKM	KATEGORI	JUMLAH RESPONDEN	METODE SKM	UNSUR PRIORITAS PERBAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
						Layanan	memantau kinerja layanan, mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul, dan melakukan pembaruan atau perbaikan sesuai kebutuhan.

Capaian Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan belum terealisasi hal ini dikarenakan kuota penempatan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Darah tertinggi dan Transmigrasi belum ada.

- Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Realisasi di tahun 2025 pada triwulan II pada indikator Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi telah dilaksanakan 4 kegiatan yaitu kegiatan pelatihan menjahit, pelatihan aneka street food, pelatihan las dan pelatihan memasak (TMMD) dengan jumlah peserta masing masing 20 orang jadi untuk target di triwulan II tidak tercapai, karena masih ada efisiensi anggaran untuk pelaksanakan kegiatan tersebut.

Untuk indikator Jumlah perselisihan yang dicegah telah dilakukan kegiatan peringatan hari buruh internasional, tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk memberikan apresiasi kepada pekerja. Sehingga kegiatan tersebut mampu menekan angka perselisihan hubungan industrial di perusahaan.

➢ Analisis realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**76,00**	**75,20**	**98,94%**
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**15.732.000**	4.110.000	26,12%
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.224.000	4.110.000	49,97%
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah laporan evaluasi	7.508.000	0	

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Daerah	kinerja perangkat daerah			
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun**	**2.769.294.619**	**932.596.914**	**33,72%**
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.765.166.619	932.596.914	33,72%
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/smesteran	4.128.000	0	0
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian**	**273.180.038**	**87.008.350**	**31,85%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
						Umum yang Dilaksanakan			
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	753.000	380.000	50,46%
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63.668.878	24.520.050	38,51%
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9.219.160	3.368.800	36,54%
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.000.000	750.000	25%
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	6.000.000	4.100.000	68,33%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
						Kunjungan Tamu			
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.539.000	53.889.500	30,52%
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	14.000.000	0	0
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**496.566.800**	**87.849.510**	**17,69**
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	38.382.300	37.462.500	97,60
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	444.878.850	50.387.010	11,32%
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor	13.305.650	0	0

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau bangunan lainnya yang disediakan			
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**481.130.000**	**202.829.035**	42,15%
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.390.000	510.000	21,33%
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30.000.000	16.379.010	54,59%
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	448.740.000	185.940.025	41,43%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**373.008.500**	**132.724.884**	35,58%
2	**07**	**01**	**2.09**	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	48.650.000	11.900.000	24,46%
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	94.506.500	22.715.425	24,03%
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	3.000.000	0	0
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.150.000	4.041.000	39,81%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	209.700.000	94.068.459	44,85%
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.000.000	0	0
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan**	**1.977.642.900**	**592.041.150**	**29,94%**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah pencari kerja terdaftar yang terlatih**	**1.867.845.900**	**527.313.900**	**28,23%**
2	**07**	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	1.867.845.900	527.313.900	28,23%

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Kompetensi				
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK Swasta yang dibina**	**79.850.000**	**64.727.250**	**81,06%**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	79.850.000	64.727.250	81,06%
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas**	**29.947.000**	**0**	**0**
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas	29.947.000	0	0
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)**	**658.385.800**	**19.000.000**	**2,89%**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang**	**397.852.800**	**0**	**0**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
						ditempatkan			
2	**07**	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	45.975.000	0	0
2	**07**	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	286.916.000	0	0
2	**07**	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	64.961.800	0	0
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online**	**179.125.000**	**19.000.000**	**10,61%**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	179.125.000	19.000.000	10,61%
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang terfasilitasi**	**81.408.000**	**0**	**0**
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Puma yang diperdayakan	81.408.000	0	0
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**1.660.531.800**	720.092.7650	43,36%
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya**	Jumlah Perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%	19.130.000	1.823.800	9,53

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan daran HI)	19,130.000	1.823.800	9,53
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun**	**1.641.401.800**	**718.268.965**	**43,75%**
2	***07***	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah perselisihan yang dicegah	205.571.600	103.482.600	50,33

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	30.723.000	26.323.000	85,67
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	80.209.000	32.970.000	41,10
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	1.324.898.200	555.493.365	41,92
3					**Urusan Pemerintahan**		**28.000.000**	**0**	**0**

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Pilihan				
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**		**28.000.000**	**0**	**0**
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**28.000.000**	**0**	**0**
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**28.000.000**	**0**	**0**
3	32	03	**2.01**	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	8.000.000	0	0
3	32	03	**2.01**	0019	Bantuan Permodalan (dalam bentuk uang saku)	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan	20.000.000	0	0

Kode Rekening					Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
						Kabupaten/Kota sampai ke lokasi			
						JUMLAH	**8.733.472.457**	**2.614.303.029**	**29,93**

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Melakukan fasilitasi pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kompetensi	Sumber data TPT dan TPAK ada pada BPS yang diterbitkan setahun sekali pada bulan Desember atau pada triwulan IV dan
2	Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Melakukan fasilitasi pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kompetensi	Sumber data TPT dan TPAK ada pada BPS yang diterbitkan setahun sekali pada bulan Desember atau pada triwulan IV
3	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Memberikan arahan kepada Perusahaan agar sistem kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.	Pemantauan sistem kerja maupun jalannya produksi Perusahaan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku atau belum.

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**		
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan	Kegiatan rutin dilaksanakan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Penggandaan	setiap bulan	bulan
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	07	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Lapangan		
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**		
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Banyaknya kebutuhan atas pencari kerja yang berkompeten	Masih cukup banyaknya masyarakat yang belum menjadi tenaga kerja mandiri karena terhambat di sisi permodalan dan alat produksi.
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	Banyaknya kebutuhan atas pencari kerja yang berkompeten	Masih cukup banyaknya masyarakat yang belum menjadi tenaga kerja mandiri karena terhambat di sisi permodalan dan alat produksi.
2	**07**	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Banyaknya kebutuhan atas pencari kerja yang berkompeten	Permasalahan pada sub ini yaitu masih cukup banyaknya masyarakat yang belum menjadi

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
							tenaga kerja mandiri karena terhambat di sisi permodalan dan alat produksi.
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Masih rendahnya kualitas LPK karena belum memenuhi standar akreditasi	Masih banyaknya LPK yang beranggapan bahwa pemenuhan standar akreditasi prosesnya rumit dan memakan biaya yang tinggi
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Masih rendahnya kualitas LPK karena belum memenuhi standar akreditasi	Masih banyaknya LPK yang beranggapan bahwa pemenuhan standar akreditasi prosesnya rumit dan memakan biaya yang tinggi
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Hasil pengukuran produktivitas pada Perusahaan kecil dapat digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan usaha	Perusahaan kecil masih belum menyadari pentingnya pengukuran tingkat produktivitas

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Masih banyaknya perusahaan kecil yang belum memahami cara mengukur produktivitas	Beberapa agenda prioritas Bidang Penta mengalami penjadwalan ulang, sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami pergeseran waktu untuk menghindari tumpang tindih kegiatan
2	07	04			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Meningkatnya kesempatan kerja di sektor industry manufaktur seiiring dengan bergesernya / relokasi industry padat karya ke Kabupaten Nganjuk	Tidak sesuai kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
2	07	04	2.01		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Masih banyaknya pencari kerja terdaftar yang belum ditempatkan	Kurangnya kompetensi petugas antar kerja dalam memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Masih rendahnya kompetensi petugas antar	Beberapa agenda prioritas Bidang Penta mengalami penjadwalan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						kerja dalam penyuluhan / bimbingan jabatan bagi pencari kerja	ulang, sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami pergeseran waktu untuk menghindari tumpang tindih kegiatan
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Tidak sesuai kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja	Terdapat efisiensi anggaran sehingga pencapaian target tidak tercapai sebagaimana yang direncanakan
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Perusahaan masih belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban mereka untuk mempekerjakan tenaga kerja disabilitas	Proses pendataan dan verifikasi peserta dari kalangan disabilitas memerlukan koordinasi lintas pihak serta pendekatan khusus, sehingga memerlukan waktu lebih lama dari yang direncanakan
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Tersedianya platform digital informasi pasar kerja seperti Karirhub, MERGAWE maupun melalui kanal media sosial	Tidak maksimalnya pemanfaatan platform baik pencari kerja maupun pemberi kerja

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						OPD	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Tersedianya lowongan pekerjaan dalam jumlah yang besar dalam satu kegiatan	Terdapat perusahaan peserta job fair yang tidak menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja
2	07	04	2.04		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Masih tingginya minat Masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk bekerja sebagai PMI	Masih banyaknya PMI yang kurang mempunyai keterampilan untuk bersaing di pasar kerja
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	PMI purna penempatan belum sepenuhnya diintervensi oleh Dinas sehingga lebih produktif dan berdaya saing	Proses pendataan dan verifikasi peserta dari kalangan PMI purna memerlukan koordinasi lintas pihak serta pendekatan khusus, sehingga memerlukan waktu lebih lama dari yang direncanakan
2	07	05			**Program Hubungan Industrial**		
2	07	05	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Semakin Pedulinya Perusahaan dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis sebagai salah	Kurangnya pemahaman pekerja tentang hak dan kewajiban dalam hubungan kerja

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						satu upaya untuk mencegah kerugian akibat mogok kerja	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi LKS Bipartit dalam Perusahaan untuk mencegah timbulnya perselisihan hubungan industrial	Kurangnya pemahaman dari sisi pekerja dan pengusaha terkait norma dan syarat kerja
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Peranan LKS Tripartit Kab. Nganjuk saat ini mampu menjawab isu – isu aktual ketenagakerjaan dengan senantiasa melakukan dialog dengan stakeholder ketenagakerjaan	Keterbatasan LKS Tripartit dalam melakukan kunjungan ke perusahaan yang rawan perselisihan hubungan industrial
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	Kesadaran akan pentingnya perlindungan norma kerja dalam hal ini Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja sebagai salah satu	Pembiayaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja masih dipandang sebagai biaya dalam proses produksi barang/jasa

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						upaya menjaga keberlangsungan usaha	
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**		
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**		
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	Pemerataan jumlah penduduk dalam suatu wilayah	Penentuan lokasi dan kuota calon transmigran dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujudnya persebaran penduduk	Jumlah kuota penempatan dan pemberangkatan transmigrasi terbatas
3	32	03	**2.01**	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Memberikan pendampingan calon transmigrasi sampai ke Lokasi penempatan transmigran	Tidak terlaksananya penjajakan calon lokasi transmigran
3	32	03	**2.01**	0019	Bantuan Permodalan (dalam bentuk uang saku)	Memberikan bantuan permodalan awal pasca penempatan	Tidak terwujudnya bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 beserta *output* dan *outcome*nya, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja; dan
   c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan

3. Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, 9 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Daerah

SAMSUL HUDA, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

IV.2. Tindak Lanjut

1. Sasaran	:	**Meningkatnya jumlah peserta pelatihan yang telah mampu mandiri secara ekonomi**
Indikator	:	**Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan**
Kegiatan	:	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (Pelatihan Menjahit, Pelatihan Las, Pelatihan Aneka Street Food, Pelatihan Memasak TMMD)
Waktu Pelaksanaan	:	- Pelatihan Menjahit 24 April 2025 (DAU) - Pelatihan Las 29 April 2025 (DAU) - Pelatihan Aneka Street Food 30 April 2025 (DAU) - Pelatihan Memasak (TMMD) 9 Mei 2025 (DAU)
Hambatan	:	Masih cukup banyak masyarakat yang belum menjadi tenaga kerja mandiri.
Tindak Lanjut	:	Melakukan pendampingan dengan mengelompokkan peserta berdasarkan usaha yang ditekuni untuk memudahkan monitoring dan pengembangan embrio usaha dan juga memberikan bantuan sarana usaha.





Pelatihan Menjahit









Pelatihan Aneka Street Food





Pelatihan Memasak (TMMD)

2. **Sasaran** : **Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis**
Indikator : **Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan**

Kegiatan : Pembinaan Kepesertaan BPJS

Waktu Pelaksanaan : 15 April 2025

Hambatan : Kegiatan pembinaan kepesertaan BPJS ditujukan agar perusahaan mampu mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan

- Kegiatan pemberian iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Sosial Keagamaan bertujuan untuk melindungi para pekerja tersebut dari kecelakaan kerja

Tindak Lanjut : Perlunya kerjasama antara Pemerintah dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.



2. **Sasaran** : **Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis**
Indikator : **Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan duluar pengadilan**

Kegiatan : Peringatan Hari Buruh Internasional

Waktu Pelaksanaan : 30 April 2025, 01 Mei 2025 dan 06 Mei 2025

Hambatan : Kegiatan peringatan hari buruh internasional diadakan untuk mengapresiasi pekerja dalam hubungan kerja

Tindak Lanjut : Perlunya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait norma dan syarat kerja yang ada di Perusahaan agar mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

1. Istighosah tanggal 30 April 2025



2. Tabur Bunga tanggal 01 Mei 2025



3. Sarasehan tanggal 06 Mei 2025



2. **Sasaran** : **Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis**
Indikator : **Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan**

Kegiatan : Rapat Kerja Anggota LKS Tripartit

Waktu Pelaksanaan : 17 Juni 2025

Hambatan : Rapat kerja Anggota LKS Tripartit ditujukan untuk memberikan solusi terkait isu – isu yang terjadi

Tindak Lanjut : Perlunya persamaan persepsi antara anggota LKS Tripartit terkait penanganan isu – isu yang terjadi



2. **Sasaran** : **Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis**
Indikator : **Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan**

Kegiatan : Kegiatan Sosialisasi Pemberian Bantuan Iuran serta Penyerahan Simbolis Kartu BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sosial Keagamaan

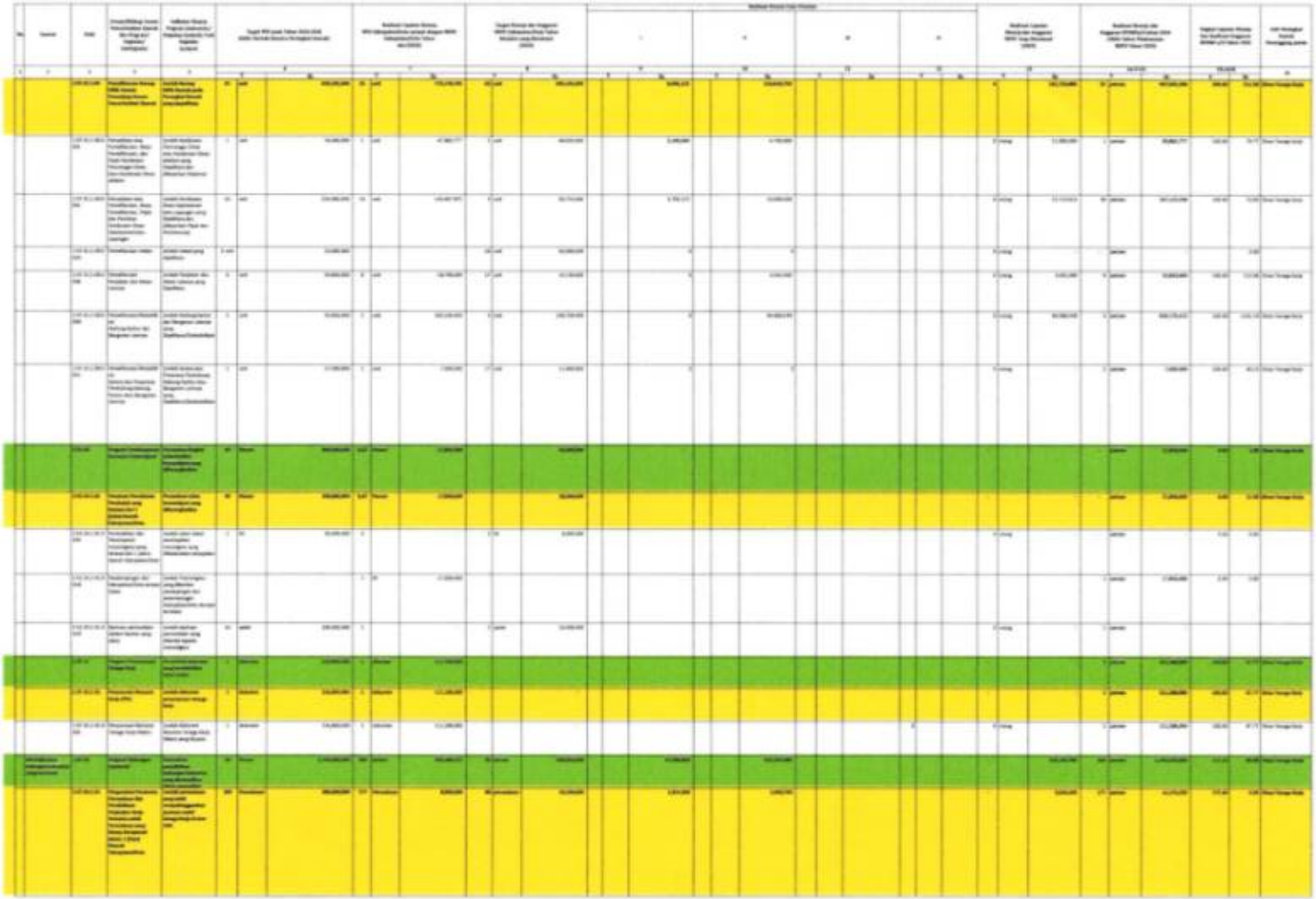
Waktu Pelaksanaan : 24 Juni 2025

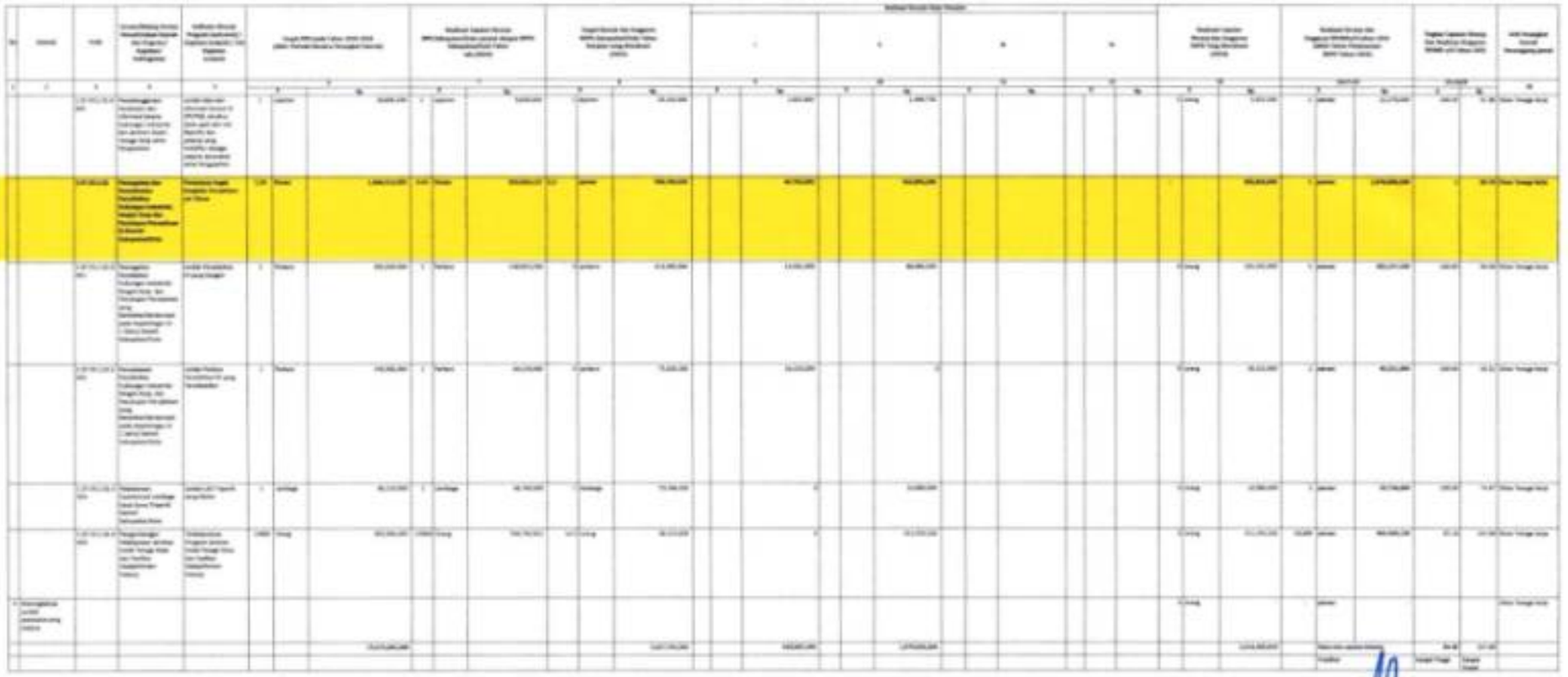
Hambatan : Kegiatan pemberian iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Sosial Keagamaan bertujuan untuk melindungi para pekerja tersebut dari kecelakaan kerja

Tindak Lanjut : Perlunya kerjasama antara Pemerintah dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.



DINAS TENAGA KERJA





DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN EVALUASI RENJA
TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2025

JL. Dermojoyo Nomor 45 Nganjuk
Telp / Fax : 0358 -325200
Web : disnaker.nganjukkab.go.id
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id

DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN EVALUASI RENJA
TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2025

JL. Dermojoyo Nomor 45 Nganjuk
Telp / Fax : 0358 -325200
Web : disnaker.nganjukkab.go.id
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

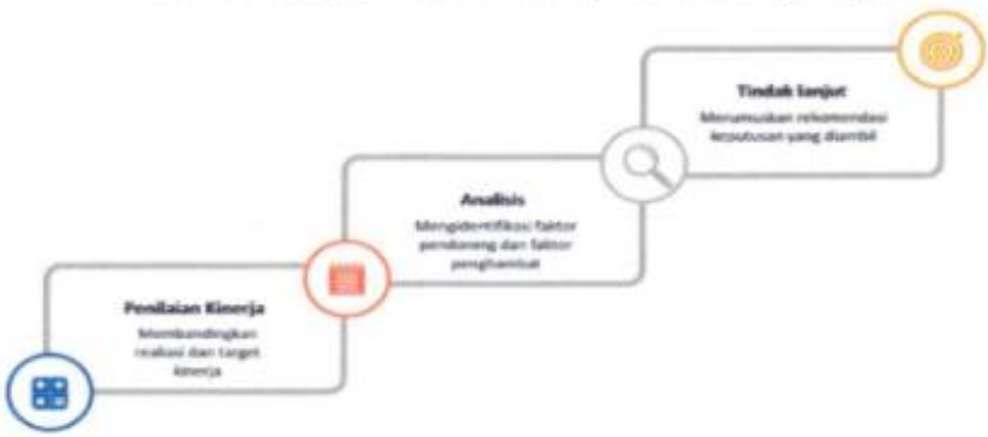
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sampai triwulan III melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

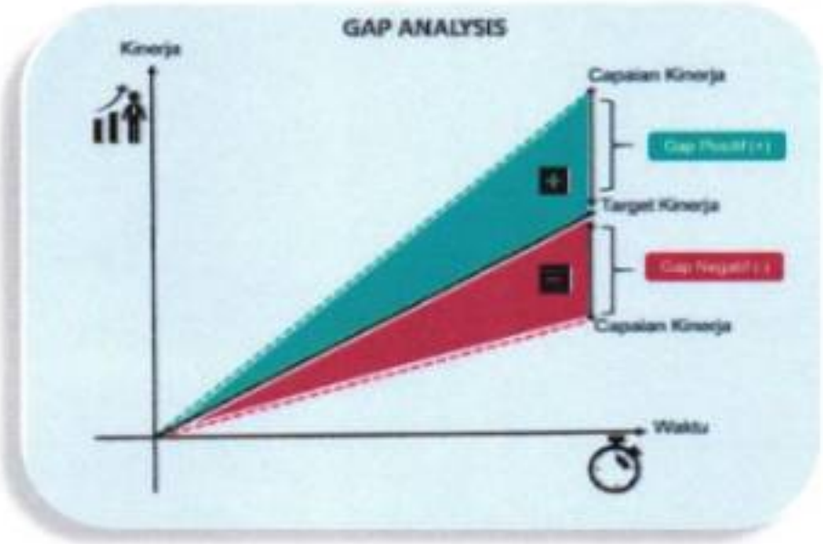
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Dinas Tenaga Kerja maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Tujuan :** Meningkatnya kesempatan kerja dan produktoivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	35,86%		
2	**Sasaran 1 :** Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,11		
	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	100%	100%	100%

- Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

  Dalam pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja triwulan III Tahun 2025, realisasi Tingkat produktivitas tenaga kerja belum bisa dihitung karena data dari BPS belum terbit dan dan sasaran pertama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga belum dapat diralisasikan karena data dari BPS juga belum terbit.

Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan telah terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan III		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**76,00**	71,20	93,95
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**26 laporan**	21 laporan	80,76
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**18 laporan**	15 laporan	83,33
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	**8 laporan**	6 laporan	75
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun**	**4 dokumen**	3 dokumen	75

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan III		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	300 orang	162 orang	54
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/smesteran	4 laporan	3 laporan	75
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**23 dokumen**	17 dokumen	73,91
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	3 paket	75
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	3 paket	75

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan III		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	3 dokumen	75
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	3 laporan	75
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	3 laporan	75
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 dokumen	1 dokumen	75
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**63 unit**	**63 unit**	**100**
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	50 unit	50 unit	100
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit peralatan dan	10 unit	10 unit	100

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan III		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
					Lainnya	mesin lainnya yang disediakan			
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit	100
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**12 laporan**	9 laporan	75
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	3 laporan	75
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	3 laporan	75
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	3 laporan	75
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**28 unit**	20 unit	

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan III		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
					Pemerintah Daerah				
2	**07**	**01**	**2.09**	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	100
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	7 unit	70
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	2 unit	100
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	4 unit	80
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	100
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	4 unit	80

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan III		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**				
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi**	**52,8%**	**0**	**0**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah pencari kerja terdaftar yang terlatih**	**585 orang**	**350 orang**	**59**
2	**07**	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	585 orang	470 orang	59
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi**	45 perusahaan	45 perusahaan	100
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	45 perusahaan	45 perusahaan	100
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas**			

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan III		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas	15 perusahaan	15 perusahaan	100
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten**			
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencari kerja yang mendapatkan pemagangan kerja**			
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	50 orang	50 orang	100
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	40 orang	40 orang	100

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan III		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	20 orang	20 orang	100
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase cakupan penyebarluasan informasi pasar kerja**			
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1.000 orang	693 orang	69,3
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi**			
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna yang diperdayakan	20 orang	20 orang	100
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Angka Sengketa Perusahaan Pertahun**	**0,5%**	**0%**	**100**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk**	Jumlah Perusahaan yang memiliki LKS Bipartiatif	8 perusahaan	18 Perusahaan	225

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan III		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
					Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan daran HI)	1 laporan	1 Laporan	100
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Perselisihan yang tertangani di PB**	**25%**	100%	498
2	**07**	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	1 perkara	4 Perkara	400
2	**07**	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisiajn	Jumlah Perkara perselisihan	1 perkara	1 Perkara	100

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan III		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
					Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	yang terselesaikan			
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	1 Lembaga	100
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	3.925 orang	5.369 orang	136
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**				
3	32				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**				
3	32	03			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**7%**	**0%**	**0**
3	32	03	2.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu)**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**7%**	**0%**	**0**

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan III		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
					Daerah Kabupaten/Kota				
3	32	03	**2.01**	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yangbersal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon Transmigran yang didipindahkan/ditempatkan	**2 KK**	0	0
3	32	03	**2.01**	0019	Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada Tranmigran	-	-	-

➢ Analisis capaian kinerja Program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Dalam pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator inedeks kepuasan masyarakat (IKM) telah terealisasi sebagai berikut :

No.	OPD/UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI IKM	KATEGORI	JUMLAH RESPONDEN	METODE SKM	UNSUR PRIORITAS PERBAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS TENAGA KERJA	89,16	A (Sangat Baik)	294	Sukma e-Jatim (SKM Online)	1. Sarana dan Prasarana	Unsur Sarana dan Prasarana: • Penambahan

No.	OPD/UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI IKM	KATEGORI	JUMLAH RESPONDEN	METODE SKM	UNSUR PRIORITAS PERBAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
							perangkat keras personal computer untuk akses Aplikasi sehingga meminimalisir antrian pemohon
						2. Waktu Penyelesaian	Unsur Waktu Penyelesaian: • Memberikan pemahaman kepada Calon PMI maupun PPTKIS terkait kelengkapan berkas yang baik dan benar guna meminimalisir proses upload ulang
						3. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	Unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan: • Tim teknis akan terus memantau kinerja layanan, mengidentifikasi dan

No.	OPD/UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI IKM	KATEGORI	JUMLAH RESPONDEN	METODE SKM	UNSUR PRIORITAS PERBAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
							mengatasi masalah yang mungkin muncul, dan melakukan pembaruan atau perbaikan sesuai kebutuhan.

Capaian Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan belum terealisasi hal ini dikarenakan kuota penempatan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah terting dan Transmigrasi hanya 1 KK dan rencana akan diberangkatkan pada bulan Desember 2025.

- Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

  Realisasi di tahun 2025 pada triwulan III pada indikator Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi telah dilaksanakan 4 kegiatan yaitu kegiatan pelatihan berbasis kompetensi di industri dengan jumlah peserta 40 orang disetiap angkatannya, pelatihan menjahit dengan jumlah peserta 15 orang disetiap angkatannya, pelatihan las dan pelatihan barbershop dengan jumlah peserta masing masing 20 orang. Jadi untuk target di triwulan III sudah tercapai.

  Untuk indikator Jumlah perselisihan yang dicegah telah dilakukan kegiatan peringatan hari buruh internasional, tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk memberikan apresiasi kepada pekerja. Sehingga kegiatan tersebut mampu menekan angka perselisihan hubungan industrial di perusahaan.

➢ Analisis realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan III		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	4.408.911.957	2.731.725.362,58	
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**15.732.000**	4.110.000	26,13
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.224.000	4.110.000	49,96
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah laporan evaluasi	7.508.000	0	0

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan III		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Daerah	kinerja perangkat daerah			
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun**	**2.769.294.619**	**1.462.713.492**	**7,70**
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.765.166.619	1.462.713.492	52,9
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/smesteran	4.128.000	0	0
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian**	**273.180.038**	**172.643.935**	**63,2**

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan III		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
						Umum yang Dilaksanakan			
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	753.000	549.000	72,91
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63.668.878	41.198.835	64,71
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9.219.160	7.814.900	84,77
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.000.000	1.750.000	58,33
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	6.000.000	4.100.000	68,33

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan III		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
						Kunjungan Tamu			
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.539.000	117.231.200	66,41
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	14.000.000	0	0
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**496.566.800**	**471.965.010**	95,05
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	38.382.300	37.462.500	97,6
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	444.878.850	434.502.510	96,67
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor	13.305.650		

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan III		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau bangunan lainnya yang disediakan			
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**481.130.000**	324.405.638	67,43
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.390.000	1.420.000	59,41
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30.000.000	30.000.000	100
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	448.740.000	292.985.638	65,29

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan III		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**373.008.500**	**295.887.287**	**79,32**
2	**07**	**01**	**2.09**	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	48.650.000	22.850.000	46,97
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	94.508.500	49.370.568	52,24
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	3.000.000	3.000.000	100
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.150.000	7.823.100	77,07

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan III		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	209.700.000	209.493.619	99,9
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.000.000	3.350.000	47,86
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi**	**1.977.642.900**	**1.498.468.316**	**75,77**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah pencari kerja terdaftar yang terlatih**	**1.867.845.900**	**1.431.891.066**	**76,66**
2	**07**	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	1.867.845.900	1.431.891.066	76,66

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan III		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Kompetensi				
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK Swasta yang dibina**	**79.850.000**	**66.577.250**	**83,38**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	79.850.000	66.577.250	83,38
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas**	**29.947.000**	**0**	**0**
2	**07**	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas	29.947.000	0	0
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja**	**658.385.800**	**578.872.745**	**87,92**

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan III		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
						dalam wilayah kabupaten			
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**397.852.800**	**321.293.800**	**80,76**
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	45.975.000	1.600.000	3,48
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	286.916.000	263.586.000	91,87
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	64.961.800	56.107.800	86,37

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan III		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online**	**179.125.000**	**176.439.945**	**98,50**
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	179.125.000	176.439.945	98,50
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang terfasilitasi**	**81.408.000**	**81.139.000**	**99,67**
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diperdayakan	81.408.000	81.139.000	99,67
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**1.660.531.800**	**1.057.386.424**	63,68
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan**	Jumlah Perusahaan yang telah	**19.130.000**	10.716.700	56,02

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan III		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%			
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan coran HI)	19,130.000	10.716.000	56,02
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun	**1.541.401.800**	**1.046.669.724**	**63,77**

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan III		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	205.571.600	156.518.600	76,14
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	30.723.000	26.323.000	85,68
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	80.209.000	47.239.000	58,89
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan	Terlaksananya program	1.324.896.200	816.569.124	61,63

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan III		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja			
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**		**28.000.000**	**0**	**0**
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**		**28.000.000**	**0**	**0**
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**28.000.000**	**0**	**0**
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**28.000.000**	**0**	**0**
3	32	03	**2.01**	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu)	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan	8.000.000	0	0

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan III		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Daerah Kabupaten/Kota	Penjajakan			
3	32	03	**2.01**	0019	Bantuan Permodalan (dalam bentuk uang saku)	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota sampai ke lokasi	20.000.000	0	0
						JUMLAH	**8.733.472.457**	**5.866.452.847, 58**	**67,17**

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	peningkatan produktivitas didukung oleh tenaga kerja yang terampil, termotivasi, sehat, dan memiliki fasilitas serta lingkungan kerja yang mendukung.	kurangnya motivasi, keterampilan yang rendah, keterbatasan teknologi, pengawasan yang tidak memadai, serta kondisi kerja yang buruk dan upah yang tidak memuaskan
2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	peningkatan investasi, peningkatan nilai produksi, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan (Indeks Pembangunan Manusia/IPM), serta adanya kebijakan pemerintah yang mendukung ketenagakerjaan, seperti pemberian modal dan pengaturan upah.	rendahnya mutu dan daya saing SDM, ketidaksesuaian antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja, keterbatasan sektor pertumbuhan ekonomi yang padat karya, tingginya biaya tenaga kerja seperti upah minimum, serta kurangnya investasi dan modal usaha yang membatasi ekspansi perusahaan.
3	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Memberikan arahan kepada Perusahaan agar sistem kerja sesuai	Pemantauan sistem kerja maupun jalannya produksi Perusahaan apakah sudah

		Ketenagakerjaan yang berlaku.	Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku atau belum.

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**		
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan	Kegiatan rutin dilaksanakan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Penggandaan	setiap bulan	bulan
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	07	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Lapangan		
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**		
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Banyaknya kebutuhan atas pencari kerja yang berkompeten	Masih cukup banyaknya masyarakat yang belum menjadi tenaga kerja mandiri karena terhambat di sisi permodalan dan alat produksi.
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	Banyaknya kebutuhan atas pencari kerja yang berkompeten	Masih cukup banyaknya masyarakat yang belum menjadi tenaga kerja mandiri karena terhambat di sisi permodalan dan alat produksi.
2	**07**	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Banyaknya kebutuhan atas pencari kerja yang berkompeten	Permasalahan pada sub ini yaitu masih cukup banyaknya masyarakat yang belum menjadi

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
							tenaga kerja mandiri karena terhambat di sisi permodalan dan alat produksi.
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Masih rendahnya kualitas LPK karena belum memenuhi standar akreditasi	Masih banyaknya LPK yang beranggapan bahwa pemenuhan standar akreditasi prosesnya rumit dan memakan biaya yang tinggi
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Masih rendahnya kualitas LPK karena belum memenuhi standar akreditasi	Masih banyaknya LPK yang beranggapan bahwa pemenuhan standar akreditasi prosesnya rumit dan memakan biaya yang tinggi
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Hasil pengukuran produktivitas pada Perusahaan kecil dapat digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan usaha	Perusahaan kecil masih belum menyadari pentingnya pengukuran tingkat produktivitas

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Masih banyaknya perusahaan kecil yang belum memahami cara mengukur produktivitas	Beberapa agenda prioritas Bidang Penta mengalami penjadwalan ulang, sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami pergeseran waktu untuk menghindari tumpang tindih kegiatan
2	07	04			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Meningkatnya kesempatan kerja di sektor industry manufaktur seiring dengan bergesernya / relokasi industry padat karya ke Kabupaten Nganjuk	Tidak sesuai kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
2	07	04	2.01		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Masih banyaknya pencari kerja terdaftar yang belum ditempatkan	Kurangnya kompetensi petugas antar kerja dalam memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Masih rendahnya kompetensi petugas antar	Beberapa agenda prioritas Bidang Penta mengalami penjadwalan

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						kerja dalam penyuluhan / bimbingan jabatan bagi pencari kerja	ulang, sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami pergeseran waktu untuk menghindari tumpang tindih kegiatan
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Tidak sesuai kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja	Terdapat efisiensi anggaran sehingga pencapaian target tidak tercapai sebagaimana yang direncanakan
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Perusahaan masih belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban mereka untuk mempekerjakan tenaga kerja disabilitas	Proses pendataan dan verifikasi peserta dari kalangan disabilitas memerlukan koordinasi lintas pihak serta pendekatan khusus, sehingga memerlukan waktu lebih lama dari yang direncanakan
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Tersedianya platform digital informasi pasar kerja seperti Karirhub, MERGAWE maupun melalui kanal media sosial	Tidak maksimalnya pemanfaatan platform baik pencari kerja maupun pemberi kerja

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						OPD	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Tersedianya lowongan pekerjaan dalam jumlah yang besar dalam satu kegiatan	Terdapat perusahaan peserta job fair yang tidak menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja
2	07	04	2.04		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Masih tingginya minat Masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk bekerja sebagai PMI	Masih banyaknya PMI yang kurang mempunyai keterampilan untuk bersaing di pasar kerja
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	PMI purna penempatan belum sepenuhnya diintervensi oleh Dinas sehingga lebih produktif dan berdaya saing	Proses pendataan dan verifikasi peserta dari kalangan PMI purna memerlukan koordinasi lintas pihak serta pendekatan khusus, sehingga memerlukan waktu lebih lama dari yang direncanakan
2	07	05			**Program Hubungan Industrial**		
2	07	05	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Semakin Pedulinya Perusahaan dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis sebagai salah satu	Kurangnya pemahaman pekerja tentang hak dan kewajiban dalam hubungan kerja

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						upaya untuk mencegah kerugian akibat mogok kerja	
2	**07**	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi LKS Bipartit dalam Perusahaan untuk mencegah timbulnya perselisihan hubungan industrial	Kurangnya pemahaman dari sisi pekerja dan pengusaha terkait norma dan syarat kerja
2	**07**	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Peranan LKS Tripartit Kab. Nganjuk saat ini mampu menjawab isu – isu aktual ketenagakerjaan dengan senantiasa melakukan dialog dengan stakeholder ketenagakerjaan	Keterbatasan LKS Tripartit dalam melakukan kunjungan ke perusahaan yang rawan perselisihan hubungan industrial
2	**07**	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan	Kesadaran akan pentingnya perlindungan norma kerja	Pembiayaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Fasilitas

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Pekerja	dalam hal ini Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja sebagai salah satu upaya menjaga keberlangsungan usaha	Kesejahteraan Pekerja masih dipandang sebagai biaya dalam proses produksi barang/jasa
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**		
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**		
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	Pemerataan jumlah penduduk dalam suatu wilayah	Penentuan lokasi dan kuota calon transmigran dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujudnya persebaran penduduk	Jumlah kuota penempatan dan pemberangkatan transmigrasi terbatas
3	32	03	**2.01**	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Memberikan pendampingan calon transmigrasi sampai ke Lokasi penempatan	Tidak terlaksananya penjajakan calon lokasi transmigran

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						transmigran	
3	32	03	**2.01**	0019	Bantuan Permodalan (dalam bentuk uang saku)	Memberikan bantuan permodalan awal pasca penempatan	Tidak terwujudnya bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 beserta *output* dan *outcome*nya, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja; dan
   c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan

3. Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, 6 Oktober 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk

ITSNA SHOFIANI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790404 200312 2 006

IV.2. Tindak Lanjut

1. **Sasaran** : **Meningkatnya jumlah peserta pelatihan yang telah mampu mandiri secara ekonomi**

   Indikator : **Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan**

Kegiatan	:	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (Pelatihan Menjahit, Pelatihan Las, Pelatihan Aneka Street Food, Pelatihan Memasak TMMD)
Waktu Pelaksanaan	:	- Pelatihan Menjahit 24 April 2025 (DAU) - Pelatihan Las 29 April 2025 (DAU) - Pelatihan Aneka Street Food 30 April 2025 (DAU) - Pelatihan Memasak (TMMD) 9 Mei 2025 (DAU)
Hambatan	:	Masih cukup banyak masyarakat yang belum menjadi tenaga kerja mandiri.
Tindak Lanjut	:	Melakukan pendampingan dengan mengelompokkan peserta berdasarkan usaha yang ditekuni untuk memudahkan monitoring dan pengembangan embrio usaha dan juga memberikan bantuan sarana usaha.





Pelatihan Menjahit









Pelatihan Aneka Street Food





Pelatihan Memasak (TMMD)

2. **Sasaran** : **Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis**
Indikator : **Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan**

Kegiatan : Rapat Kerja Anggota Dewan Pengupahan

Waktu Pelaksanaan : 24 Juli 2025

Hambatan : Kegiatan Rapat Kerja Anggota Dewan Pengupahan ditujukan untuk menyelaraskan pendapat antar unsur terkait penetapan UMK Tahun 2026

Tindak Lanjut : Perlunya kerjasama antar unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam merekomendasikan usulan UMK Tahun 2026



DINAS TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN EVALUASI RENJA
TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2025

JL. Dermojoyo Nomor 45 Nganjuk
Telp / Fax : 0358 -325200
Web : disnaker.nganjukkab.go.id
Email : dis_naker@nganjukkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

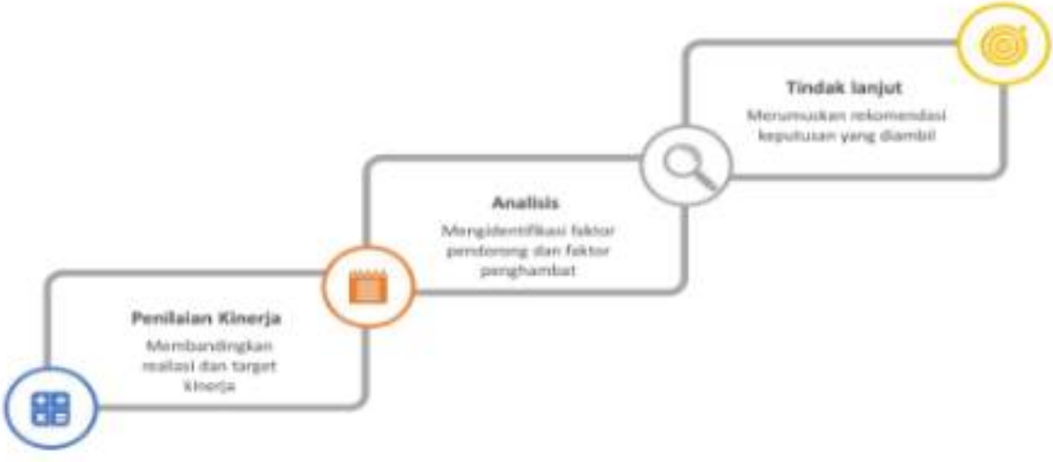
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sampai triwulan IV melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

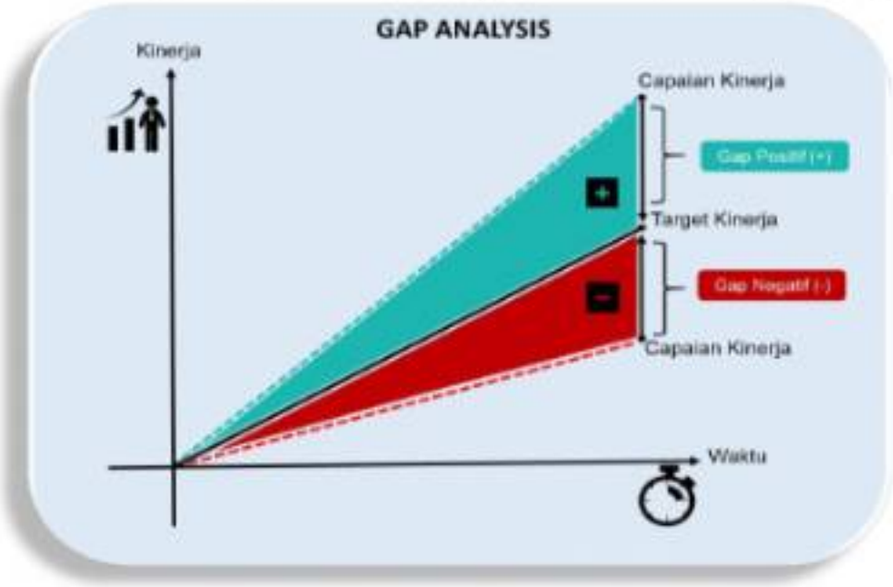
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Dinas Tenaga Kerja maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS TENAGA KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Tujuan :** Meningkatnya kesempatan kerja dan produktiivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	35,86%		
2	**Sasaran 1 :** Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,11	73,19%	104,39%
	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	100%	100%	100%

- Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Dalam pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja triwulan IV Tahun 2025, realisasi Tingkat produktivitas tenaga kerja belum bisa dihitung karena data dari BPS belum terbit.

Sasaran pertama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari target 70,11% dan terealisasi 73,19 % kinerja 104,39% , secara umum, TPAK yang meningkat ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan.

Sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis dengan indikator persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan telah terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Menunjukkan hubungan kerja yang baik dan penyelesaian sengketa yang efektif melalui mediasi/konsiliasi/arbitrase, bukan sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan IV		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**76,00**		
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**26 laporan**	26 laporan	100
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**18 laporan**	18 laporan	100
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	**8 laporan**	8 laporan	100
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun**	**4 dokumen**	4 dokumen	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan IV		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	300 orang	238 orang	79,33
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/smesteran	4 laporan	4 laporan	100
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**23 dokumen**	23 dokumen	100
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan IV		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	4 dokumen	100
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	4 laporan	100
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**63 unit**	**63 unit**	**100**
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	50 unit	50 unit	100
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit peralatan dan	10 unit	10 unit	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan IV		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
					Lainnya	mesin lainnya yang disediakan			
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit	100
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**12 laporan**	12 laporan	100
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan	100
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	100
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	100
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**28 unit**	28 unit	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan IV		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
					Pemerintah Daerah				
2	**07**	**01**	**2.09**	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	100
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	2 unit	100
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	100
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	100
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan IV		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
2	07				Urusan Bidang Tenaga Kerja				
2	07	03			Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	52,8%	0	0
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja terdaftar yang terlatih	590 orang	590 orang	100
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	585 orang	590 orang	100
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi	45 perusahaan	45 perusahaan	100
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	45 perusahaan	45 perusahaan	100
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan IV		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas	15 perusahaan	15 perusahaan	100
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten**			
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencari kerja yang mendapatkan pemagangan kerja**			
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	50 orang	50 orang	100
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	40 orang	40 orang	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan IV		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	20 orang	20 orang	100
2	07	04	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase cakupan penyebarluasan informasi pasar kerja**			
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1.000 orang	693 orang	69,3
2	07	04	2.04		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi**			
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna yang diperdayakan	20 orang	20 orang	100
2	07	05			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Angka Sengketa Perusahaan Pertahun**		**0,43%**	57,3
2	07	05	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk**	Jumlah Perusahaan yang memiliki LKS Bipartibtif	8 perusahaan	20 Perusahaan	250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan IV		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
					Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan daran HI)	1 laporan	1 Laporan	100
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Perselisihan yang tertangani di PB	100	100	100
2	**07**	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	1 perkara	2 Perkara	200
2	**07**	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan	Jumlah Perkara perselisihan	1 perkara	1 Perkara	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan IV		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
					Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	yang terselesaikan			
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	1 Lembaga	100
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	3.925 orang	2.292 orang	58,39
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**				
3	32				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**				
3	32	03			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**7%**	**0%**	**0**
3	32	03	2.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu)**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**7%**	**0%**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi s/d Tribulan IV		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
					Daerah Kabupaten/Kota				
3	32	03	**2.01**	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yangbersal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon Transmigran yang didipindahkan/ditempatkan	**2 KK**	1	50
3	32	03	**2.01**	0019	Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada Tranmigran	-	-	-

➢ Analisis capaian kinerja Program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Dalam pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) telah terealisasi sebagai berikut :

No.	OPD/UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI SKM	KATEGORI	JUMLAH RESPONDEN	METODE SKM	UNSUR PRIORITAS PERBAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS TENAGA KERJA	87,02	B(Baik)	686	Sukma e-Jatim (SKM Online)	1. Sarana dan Prasarana	Unsur Sarana dan Prasarana: • Penambahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	OPD/UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI SKM	KATEGORI	JUMLAH RESPONDEN	METODE SKM	UNSUR PRIORITAS PERBAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
							perangkat keras personal computer untuk akses Aplikasi sehingga meminimalisir antrian pemohon
						2. Waktu Penyelesaian	Unsur Waktu Penyelesaian: • Memberikan pemahaman kepada Calon PMI maupun PPTKIS terkait kelengkapan berkas yang baik dan benar guna meminimalisir proses upload ulang.
						3. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	Unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan: • Tim teknis akan terus memantau kinerja layanan, mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	OPD/UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI SKM	KATEGORI	JUMLAH RESPONDEN	METODE SKM	UNSUR PRIORITAS PERBAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan melakukan pembaruan atau perbaikan sesuai kebutuhan.

Capaian Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan dari 2 KK yang ditargetkan Tahun 2025 hanya 1 KK yang diberangkatkan dikarenakan sesuai dengan kuota penempatan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi . Transmigran berasal dari Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan mendapatkan lahan di Taramanu Tua, kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Realisasi di tahun 2025 pada triwulan IV pada indikator Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi telah dilaksanakan 4 kegiatan yaitu kegiatan pelatihan berbasis kompetensi di industri dengan jumlah peserta 40 orang disetiap angkatannya, pelatihan menjahit dengan jumlah peserta 15 orang disetiap angkatannya, pelatihan las dan pelatihan barbershop dengan jumlah peserta masing masing 20 orang. Jadi untuk target s/d triwulan IV sudah tercapai.

Untuk indikator Jumlah perselisihan yang dicegah telah dilakukan kegiatan peringatan hari buruh internasional, tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk memberikan apresiasi kepada pekerja. Sehingga kegiatan tersebut mampu menekan angka perselisihan hubungan industrial di perusahaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

➢ Analisis realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**4.523.555.988**	**3.819.605.663,77**	**84,43**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**15.732.000**	**13.704.000**	**87,10**
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.224.000	8.214.000	99,87

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7.508.000	5.490.000	73,12
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun**	**2.840.001.000**	**2.167.619.301**	**76,32**
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.840.001.000	2.167.619.301	76,32
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/smeste	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
						ran			
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**	**Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan**	**305.277.788**	**295.205.369**	**96,70**
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5.108.650	4.953.000	96,95
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63.750.978	63.440.035	99,51
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9.219.160	9.167.400	99,43
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen	3.000.000	3.000.000	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.000.000	13.966.900	99,76
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.199.000	186.778.034	95,19
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	14.000.000	13.900.000	99,28
2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**496.566.800**	**484.113.010**	97,49

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	38.382.300	37.462.500	97,6
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	444.878.850	434.502.510	96,67
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	13.305.650	12.148.000	91,29
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**488.854.000**	**486.952.618**	**99,61**
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.390.000	2.390.000	59,41
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	65.000.000	64.841.300	99,75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					air dan listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	421.464.000	419.721.318,19	99,58
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara**	**373.008.500**	**295.887.287**	**79,32**
2	**07**	**01**	**2.09**	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	48.650.000	48.610.578	99,91
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	98.624.400	93.836.068	95,14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	3.000.000	3.000.000	100
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.150.000	10.123.100	99,73
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	209.700.000	209.493.619	99,90
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	7.000.000	6.948.000	99,25

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi			
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi**	**2.152.216.950**	**2.137.258.166**	**99,30**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah pencari kerja terdaftar yang terlatih**	**2.047.219.950**	**2.036.032.916**	**99,45**
2	**07**	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	2.047.219.950	2.036.032.916	99,45
2	**07**	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK Swasta yang dibina**	**75.050.000**	**71.827.250**	**95,70**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	75.050.000	71.827.250	95,70
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi**	**Persentase**	**29.947.000**	**29.398.000**	**98,16**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas**			
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas	29.947.000	29.398.000	98,16
2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten**	**658.385.800**	**641.254.745**	**97,39**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**397.852.800**	**382.675.800**	**96,18**
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	45.975.000	42.982.000	93,48
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	286.916.000	283.586.000	98,83
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	64.961.800	56.107.800	86,37

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online**	**179.125.000**	**177.439.945**	**99,05**
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	179.125.000	177.439.945	99.05
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang terfasilitasi**	**81.408.000**	**81.139.000**	**99,67**
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diperdayakan	81.408.000	81.139.000	99,67
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Perselisihan**	**2.706.621.400**	**2.632.491.235**	**97,26**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
						Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan			
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%	19.130.000	16.617.000	86,96
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (pendataan daran HI)	19,130.000	16.617.000	86,96
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan**	Presentase Angka Sengketa	**2.687.491.400**	**2.615.874.235**	**97,33**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan per Tahun			
2	*07*	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	205.571.600	195.318.600	95,01
2	*07*	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Perselisihan yang dicegah	30.723.000	26.323.000	85,68

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	80.209.000	80.209.000	100
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan social tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	2.370.987.800	2.314.023.000	97,59
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**		**18.000.000**	**18.000.000**	**100**
3	32				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**		**18.000.000**	**18.000.000**	**100**
3	32	03			**Program Pembangunan**	**Persentase tingkat**	**18.000.000**	**18.000.000**	**100**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
					Kawasan Transmigrasi	**keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**			
3	32	03	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**18.000.000**	**18.000.000**	**100**
3	32	03	**2.01**	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	18.000.000	18.000.000	100
3	32	03	**2.01**	0019	Bantuan Permodalan (dalam bentuk uang saku)	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota sampai ke lokasi	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program	Indikator	Realisasi Keuangan s/d Triwulan IV		
							Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
						JUMLAH	10.058.780.138	9.248.609.809,77	91,94

sesuai dengan hasil desk kemarin Monggo bpk/ibu semuanya bisa langsung diisi kertas kerja sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan (knerja bisa langsung dibagi habis ke pelaksana termasuk Paruh waktu), kertas kerja kami tunggu sampai dengan hari Senen tanggal 12 Januari 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	peningkatan kualitas SDM, lingkungan ekonomi yang kondusif, dan pemanfaatan teknologi merupakan pendorong utama tercapainya kesempatan kerja yang lebih luas dan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi	Pertumbuhan Ekonomi yang Lamba, Ketidakcocokan Keterampilan, Investasi Asing yang Rendah, Ketidakpastian Politik dan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Rendah, Infrastruktur yang Kurang Memadai, Akses Terhadap Modal dan Inovasi yang Sulit
2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	peningkatan investasi, peningkatan nilai produksi, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan (Indeks Pembangunan Manusia/IPM), serta adanya kebijakan pemerintah yang mendukung ketenagakerjaan, seperti pemberian modal dan pengaturan upah.	rendahnya mutu dan daya saing SDM, ketidaksesuaian antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja, keterbatasan sektor pertumbuhan ekonomi yang padat karya, tingginya biaya tenaga kerja seperti upah minimum, serta kurangnya investasi dan modal usaha yang membatasi ekspansi perusahaan.
3	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Memberikan arahan kepada Perusahaan	Pemantauan sistem kerja maupun jalannya produksi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		agar sistem kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.	Perusahaan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku atau belum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut:

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat Daerah	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja**		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja**		
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan	Kegiatan rutin dilaksanakan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Penggandaan	setiap bulan	bulan
2	07	01	2.08	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.08	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.08	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	07	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Lapangan		
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan
2	**07**				**Urusan Bidang Tenaga Kerja**		
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Banyaknya kebutuhan atas pencari kerja yang berkompeten	Masih cukup banyaknya masyarakat yang belum menjadi tenaga kerja mandiri karena terhambat di sisi permodalan dan alat produksi.
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	Banyaknya kebutuhan atas pencari kerja yang berkompeten	Masih cukup banyaknya masyarakat yang belum menjadi tenaga kerja mandiri karena terhambat di sisi permodalan dan alat produksi.
2	**07**	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Banyaknya kebutuhan atas pencari kerja yang berkompeten	Permasalahan pada sub ini yaitu masih cukup banyaknya masyarakat yang belum menjadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
							tenaga kerja mandiri karena terhambat di sisi permodalan dan alat produksi.
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Masih rendahnya kualitas LPK karena belum memenuhi standar akreditasi	Masih banyaknya LPK yang beranggapan bahwa pemenuhan standar akreditasi prosesnya rumit dan memakan biaya yang tinggi
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Masih rendahnya kualitas LPK karena belum memenuhi standar akreditasi	Masih banyaknya LPK yang beranggapan bahwa pemenuhan standar akreditasi prosesnya rumit dan memakan biaya yang tinggi
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Hasil pengukuran produktivitas pada Perusahaan kecil dapat digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan usaha	Perusahaan kecil masih belum menyadari pentingnya pengukuran tingkat produktivitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Masih banyaknya perusahaan kecil yang belum memahami cara mengukur produktivitas	Beberapa agenda prioritas Bidang Penta mengalami penjadwalan ulang, sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami pergeseran waktu untuk menghindari tumpang tindih kegiatan
2	07	04			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Meningkatnya kesempatan kerja di sektor industry manufaktur seiring dengan bergesernya / relokasi industry padat karya ke Kabupaten Nganjuk	Tidak sesuai kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
2	07	04	2.01		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Masih banyaknya pencari kerja terdaftar yang belum ditempatkan	Kurangnya kompetensi petugas antar kerja dalam memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Masih rendahnya kompetensi petugas antar	Beberapa agenda prioritas Bidang Penta mengalami penjadwalan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						kerja dalam penyuluhan / bimbingan jabatan bagi pencari kerja	ulang, sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami pergeseran waktu untuk menghindari tumpang tindih kegiatan
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Tidak sesuai kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja	Terdapat efisiensi anggaran sehingga pencapaian target tidak tercapai sebagaimana yang direncanakan
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Perusahaan masih belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban mereka untuk mempekerjakan tenaga kerja disabilitas	Proses pendataan dan verifikasi peserta dari kalangan disabilitas memerlukan koordinasi lintas pihak serta pendekatan khusus, sehingga memerlukan waktu lebih lama dari yang direncanakan
2	07	04	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Tersedianya platform digital informasi pasar kerja seperti Karirhub, MERGAWE maupun melalui kanal media sosial	Tidak maksimalnya pemanfaatan platform baik pencari kerja maupun pemberi kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						OPD	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Tersedianya lowongan pekerjaan dalam jumlah yang besar dalam satu kegiatan	Terdapat perusahaan peserta job fair yang tidak menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja
2	07	04	2.04		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Masih tingginya minat Masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk bekerja sebagai PMI	Masih banyaknya PMI yang kurang mempunyai keterampilan untuk bersaing di pasar kerja
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	PMI purna penempatan belum sepenuhnya diintervensi oleh Dinas sehingga lebih produktif dan berdaya saing	Proses pendataan dan verifikasi peserta dari kalangan PMI purna memerlukan koordinasi lintas pihak serta pendekatan khusus, sehingga memerlukan waktu lebih lama dari yang direncanakan
2	07	05			**Program Hubungan Industrial**		
2	07	05	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Semakin Pedulinya Perusahaan dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis sebagai salah satu	Kurangnya pemahaman pekerja tentang hak dan kewajiban dalam hubungan kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						upaya untuk mencegah kerugian akibat mogok kerja	
2	*07*	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi LKS Bipartit dalam Perusahaan untuk mencegah timbulnya perselisihan hubungan industrial	Kurangnya pemahaman dari sisi pekerja dan pengusaha terkait norma dan syarat kerja
2	*07*	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Peranan LKS Tripartit Kab. Nganjuk saat ini mampu menjawab isu – isu aktual ketenagakerjaan dengan senantiasa melakukan dialog dengan stakeholder ketenagakerjaan	Keterbatasan LKS Tripartit dalam melakukan kunjungan ke perusahaan yang rawan perselisihan hubungan industrial
2	*07*	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan	Kesadaran akan pentingnya perlindungan norma kerja	Pembiayaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Fasilitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Pekerja	dalam hal ini Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja sebagai salah satu upaya menjaga keberlangsungan usaha	Kesejahteraan Pekerja masih dipandang sebagai biaya dalam proses produksi barang/jasa
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**		
3	32				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**		
3	32	03			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	Pemerataan jumlah penduduk dalam suatu wilayah	Penentuan lokasi dan kuota calon transmigran dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi
3	32	03	2.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujudnya persebaran penduduk	Jumlah kuota penempatan dan pemberangkatan transmigrasi terbatas
3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Memberikan pendampingan calon transmigrasi sampai ke Lokasi penempatan	Tidak terlaksananya penjajakan calon lokasi transmigran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode Rekening					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
						transmigran	
3	32	03	**2.01**	0019	Bantuan Permodalan (dalam bentuk uang saku)	Memberikan bantuan permodalan awal pasca penempatan	Tidak terwujudnya bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 beserta *output* dan *outcome*nya, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja; dan
   c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan

3. Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, 12 Januari 2026
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk

ITSNA SHOFIANI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790404 200312 2 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Program** : **Hubungan Industrial**

   Kegiatan : **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

   Pelaksanaan Kegiatan : Register pencatatan pengesahan peraturan perusahaan

   Waktu Pelaksanaan : Bulan Oktober s.d Desember

   Hambatan : Masih banyak perusahaan yang wajib memiliki PP akan tetapi tidak melakukan pencatatan peraturan perusahaan ke Dinas

   Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan kepada perusahaan terkait norma dan syarat kerja di Perusahaan

NO.	BULAN	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR PENCATATAN	MASA BERLAKU	
				AWAL	AKHIR
10	Oktober	PT. Duta Graha Globalindo	500.15.12.1/009/HIPTK-PP/411.311/2025	23 Oktober 2025	23 Oktober 2027
11	November				
12	Desember	KSP Artha Panggung Kencana	500.15.12.1/010/HIPTK-PP/411.311/2025	03 Desember 2025	03 Desember 2025
		PT. Sinta Prima Feedmill	500.15.12.1/011/HIPTK-PP/411.311/2025	10 Desember 2025	10 Desember 2027
		PT. Eagle Sporting Goods	500.15.12.1/012/HIPTK-PP/411.311/2025	30 Desember 2025	30 Desember 2027

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Program** : **Hubungan Industrial**

   Kegiatan : **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

   Pelaksanaan Kegiatan : Pendataan Sarana Hubungan Industrial

   Waktu Pelaksanaan : Bulan Oktober s.d Desember

   Hambatan : Masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan data terbaru ketenagakerjaan ke Dinas

   Tindak Lanjut : Perlu adanya pembinaan norma dan syarat kerja bagi perusahaan

NO	JUMLAH		2024	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Perusahaan Tercatat		330	330	330	330	330	334	334	334	334	339	350	350	350
2	Tenaga Kerja Terdaftar		34.579	34.579	34.579	34.579	34.579	34.887	34.887	34.887	34.887	37.591	38.139	38.139	38.483
3	Peraturan Perusahaan		41	0	1	5	5	6	6	7	9	11	12	12	15
4	Perjanjian Kerja Bersama		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PKWT Tercatat		10.592	387	1.588	2.005	2.594	3.901	4.480	6.888	7.841	8.351	8.661	9.946	11.388
6	LKS Bipartit		32	0	1	3	3	4	4	6	6	6	9	9	10
7	SP/SB Tingkat Perusahaan		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Penyelesaian Hubungan Industrial		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
9	Penyelesaian PHI Penyelesaian Diluar Pengadilan		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10	Mogok Kerja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tenaga Kerja Peserta BPJamsostek		15.585	15.259	15.259	15.259	15.259	15.347	15.347	15.347	15.347	20.716	20.716	20.716	25.006
12	Tenaga Kerja Peserta BPJS Kesehatan										40	19.999	19.799	19.799	20.119
13	PHK	Pencairan JHT	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Laporan dari Perusahaan	1.371	10	11	141	109	884	888	998	1.008	1.028	1.228	1.881	1.888

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

1. **Program** : **Hubungan Industrial**

   Kegiatan : **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan : Rapat Kerja Anggota Dewan Pengupahan

Waktu Pelaksanaan : 18 Desember 2025

Hambatan : Kegiatan Rapat Kerja Anggota Dewan Pengupahan ditujukan untuk menyelaraskan pendapat antar unsur terkait penetapan UMK Tahun 2026

Tindak Lanjut : Perlunya kerjasama antar unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam merekomendasikan usulan UMK Tahun 2026

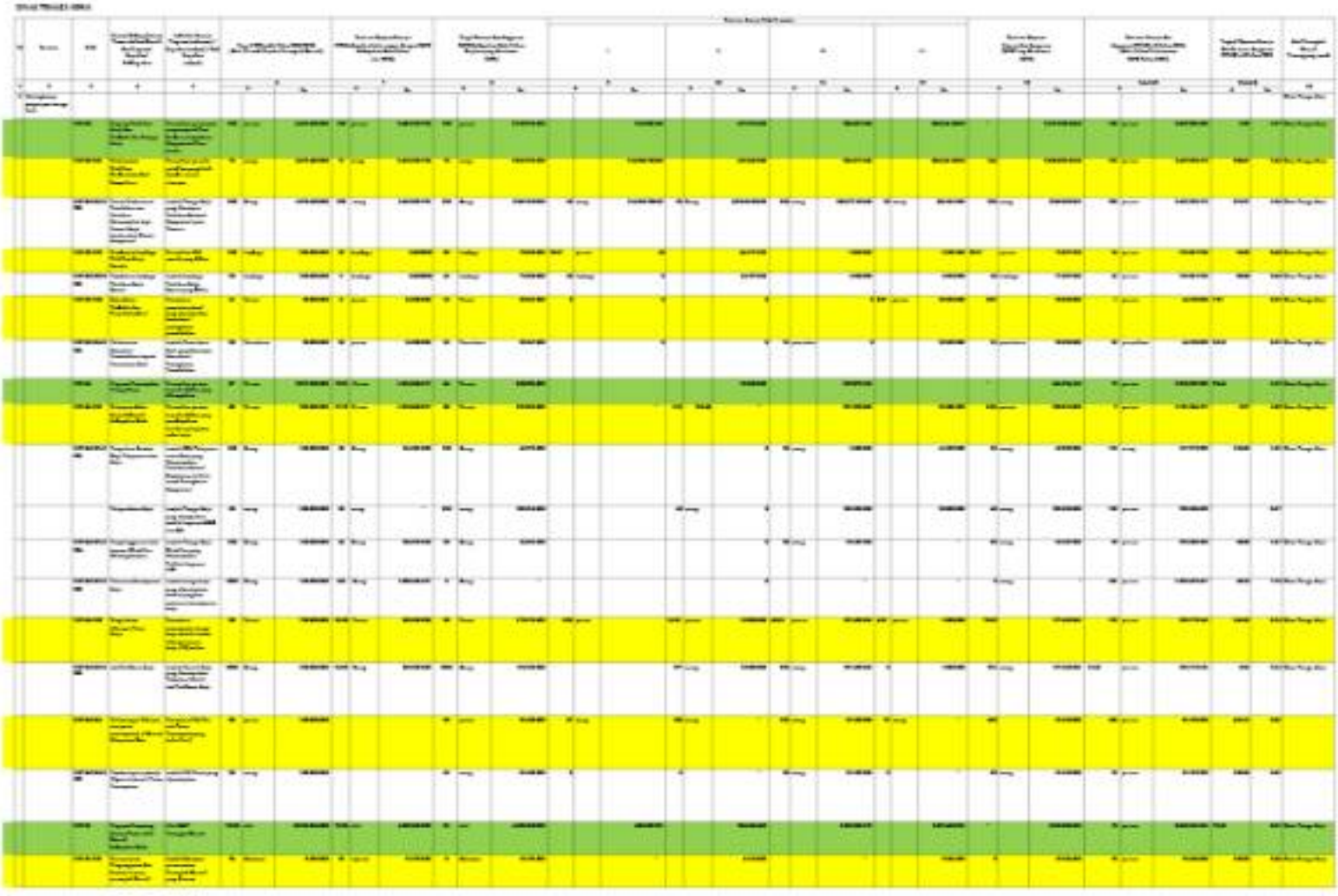


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

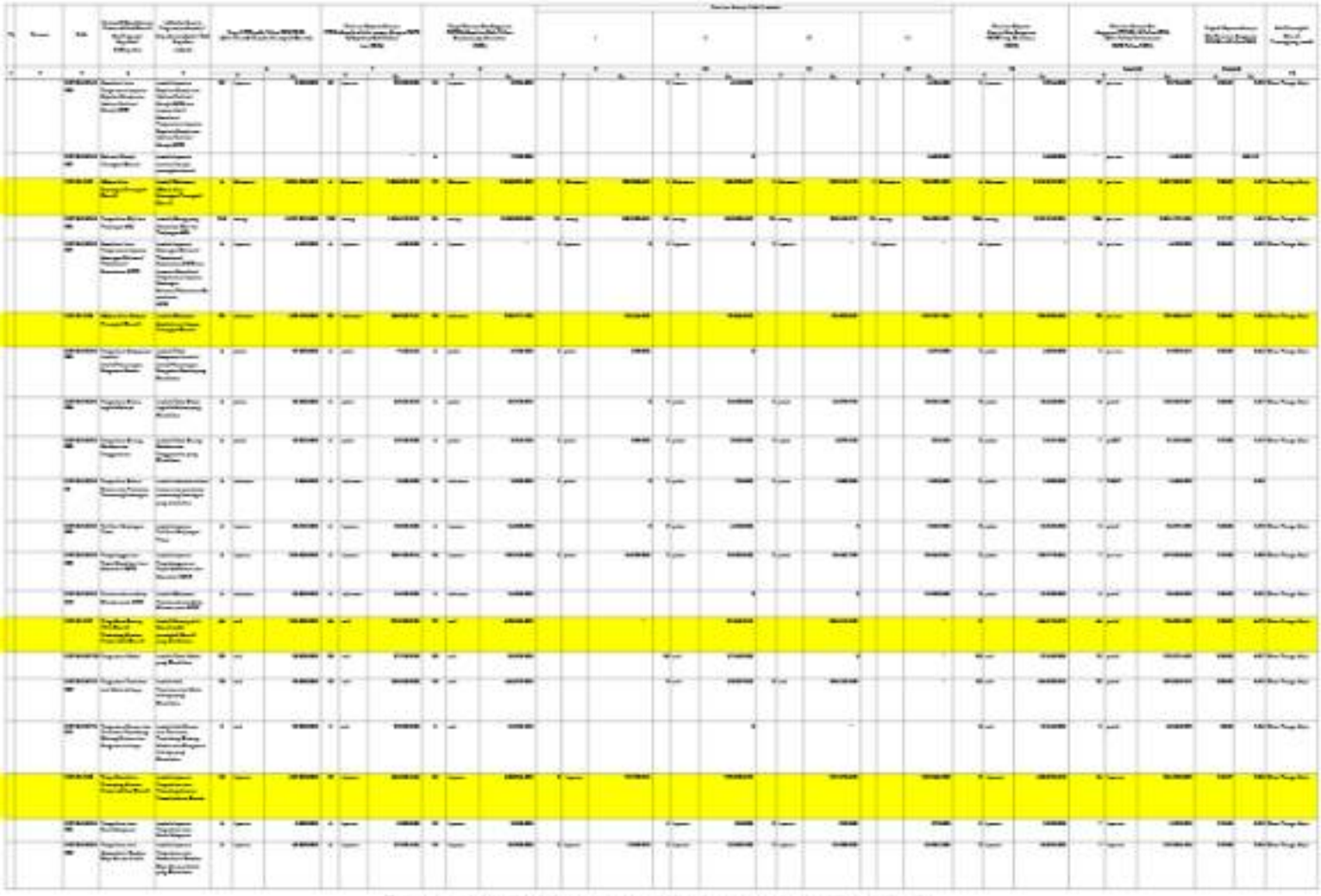
Kegiatan	:	Sosialisasi dan Pemberian Iuran JKK JKM bagi Petani Tembakau dan Pekerja Rentan Lainnya
Waktu Pelaksanaan	:	20 November 2025
Hambatan	:	Kegiatan pemberian iuran JKK dan JKM bagi Petani Tembakau dan Pekerja Rentan Lainnya bertujuan untuk melindungi para pekerja tersebut dari kecelakaan kerja
Tindak Lanjut	:	Perlunya kerjasama antara Pemerintah dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.



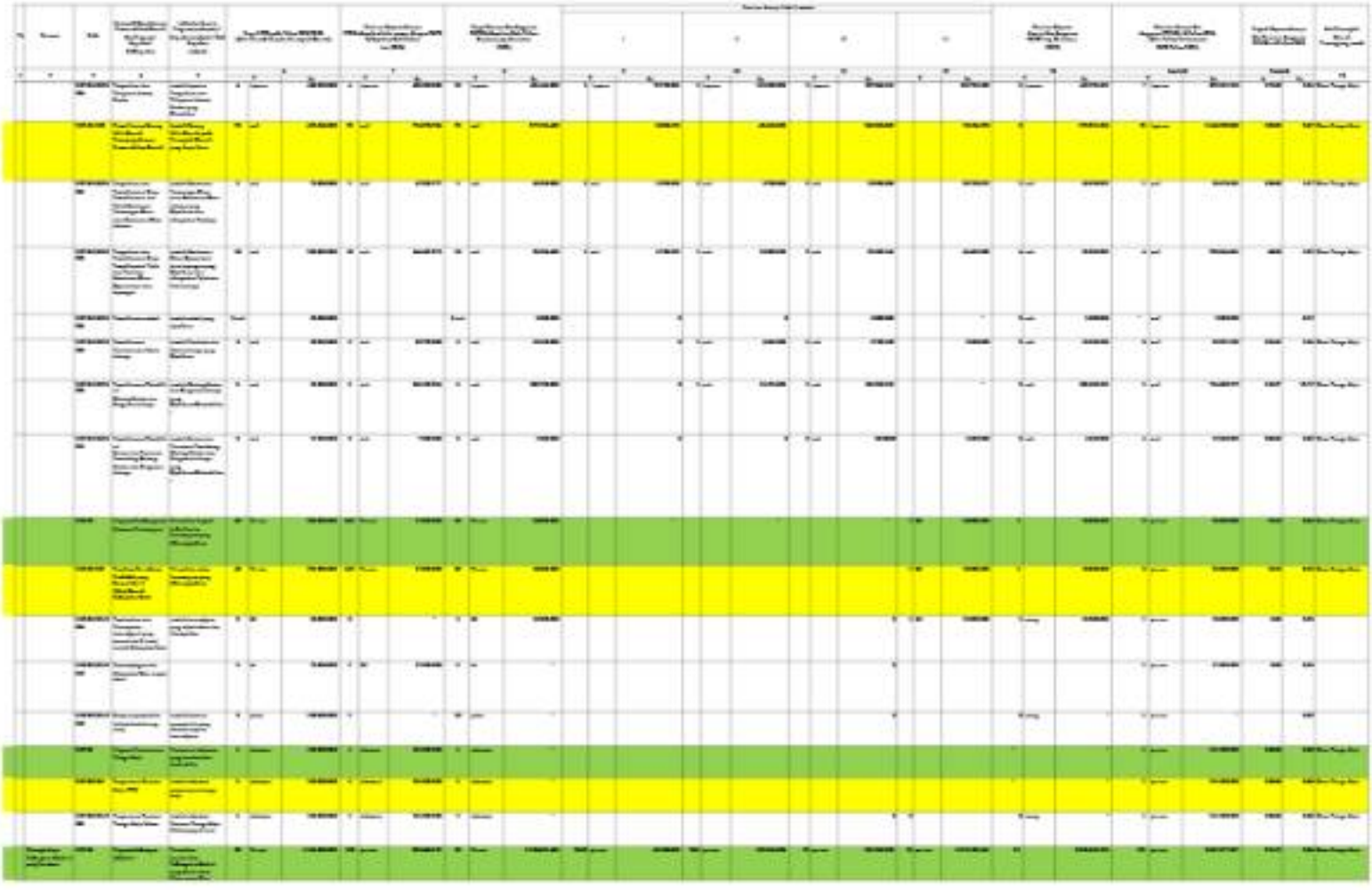
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



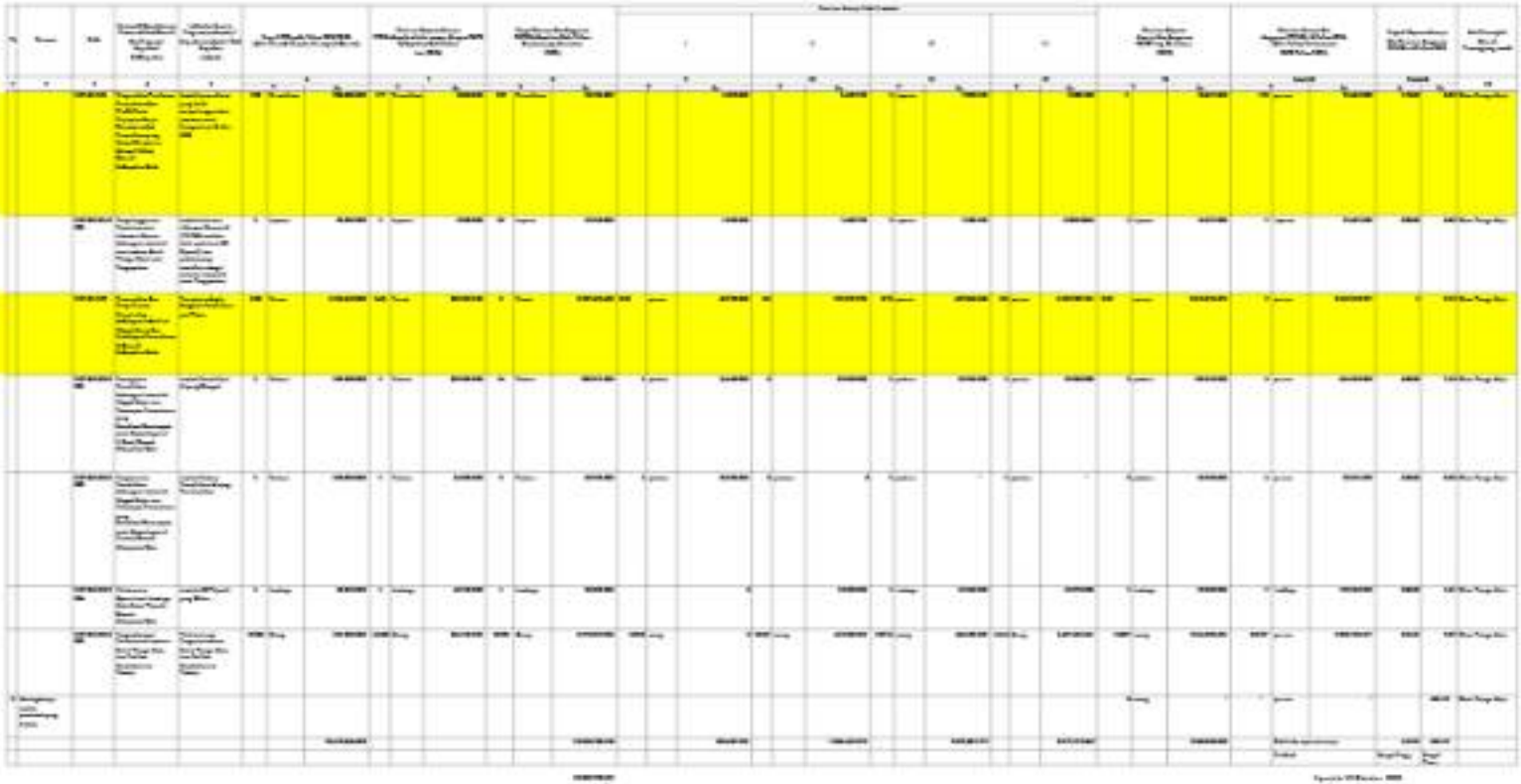
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

LINK BUKTI DUKUNG

LAMPIRAN BUKTI DUKUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Renstra 2024-2026	69,90 %	73,19%	104,71%	https://drive.google.com/file/d/1KC16GfZcLowdUvcVDjo2vmbmzjfGVpA/view?usp=drive_link
2	Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Renstra 2024-2026	75%	77,45%	103,27%	https://drive.google.com/file/d/12fD6OsaeqeBVkimMWAltHBT5UPKS-8NV/view?usp=drive_link
3	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	Renstra 2024-2026	100%	100%	100%	https://drive.google.com/file/d/1X7bAVdEPp5Q8jHXTfIu0BzyhENUmDgU_/view?usp=drive_link
4	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Renstra 2025-2029	35,86 juta Rp/tenaga kerja	35,68 juta Rp/tenaga kerja	99,50%	https://drive.google.com/file/d/1r_PaDOlgMKLnNua-XCZ9VyZPSQ9OxJ8P/view?usp=sharing
5	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Renstra 2025-2029	70,11%	73,19%	104,39%	https://drive.google.com/file/d/1m-GLJWK7XAcfMj-EBBBwu4sLq_8Tc52u/view?usp=drive_link
6	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	Renstra 2025-2029	100%	100%	100%	https://drive.google.com/file/d/1dlb9Gn3oNf7ogdQm3hBMBj2vDQ-LEz6L/view?usp=drive_link

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
7	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	76 nilai	75,20 nilai	98,95%	https://drive.google.com/file/d/1M2Uy6SazrSR1_TNnnw4zl_3PDcvYuzEf/view?usp=sharing
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Renstra 2024-2026	26 dokumen	26 dokumen	100%	https://drive.google.com/file/d/1tdDuhyGUvLwI5fY8RsOsqYGm5HhPqZCC/view?usp=sharing
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Renstra 2024-2026	7 laporan	7 laporan	100%	https://drive.google.com/file/d/1B5nHdHZnrTotzZV7c4SVCDKGkKOC96r_/view?usp=sharing
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Renstra 2024-2026	6 dokumen	6 dokumen	100%	https://drive.google.com/file/d/1eD-WdnvY3VTinXLJOfkwYmTegwzKGb_F/view?usp=sharing
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun	Renstra 2024-2026	48 dokumen	48 dokumen	100%	https://drive.google.com/file/d/1-upYZ1roC3leCyvrecO-8QvDQMrPDt2o/view?usp=drive_link
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Renstra 2024-2026	25 orang	14 orang	77,77%	https://drive.google.com/file/d/1Pu68vJanYqqj1C-dDnLnZaxAD7GLu8mc/view?usp=drive_link

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah	Renstra 2024-2026	7 dokumen	7 dokumen	100%	https://drive.google.com/file/d/1S7M3B0zRm9mZc7V1JXXypoQlC5G19akd/view?usp=sharing
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Renstra 2024-2026	1 paket	1 paket	100%	https://drive.google.com/file/d/1Ed0mmWRVX-wUvPKDsOBfF4nsMwrsmGLn/view?usp=sharing
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Renstra 2024-2026	1 paket	1 paket	100%	https://drive.google.com/file/d/1sPCpfA2F72PHD4_ILASdjz4KwGmCRKSC/view?usp=sharing
16	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Renstra 2024-2026	1 paket	1 paket	100%	https://drive.google.com/file/d/1D18vVeczYtpFY_IlVnfdLGYAvnL086XO/view?usp=sharing
17	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Renstra 2024-2026	1 dokumen	1 dokumen	100%	https://drive.google.com/file/d/1tMVTUi1MVDM0-Tde51R8Y0OL_MRIVsUX/view?usp=sharing
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Renstra 2024-2026	1 laporan	1 laporan	100%	https://drive.google.com/file/d/1GnaNWA3MkvzNvu7YQH-c7hiZ961H0b-a/view?usp=sharing
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Renstra 2024-2026	1 laporan	1 laporan	100%	https://drive.google.com/file/d/1k04V2CGN05g6vaY7A-yCAlmCl99WEVze/view?usp=sharing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Renstra 2024-2026	1 dokumen	1 dokumen	100%	https://drive.google.com/file/d/1RNLEBst0PtqPBCTESe-IzqaOnIRNJCSo/view?usp=sharing
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	Renstra 2024-2026	97 unit	97 unit	100%	https://drive.google.com/file/d/161u6IsshjqVcMkz81glw8OA2fLE8kBOb/view?usp=sharing
22	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Renstra 2024-2026	150 unit	150 unit	100%	https://drive.google.com/file/d/1L7vga6ChuEUZ5aCCH_unAdDMar5N9kiF/view?usp=sharing
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Renstra 2024-2026	35 unit	35 unit	100%	https://drive.google.com/file/d/1O1zuqMfognylhktWRWqU3AowePc3zJvD/view?usp=sharing
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Renstra 2024-2026	12 unit	12 unit	100%	https://drive.google.com/file/d/1UNP4E1ge76c0Wi5z08evHk9G_E9DwYaJ/view?usp=sharing
25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Renstra 2024-2026	14 laporan	14 laporan	100%	https://drive.google.com/file/d/161u6IsshjqVcMkz81glw8OA2fLE8kBOb/view?usp=sharing
26	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Renstra 2024-2026	1 dokumen	1 dokumen	100%	https://drive.google.com/file/d/1Smgdp29LEgLiOygOHhF6Y5XT1WNP6Vz_/view?usp=sharing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
27	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Renstra 2024-2026	1 laporan	1 laporan	100%	https://drive.google.com/file/d/1yaNlmfqpV5RWho2Tz-QRrvRE6KQxf5TN/view?usp=sharing
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Renstra 2024-2026	12 laporan	12 laporan	100%	https://drive.google.com/file/d/1tvcRQhjVVQongkMwdrFyfbZfMXIIV2z7/view?usp=sharing
29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara	Renstra 2024-2026	28 unit	28 unit	100%	https://drive.google.com/file/d/1nS4taI70i1OZ8ov7jmPp0Td3baPzXY4X/view?usp=sharing
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Renstra 2024-2026	1 unit	1 unit	100%	https://drive.google.com/file/d/1zENperdxnQdz1w7rzfAWp8yoIN05w2IB/view?usp=sharing
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Renstra 2024-2026	10 unit	10 unit	100%	https://drive.google.com/file/d/1r4ewG6OwYcw1OV9ThLmv4r7J9QaIN1l/view?usp=sharing
32	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Renstra 2024-2026	5 unit	5 unit	100%	https://drive.google.com/file/d/1O1mqMtogmvIbktWRWqU3AowePc3zJvD/view?usp=sharing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Renstra 2024-2026	5 unit	3 unit	100%	https://drive.google.com/file/d/1yrg1TCEiY0n6Hj1SWwHSRoTkYr-sQCyf/view?usp=sharing
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Renstra 2024-2026	5 unit	5 unit	100%	https://drive.google.com/file/d/13tTQYU71skYXATE_UjY0mDqJ0e1Vs4HG/view?usp=sharing
35	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan	Renstra 2024-2026	15%	6,67%	44,49%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
36		Jumlah pencari kerja terdaftar yang bertransformasi menjadi tenaga kerja mandiri	Renstra 2024-2026	200 orang	489 orang	244,5%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
37		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Renstra 2025-2029	52,80%	46,47%	88,02%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
38	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja terdaftar yang terlatih	Renstra 2024-2026	440 orang	550 orang	125%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
39		Jumlah tenaga kerja mandiri yang kompeten	Renstra 2024-2026	275 orang	489 orang	124,74%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
							4u4GvOpzLzKAbL3HZXx p
40		Jumlah tenaga kerja mandiri yang mendapat NIB	Renstra 2024-2026	2 orang	13 orang	650%	https://drive.google.com/drive/folders/1f9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
41		Jumlah tenaga kerja mandiri terakses permodalan	Renstra 2024-2026	5 orang	0 orang	0%	https://drive.google.com/drive/folders/1f9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
42	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Renstra 2024-2026	140 orang	550 orang	392,86%	https://drive.google.com/drive/folders/1f9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
43	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi	Renstra 2024-2026	3 lembaga	7 Lembaga	233,33%	https://drive.google.com/drive/folders/1f9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
44	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	Renstra 2024-2026	45 lembaga	45 Lembaga	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1f9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
45	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas	Renstra 2024-2026	11%	16,46%	149,64%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
46	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas	Renstra 2024-2026	15 perusahaan	13 Perusahaan	86,67%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
47	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Renstra 2024-2026	96,41%	96,16%	99,74%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
48		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	Renstra 2025-2029	75%	77,45%	103,27%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
49	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pemagangan kerja	Renstra 2024-2026	87%	0,49%	0,56%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
50	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	Renstra 2024-2026	50 orang	50 orang	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
51	Pelayanan antar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Renstra 2024-2026	60 orang	40 orang	66,67%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
52	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Renstra 2024-2026	40 orang	20 orang	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
53	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase cakupan penyebarluasan informasi pasar kerja	Renstra 2024-2026	85%	13,09%	15,40%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
54	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	Renstra 2024-2026	1.000 orang	675 orang	67,50%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
55	Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan yang terfasilitasi) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (pra dan purna penempatan yang terfasilitasi) yang terfasilitasi	Renstra 2024-2026	85%	100%	117,65%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
56	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna penempatan	Jumlah PMIpurna yang diberdayakan	Renstra 2024-2026	20 orang	20 orang	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
57	Program Hubungan Industrial	Persentase angka sengketa perusahaan pertahun	Renstra 2024-2026	2,3%	0,8%	111,11%	https://drive.google.com/file/d/122tnskvjbS_xnBAb70oGSLpjW1kbDJvh/view?usp=sharing
58		Persentase PP/PKB yang memuat syarat kerja	Renstra 2024-2026	100%	100%	100%	https://drive.google.com/file/d/183JU1O1LnKKV882cF5Q

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
							2g8kR-67Ep9ay/view?usp=sharing
59		Persentase penselisihan hubungan industrial yang selesai dengan Perjanjian Bersama (PB)	Renstra 2025-2029	90,1%	100%	110,99%	https://drive.google.com/file/d/1hE5gB0H4fH1J6KrD6tRn_0XmEDfUol3M/view?usp=sharing
60		Cakupan Kepertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaaan	Renstra 2025-2029	27,46%	28,30%	103,06%	https://drive.google.com/file/d/11XEDIun1mgQT1ge9vA2ba-ycLmqpm4kK/view?usp=sharing
61		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Renstra 2025-2029	55%	60,34%	109,71%	https://drive.google.com/file/d/10IYHcAzs9LKc59nMr2LWQLZxDsK_D3Ba/view?usp=sharing
62	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki LKS Bipartit Aktif	Renstra 2024-2026	100 Perusahaan	26 Perusahaan	26%	https://drive.google.com/file/d/1y0XzW6e83UfDwteAsombfUCur0cdfFgO/view?usp=sharing
63		Jumlah Perusahaan yang memiliki PP / PKB	Renstra 2024-2026	9 Perusahaan	17 Perusahaan	188,89%	https://drive.google.com/file/d/1eL1OPQ_AozvcLjyevUbq6oylhD50irzj/view?usp=sharing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
64		Persentase Tenaga Kerja yang memiliki jaminan perlindungan	Renstra 2024-2026	85%	81,19%	95,52%	https://drive.google.com/file/d/1U29hldIbhg-dAz2ckch-Bjr7dDLKBHUT/view?usp=sharing
65	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	Renstra 2024-2026	45 Perusahaan	15 Perusahaan	33,33%	https://drive.google.com/file/d/1-k_2nIHW9V1ZP7AQNnLK9FDeqwY0w4q-z/view?usp=sharing
66	Perjanjian kerja bersama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun PKB	Renstra 2024-2026	45 Perusahaan	0	0	https://drive.google.com/file/d/1QCH5kCyNHACRx_MwUmpzzs5HIFwtSQmM/view?usp=sharing
67	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data informasi sarana HI (PP/PKB) struktur skala upah dan LKS Bipartit dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	Renstra 2024-2026	1 Laporan	25 Laporan	2500%	https://drive.google.com/file/d/1f6mm_lQqEZxL4-CSkOiR_7WlFwl5cGPy/view?usp=sharing
68	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan yang tertangani di PB	Renstra 2024-2026	**90%**	100%	111,11%	https://drive.google.com/file/d/1GEcMGm9jGdMoMJSxmL8IPtWytR9AEJ3D/view?usp=sharing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
69	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	Renstra 2024-2026	5 perkara	10 Perkara	200%	https://drive.google.com/file/d/1EH9z8_k3Dk12UlwB9VPXwoN13153fn9i/view?usp=sharing
70	Penyelesaian Perselisiajn Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan	Renstra 2024-2026	4 perkara	2 Perkara	500	https://drive.google.com/file/d/17CV4vAKnRUdvvIQLEfNFOVkRdXK0jvSf/view?usp=sharing
71	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Pemberdayaan LKS Tripartit))	Renstra 2024-2026	1 Lembaga	1 Lembaga	100	https://drive.google.com/file/d/1d50c-ZG2W5cvAsd48uKJKYVWKz1X9FHJ/view?usp=sharing
72	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi kesejahteraan Pekerja	Terlaksanasnya program jaminan sostial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Renstra 2024-2026	15.700 orang	20.420 orang	130,06%	https://drive.google.com/file/d/1IhvrlSHpNa3UNXf66bmuMv-cDsV3aaW/view?usp=sharing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
73	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	Renstra 2024-2026	7%	9,09%	129,86%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
74		Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	Renstra 2025-2029	9%	9,09%	101%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
75	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	Renstra 2024-2026	7%	9,09%	129,86%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp
76	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	Renstra 2024-2026	2 KK	1 KK	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1l9MfZIpoZvZT4u4GvOpzLzKAbL3HZXxp